



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

**PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018-2021**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang memuat arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021, selanjutnya disingkat RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 adalah dokumen perencanaan pencapaian tujuan SDGs terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Maksud pengaturan RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs Tahun 2018-2021;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis OPD terutama yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan SDGs; dan
- c. acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lintas Sektor, Antar Wilayah, dan Lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan arah kebijakan umum, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian tujuan SDGs selama periode tahun 2018-2021 agar target capaian SDGs yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis OPD; dan

- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 memuat kondisi capaian tujuan SDGs, permasalahan dan tantangan, arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan SDGs, Target Kinerja Pencapaian Tujuan SDGs, Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs.
- (2) RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian tujuan SDGs Tahun 2018.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat status capaian dari berbagai indikator terkait TPB/SDGs yang dituliskan secara terkonsolidasi pada Provinsi mulai dari goal 1 (satu) sampai dengan goal 17 (tujuh belas) serta secara umum menjelaskan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tujuan 1 sampai dengan tujuan 17.

BAB II Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan TPB/SDGs

Memuat arah kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam matriks. Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang dilengkapi dengan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

BAB III Pemantauan dan Evaluasi

Memuat mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan (goal).

BAB IV Penutup

Memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak

dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Universal, Integration, No-One Left Behind.

- (2) RAD SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana dan Pokja masing-masing Pilar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 - 09 - 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 28 - 09 - 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Nasir Ahmad

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga akhirnya penyusunan Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat beriringan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 mempedomani Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan bahwa penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs/TPB sebagai dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan dukungan terhadap pencapaian TPB/SDGs, yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, proses penyusunan Draft RAD TPB/SDGs ini juga mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang telah ditetapkan dengan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sehingga dalam penyusunannya, seluruh goals (tujuan) yang menjadi sasaran TPB/SDGs telah terintegrasikan kedalam sasaran serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini kiranya dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah yang selama ini telah ada seperti RPJMD serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kab/Kota se-Sumatera Barat yang disusun dan dilaksanakan setiap tahunnya, dan tentunya juga bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Provinsi serta masyarakat luas lainnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusunan RAD TPB/SDGs dan seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk berkontribusi secara aktif dalam proses penyusunan, dan melakukan sinkronisasi serta pengintegrasian penyusunan RAD TPB/SDGs kedalam dokumen perencanaan daerah.

Demikianlah yang dapat disampaikan, dan semoga RAD TPB/SDGs ini dapat bermanfaat dalam upaya percepatan pencapaian tujuan SDGs tahun 2018-2021 baik nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku Ketua Tim Pengarah,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
 - 2.1.1. Kemiskinan
 - 2.1.2. Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3. Daerah Tertinggal
 - 2.1.4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 - 2.2.1. Pangan
 - 2.2.2. Gizi Balita
 - 2.2.3. Pertanian Berkelanjutan

- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
 - 2.3.1. Kesehatan
 - 2.3.2. Kesejahteraan Sosial
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
 - 2.4.1. Pendidikan
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - 2.6.1. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 2.6.2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 2.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
 - 2.7.1. Energi Dan Sumber Daya Mineral
- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- 2.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- 2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- 2.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- 2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
 - 2.13.1. Wilayah Rawan Bencana
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaat Ekosistem Kelautan
 - 2.14.1. Kelautan dan Perikanan
 - 2.14.2. Kawasan Konservasi Perairan

- 2.15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
 - 2.15.1. Kehutanan
 - 2.15.2. Lingkungan Hidup
- 2.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- 3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17 Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 2016-2021
- 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

- 4.4 Waktu Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
- 4.5 Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi
 - 4.5.1. Mekanisme Pemantauan RAD
 - 4.5.2. Mekanisme Evaluasi
- 4.6. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah
 - 4.6.1. Alur Laporan
 - 4.6.2. Alur Umpan Balik
- 4.7 Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Matriks Sandingan TPB/SDGs- RPJMD Provinsi Sumatera Barat
- Tabel 2.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2010 – September 2015.
- Tabel 2.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012-September 2015.
- Tabel 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
- Tabel 2.4. Status Kesejahteraan di Sumatera Barat Menurut Jumlah Rumah Tangga dan Individu.
- Tabel 2.5. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.6. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2011 – 2015 di Provinsi Sumatera Barat (ribu orang).
- Tabel 2.7. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011- Agustus 2015 (ribu orang).
- Tabel 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (Persen).
- Tabel 2.9. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
- Tabel 2.10. Karakteristik Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat
- Tabel 2.11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat Tahun 2015.
- Tabel 2.12. Perkembangan Indikator Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

- Tabel 2.13. Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)
- Tabel 2.14. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.15. Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)
- Tabel 2.16. Perkembangan Indikator Rasio Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.17. Perkembangan Indikator Rasio dokter per satuan penduduk di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.18. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.19. Perkembangan Indikator Cakupan Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.20. Perkembangan Pendidikan Dasar di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.21. Perkembangan Pendidikan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.22. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.23. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sumbar Tahun 2010-2015
- Tabel 2.25. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.26. Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.27. Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

- Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (%)
- Tabel 2.30. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (%)
- Tabel 2.31. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)
- Tabel 2.32. Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)
- Tabel 2.33. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2013-2015
- Tabel 2.34. Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (%)
- Tabel 2.35. Panjang Jalan dan Kemantapan Jalan di Sumatera Barat menurut statusnya Tahun 2010-2015
- Tabel 2.36. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.37. Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat
- Tabel 2.38. Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Ton)
- Tabel 2.39. Jenis Industri Pengolahan Sumatera Barat
- Tabel 2.40. Sebaran Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
- Tabel 2.41. Sebaran Hutan Bakau di Sumatera Barat Tahun 2015
- Tabel 2.42. Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat
- Tabel 2.43. Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.44. Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.45. Gambaran Umum Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Provinsi Sumatera Barat

- Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.48. Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Urusan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015
- Tabel 2.51 Perkembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2015
- Tabel 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.
- Tabel 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.
- Tabel 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
- Tabel 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.
- Tabel 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender.
- Tabel 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.
- Tabel 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- Tabel 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tabel 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tabel 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- Tabel 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tabel 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- Tabel 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret dan September 2011-2015.
- Grafik 2.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Kondisi Maret dan September 2011-2015.
- Grafik 2.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat.
- Grafik 2.4. Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Februari dan Agustus 2010-2015.
- Grafik 2.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2015 di Sumatera Barat.
- Grafik 2.6. Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi Agustus 2010-2015.
- Grafik 2.7. Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015
- Grafik 2.8. Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015
- Grafik 2.9. PDRB Antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)
- Grafik 2.10. Grafik 2.10
PDRB Antar Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan
Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)
- Grafik 2.11. Grafik 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (%)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret dan September 2011-2015.
- Gambar 2.2 Produksi Tiga Jenis Komoditi Bernilai Ekonomis Utama Perikanan Tangkap
di Perairan Laut Sumatera Barat Tahun 2015
- Gambar 4.1 Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat
- Gambar 4.2 Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Sumatera Barat
- Gambar 4.3. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Non-Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Agenda pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, merupakan penjabaran operasional dari Sasaran pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. Penyusunan RPJMD didasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program pembangunan serta Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program pembangunan dimaksud.

Proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang diperoleh dari rangkaian tahapan yang dilaksanakan seperti konsultasi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD). Implementasi pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dokumen RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, RPJMD mejadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk lembaga non pemerintah/*non state actor* dalam bersinergi mewujudkan visi dan misi pembangunan di Sumatera Barat.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pada tanggal 12 Agustus 2016, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018.

RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RAD TPB/SDGs ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD yang menjadi

acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Walaupun dari sisi waktu RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 terbit lebih dahulu daripada Peraturan Presiden tentang SDGs, yaitu Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs), di Provinsi Sumatera Barat telah diarusutamakan dalam RPJMD 2016-2021. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap tujuan, target dan indikator SDGs maka diperoleh informasi bahwa 16-tujuan dari 17 tujuan SDGs telah termuat dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021. Meskipun baru terdapat 36 target dari 109 target SDGs, dan 64 indikator dari 326 indikator SDGs yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, namun secara fakta hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya RPJMD Provinsi Sumatera Barat telah selaras dengan TPB/SDGs. Tentu saja, keselarasan ini perlu terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2030 seluruh tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden dapat terakomodasi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Agenda TPB/SDGs yang disusun, beriringan dengan periode Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2016-2021, antara lain: pembangunan manusia, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan, agenda-agenda TPB/SDGs telah menjadi arus utama dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Sinergi antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMN Tahun 2015-2019 dan TPB/SDGs dapat dicermati prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Prioritas 1: Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran prioritas 1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama.
- c. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekak).
- d. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
- e. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.
- f. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

Prioritas 2: Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

- a. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur.
- b. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur.
- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan public.

Prioritas 3: Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan

- a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatnya integritas peserta didik.
- c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
- d. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja.
- e. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca.
- f. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.
- b. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana.

- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga.
- d. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.
- e. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

Prioritas 5: Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

- a. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
- b. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Prioritas 6: Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi

- a. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.
- b. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Prioritas 7: Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.

- a. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.

Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

- a. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
- b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
- c. Menurunkan daerah tertinggal.
- d. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Prioritas 9: Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur

- a. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi.
- b. Meningkatnya pelayanan perhubungan/trans-portasi.
- c. Meningkatnya keselamatan lalu lintas.
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air.
- e. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada Kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.
- f. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Prioritas 10: Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

- a. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- c. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan.
- d. Berkurangnya resiko bencana.
- e. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.
- f. Terpeliharanya debit sungai.
- g. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

Selanjutnya, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Matriks Pemetaan Target dan Indikator TPB/SDGs – RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi. Setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015:11,13%)	<i>Sasaran:</i> • Menurunnya jumlah penduduk miskin	• Menurunnya tingkat Kemiskinan dari 6,71% pada tahun 2016 menjadi 5,50 pada tahun 2021.	1. Dinas PMD 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Perkimtan 8. Dinas ESDM
	2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatnya Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	<i>Sasaran:</i> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	• Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS meningkat dari 69,27% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021.	Dinas Kesehatan
		2.2 Meningkatnya persentase Penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	<i>Sasaran:</i> Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : • Penduduk Miskin • Komunitas Adat Terpencil • Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi. dari 0,1% pada tahun 2016 menjadi 0,16% pada tahun 2021. Persentase pelayanan PMKS terhadap: • Penduduk Telantar • Penduduk Korban Bencana • Penduduk Marjinal • Penduduk Penyandang Disabilitas Tetap sebesar 16,99% pada tahun 2016 sampai tahun 2021.	1. Setda (Biro Bintal & Kesra) 2. Dinas Sosial
		2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014:Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Sasaran: • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 6,86% pada tahun 2016 menjadi 7,94% pada tahun 2021.	Disnakertrans
	3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	Sasaran: • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan meningkat dari 87% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2021.	Dinas Kesehatan
		3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.	Presentase anak 0-18 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap naik dari 91% pada tahun 2016 menjadi 95% pada tahun 2021.	Dinas Kesehatan
		3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.		Persentase CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi) meningkat dari 52,5% pada tahun 2016 menjadi 60,20% pada tahun 2021. <i>Catatan: Pemindehan fungsi dari BPPR dan KB ke BPPKKB dan PS</i>	BPPR dan KB
				• Presentase <i>unmet need</i> menurun dari 8,3% pada tahun 2016 menjadi 5,8% pada tahun 2021. <i>Catatan: Pemindehan fungsi dari BPPR dan KB ke BPPKKB dan PS</i>	BPPR dan KB
		3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.	• Persentase cakupan pelayanan air minum meningkat dari 68% pada tahun 2016 menjadi 86% pada tahun 2021.	Dinas PU PR

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.	• Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat dari 72% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2021.	Dinas PU PR
		3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.	Penurunan kawasan kumuh dari 16,5% pada tahun 2016 menjadi 11,5% pada tahun 2021. Persentase rumah layak huni meningkat dari 78,56% pada tahun 2016 menjadi 86,90% pada tahun 2021.	1.Dinas PU PR 2.Dinas Perkimtan
		3.7 Meningkatnya Angka partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan.	Persentase APM SD/SDLB/MI /Paket A meningkat dari 99,58% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021	Dinas Pendidikan
		3.8 Meningkatnya Angka partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan (Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun)	• Persentase APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B meningkat dari 81,20% pada tahun 2016 menjadi 81,55% pada tahun 2021.	Dinas Pendidikan
		3.9 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).		• Persentase APK SMA/SMK/MA/SMALB /Paket C dari 96,88% pada tahun 2016 menjadi 98,03% pada tahun 2021.	Dinas Pendidikan
		1.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana	Persentase kepemilikan akte pencatatan sipil (Usia 0-18 Tahun) meningkat dari 75% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2021.	BPPKKB dan PS
		3.11 Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) (Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah terisolir, terpencil dan perbatasan)	• Persentase rasio elektrifikasi meningkat dari 85% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2021	Dinas ESDM

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Sasaran: Berkurangnya resiko bencana.	• Meningkatnya persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana dari 51% pada tahun 2016 menjadi 55% pada tahun 2021.	BPBD
				• Meningkatnya persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana dari 51% pada tahun 2016 menjadi 55% pada tahun 2021.	BPBD
				• Jumlah kab/kota yang melaksanakan rehabilitasi sosial meningkat dari 11 kab/kota pada tahun 2016 menjadi (belum ditargetkan) kab/kota pada tahun 2021.	Setda (bintal dan kesra)
			Sasaran: Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.	• Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana meningkat dari 71% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2021.	1. BPBD 2. Dinas PU PR 3. Dinas Perkimtan 4. Dinas Sosial 5. Dinas PSDA
				• Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana meningkat dari 71% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2021	1. BPBD 2. Dinas PU PR 3. Dinas Perkimtan 4. Dinas Sosial 5. Dinas PSDA
				• Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tetap yaitu 75% pada tahun 2016 sampai tahun 2021.	Dinas Sosial
• Meningkatnya persentase penanganan konflik sosial dari 40% pada tahun 2018 menjadi 45% pada tahun 2021					
		4.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Sasaran: Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.	• Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tetap yaitu 75% pada tahun 2016 sampai tahun 2021.	Dinas Sosial
				• Meningkatnya persentase penanganan konflik sosial dari 40% pada tahun 2018 menjadi 45% pada tahun 2021	

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		4.3 Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).		• Persentase korban bencana provinsi yang terlayani dalam dalam pemulihan trauma tetap yaitu 75% pada tahun 2016 sampai tahun 2021.	Dinas Sosial
		4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).			
		4.5 Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).			
II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).		Persentase status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang meningkat dari 4,75% pada tahun 2016 menjadi 4,5% pada tahun 2021	Dinas Kesehatan
		1.2 Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).			
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.1 Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).			
		2.2 Menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%).			
		2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).			
		2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Sasaran: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan meningkat dari 84% pada tahun 2016 menjadi 87% pada tahun 2021	Dinas Pangan
	3. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Sasaran: Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi - KSP dari 119 kawasan pada tahun 2016 menjadi 154 kawasan pada tahun 2021. - Kawasan agribisnis dari 6 kawasan ada tahun 2016 menjadi 15 kawasan pada tahun 2021.	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 2. Dinas Peternakan & Keswan 3. Dinas Kelautan & Perikanan
III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).			
		1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).		Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan meningkat dari 87% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2021.	Dinas Kesehatan
		1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%)		Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan meningkat dari 87% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2021	Dinas Kesehatan
	2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).			
		2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana	
	3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).		Persentase kasus HIV yang diobati dari 100% pada tahun 2016 menjadi 55% pada tahun 2021.		
		3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).				
		3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).				
		3.4 Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).				
		3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada thn 2019 menjadi 35.				
	4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).				
		4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).				
		4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).				
		4.4 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).				
	5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	Sasaran Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Narkoba a. Kasus pidana tetap pada angka 8,03% pada tahun 2016 sampai 2021. b. Pencegahan % Pemuda (16-30 th) bebas narkoba N.A pada tahun 2016 menjadi 98,50% pada tahun 2021		

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
				<p>c. Penanganan persentase kasus yang dilayani tetap 100% pada tahun 2016 dan 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPWL (Jumlah) 22 pada tahun 2016 menjadi 27 pada tahun 2021. - IPWL (Kab/Kota) 17 pada tahun 2016 menjadi 19 pada tahun 2021. <p>d. Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - % kenaikan penjangkauan narkoba 15,59% pada tahun 2016 menjadi 19,49% pada tahun 2021. - % kenaikan rawat jalan dari 40% pada tahun 2016 menjadi 60% pada tahun 2021. - % kenaikan rawat inap 40% pada tahun 2016 menjadi 50% pada tahun 2021. <p>Persentase Penjangkauan Pengguna Narkoba meningkat dari 15,59% pada tahun 2015 menjadi 16,59% pada tahun 2021.</p>	
		5.2 Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75).			
		5.3 Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).			
	6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.	Sasaran: Meningkatnya keselamatan lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend) dari 2,71 pada tahun 2016 menjadi 2,67 pada tahun 2021 <p>Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu lintas dari</p>	Dinas Perhubungan

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
				0,25% per 10.000 registrasi kendaraan pada tahun 2016 menjadi 1,48% per 10.000 registrasi kendaraan pada tahun 2021.	
	7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana	Persentase Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun dari 2,61% pada tahun 2016 menjadi 2,33% pada tahun 2021. Persentase Total Fertility Rate (TFR) menurun dari 2,61% pada tahun 2019 menjadi 2,33% pada tahun 2021.	1. Dinas PP KB & Duk Capil 2. Dinas Kesehatan
		7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana	Persentase CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi) meningkat dari 52,5% pada tahun 2016 menjadi 60,2% pada tahun 2021. CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) meningkat dari 52,5% pada tahun 2016 menjadi 60,2% pada tahun 2021.	BPPR dan KB
		7.3 Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).			
		7.4 Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).		• Angka ratio ASFR 15-19 tahun menurun dari 23,40% pada tahun 2015 menjadi 11,90% pada tahun 2021.	BPPKKB dan PS
	8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	8.1 Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana	• Persentase Unmet Need (kebutuhan ber KB) menurun dari 8,3% pada tahun 2019 menjadi 5,8% pada tahun 2021. Persentase Unmet Need (kebutuhan ber KB) menurun dari 9,10% pada tahun 2015 menjadi 5,8% pada tahun 2021.	1. Dinas PP KB & Duk Capil – 2. Dinas Kesehatan

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana	
		8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/KIS meningkat dari 69,27% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021. Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan meningkat dari 12,46% pada tahun 2015 menjadi 3,75% pada tahun 2021 	Dinas Kesehatan	
IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin bhw semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, berkualitas, yg mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).				
		1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah Sekolah Menengah pertama/SLB Terakreditasi Minimal B, meingkat dari 72,23% pada tahun 2016 menjadi 79.74% pada tahun 2021. Persentase Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B 70.81% pada tahun 2015 menjadi belum ditargetkan pada tahun 2021. 	Dinas Pendidikan	
		1.3 Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).				
		1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).				
		1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).				
		1.6 Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).			Persentase APK SMA/SMK/ MA/ SMALB Paket C meningkat dari 96,88% pada tahun 2016 menjadi 98,03% pada tahun 2021.	

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Sasaran: Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya harapan lama sekolah, dari 8,59 tahun pada tahun 2016 menjadi 8,92 tahun pada tahun 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> Setda (Biro Bintal dan Kesra) Dinas Pendidikan
	2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat dari 68,15 % pada tahun 2016 menjadi 77,50% pada tahun 2021. 	Dinas Pendidikan
	3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	3.1 Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).		Persentase APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C meningkat dari 96,88% pada tahun 2016 menjadi 98,03% pada tahun 2021.	Dinas Pendidikan
		3.2 Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).			
	4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase APM SD/SDLB/MI /Paket A dari 99,58% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021. 	Dinas Pendidikan
			Sasaran: Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 94,68% pada tahun 2016 menjadi 95,08% pada tahun 2021. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 62,02% pada tahun 2016 menjadi 62,42% pada tahun 2021. 	DPP dan PA
		4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	Persentase APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B meningkat dari 81,20% pada tahun 2016 menjadi 81,55% pada tahun 2021.	Dinas Pendidikan

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
			Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 94,44% pada tahun 2016 menjadi 95,24% pada tahun 2021. • Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 62,02% pada tahun 2016 menjadi 62,34% pada tahun 2021. 	DPP dan PA
		4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 94,68% pada tahun 2016 menjadi 95,08% pada tahun 2021. • Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 62,02% pada tahun 2016 menjadi 62,42% pada tahun 2021. 	DPP dan PA
			Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase APM SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C, meningkat dari 73,15% pada tahun 2016 menjadi 73,35% pada tahun 2021. 	Dinas Pendidikan
		4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 94,44% pada tahun 2016 menjadi 95,24% pada tahun 2021. • Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 62,02 pada tahun 2016 menjadi 62,42 pada tahun 2021. 	DPP dan PA

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana	
	5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).				
		5.2 Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 1559 tahun pada tahun 2019.				
V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015:19).	Sasaran: Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.	• Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 62,02 pada tahun 2016 menjadi 62,42 pada tahun 2021.	DPP dan PA	
	2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).			Menurunnya presentase prevalensi kekerasan terhadap anak dari 15,86% pada tahun 2018 menjadi 14,86% pada tahun 2021.	DPP dan PA
		2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).				
	3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pd thn 2019 menjadi 21 thn (2012: 20,1 thn).				
		3.2 Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana	• Menurunnya ASFR 15-19 tahun, dari 21.0% pada tahun 2016 menjadi 11,9% pada tahun 2021.	1. Dinas PP KB & Duk Capil 2. Dinas Kesehatan	
		3.3 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).			Persentase APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C meningkat dari 96,88% pada tahun 2016 menjadi 98,03% pada tahun 2021.	

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). 4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).			
	5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.1 Menurunnya <i>unmet need</i> kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Sasaran: Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana	• Persentase Unmed Need (kebutuhan ber KB), menurun dari 8,3% pada tahun 2016 menjadi 5,8% pada tahun 2021.	Dinas PP KB & Duk Capil
5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).		• Persentase CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi), dari 52,5% pada tahun 2016 menjadi 60,20% pada tahun 2021		Dinas PP KB & Duk Capil	
5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.					
VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.	• Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan air minum, dari 68% pada tahun 2016 menjadi 86% pada tahun 2021.	Dinas PU PR
		1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana	
	2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.	• Meningkatnya persentase rumah tangga bersanitasi, dari 72% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2021.	1. Dinas PU PR 2. Dinas Perkimtan	
		2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).				
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan: Rumah tangga bersanitasi, meningkat dari 72% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2021. Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat dari 72% pada tahun 2016 menjadi 77% pada tahun 2021.	Dinas Prasjaltarkim	
		3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.				
		3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.				

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		3.4 Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.			
	4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	4.1 Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.	Sasaran: Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan.	• Persentase peningkatan izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkat dari 15% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan.
		4.2 Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of wastewater in agriculture</i>).			
	5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	5.1 Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sasaran: Memelihara dan meningkatkan tutupan vegetasi di daerah aliran sunga	Rasio debit minimum/ maksimum air sungai meningkat dari 0,12 pada tahun 2016 menjadi 0.17 pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan
		5.2 <i>Updating</i> dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.			Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat dari 20% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021.
		5.3 Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai		Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat dari 20% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021.	

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		5.4 Meningkatkan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan 19 DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara pada tahun 2019.			
		5.5 Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.			
		5.6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Sasaran: Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum air sungai meningkat dari 0,12 pada tahun 2016 menjadi 0.17 pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan
		5.7 Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air .	Persentase rata-rata Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi meningkat dari 67,31% pada tahun 2016 menjadi 68,80% pada tahun 2021.	Dinas PSDA

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.1 Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019.			
		6.2 Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019.			
		6.3 Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019.			
		6.4 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.	Sasaran: Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan.	• Persentase penurunan luas lahan kritis (Ha/Th), meningkat dari 0,18% pada tahun 2016 menjadi 2,26% pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan
		6.5 Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.			
VII. Menjamin akses energi yg terjangkau, andal, ber keljtn, dan modern utk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	1.1 Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).	•Meningkatnya rasio elektrifikasi, dari 85% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2021.	Dinas ESDM.
		1.2 Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 (2014: 843 KWh).		Persentase rumah tangga pengguna listrik (PLN+non PLN) meningkat dari 84,54% pada tahun 2016 menjadi 98,8% pada tahun 2021.	Dinas ESDM
		1.3 Tercapainya jaringan gas 1,1 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2019 (2014: 200 ribu).			
	2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.	2.1 Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.			
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.	3.1 Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan krj yg produktif dan menyeluruh, srt pekerjaan yg layak utk semua.	1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dg kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang di negara kurang berkembang.	1.1 Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.	• PDRB per Kapita, meningkat dari 36,48 juta pada tahun 2016 menjadi 48,91 juta pada tahun 2021.	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. DPM dan PTSP 4. Setda (Biro Perekonomian)
	2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	2.1 Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.	Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,26% pada tahun 2016 menjadi 5,92% pada tahun	Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UKM
	3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).		Persentase serapan tenaga kerja sektor formal meningkat dari 17,43% pada tahun 2016 menjadi 19,61% pada tahun 2021.	isnakertrans
		3.2 Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).		Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil meningkat dari 1,50% pada tahun 2016 menjadi 9% pada tahun 202	Dinas Koperasi dan UMKM
	4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.			
	5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	5.1 Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase pengangguran terbuka menurun dari 6,68% pada tahun 2016 menjadi 5,60% pada tahun 2021,	Disnakertrans
	6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anakanak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	6.1 Mekuatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya		Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi menurun dari 392 pada tahun 2016 menjadi 382 pada tahun 2021.	
	7. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka	7.1. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.				
	8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).		Persentase kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 6,02% pada tahun 2016 menjadi 21,02% pada tahun 2021, dan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 10,25% pada tahun 2018 menjadi 35,25% pada tahun 2021.	Dinas Pariwisata
		8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).		Persentase kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 10,25% pada tahun 2018 menjadi 35,25% pada tahun 2021.	Dinas Pariwisata
	9. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	9.1 Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Persentase pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,26% pada tahun 2016 menjadi 5,92% pada tahun 2021	Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UKM
IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Persentase kemantapan jalan provinsi meningkat dari 69% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2021.	Dinas PU PR
		1.2. Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Sasaran: Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan penumpang terangkut moda laut meningkat dari 2,5% pada tahun 2016 menjadi 24,80% pada tahun 2021. Persentase peningkatan penumpang terangkut SDP (Sungai, Danau, Penyebrangan) meningkat dari 4,10% pada tahun 2016 menjadi 24,80% pada tahun 2021. 	Dinas Perhubungan
		1.3. Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan penumpang terangkut kereta Api meningkat dari 6,66% pada tahun 2016 menjadi 40% pada tahun 2021. 	Dinas Perhubungan
		1.4. Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		1.5 Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.		Jumlah unit sarana dan prasarana UPTD Pelabuhan tetap yakni 2 unit pada tahun 2016 dan tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	2.1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). 2.2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).			
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan <i>retrofit</i> industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	3.1 Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.			
X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1.1 Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Sasaran: Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.	• Indeks Gini menurun dari 0,331 pada tahun 2016 menjadi 0,327 pada tahun 2021.	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. DPM dan PTSP 4. Setda (Biro Perekonomian)
		1.2 Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Sasaran: Menurunnya jumlah penduduk miskin.	• Tingkat kemiskinan menurun dari 6,81% pada tahun 2016 menjadi 5,50% pada tahun 2021.	1. Dinas PMD 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Perkimtan 8. Dinas ESDM

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		1.3 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	• Menurunkan daerah tertinggal	• Jumlah kabupaten tertinggal menurun dari 3 kabupaten pada tahun 2016 menjadi 1 kabupaten pada tahun 2021.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan, 3. Dinas ESDM, 4. Dinas Perkintan 5. BPBD 6. Dinas PMD
		1.4 Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Sasaran: Menurunkan daerah tertinggal	Persentase Kabupaten Tertinggal menurun dari 3% pada tahun 2016 menjadi 1% pada tahun 2021.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan, 3. Dinas ESDM, 4. Dinas Perkintan 5. BPBD
		1.5 Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.			
		1.6 Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin menurun dari 6,71% pada tahun 2016 menjadi 5,50% pada tahun 2021.	1. Dinas PMD 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Perkintan 8. Dinas ESDM
	2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	2.1 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).			
3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	3.1. Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).			Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 7,8% pada tahun 2018 menjadi 7,94% pada tahun 2021.	

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	4. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	4.1 Meningkatnya kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran. 4.2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan tenaga migran.			
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	1.1.Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.		Persentase rumah layak huni meningkat dari 81,89% pada tahun 2018 menjadi 86,90% pada tahun 2021.	Dinas Perkimtan
		1.2 Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.			
		1.3 Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.			
	2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	2.1 Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Sasaran: Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	Persentase Penumpang terangkut a. Moda darat, meningkat dari 7,11% pada tahun 2016 menjadi 42,71 pada tahun 2021. b. Moda Laut, meningkat dari 2,50% pada tahun 2016 menjadi 15,50% pada tahun 2021. c. SDP, meningkat dari 4,10% pada tahun 2016 menjadi 24,80% pada tahun 2021. d. Kereta Api, meningkat dari 6,60% pada tahun 2016 menjadi 40,00% pada tahun 2021.	Dinas perhubungan
		2.2. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	3.1. Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.			
		3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).			
		3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.			
		3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.			
	4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	4.1 Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (<i>heritage city</i>) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.			
	5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.			
		5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>).	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	1. Persentase pertambangan tanpa izin menurun dari 5% pada tahun 2016 menjadi 1,86% pada tahun 2021. 2. Persentase izin penggunaan air tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku meningkat dari 15% pada tahun 2016 menjadi 1005 pada tahun 201. 3. Persentase penurunan luas lahan kritis (Ha/Th) meningkat 0,18% pada tahun 2016 menjadi 2,26% pada tahun 2021	Dinas ESDM Dinas Kehutanan Dinas ESDM

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
				<p>4. Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani stabil dari 100% pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2021.</p> <p>5. Persentase penurunan laju kerusakan hutan meningkat dari 4,21% pada tahun 2016 menjadi 8,15% pada tahun 2021.</p> <p>6. Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) meningkat dari 5% pada tahun 2016 menjadi 30% rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)</p>	
		5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			
	6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).		Persentase pengelolaan TPA regional meningkat dari tidak ada target pada tahun 2016 menjadi 77% pada tahun 2021.	Dinas Prasjaltarkim
		6.2. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.			
	7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.			
XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	1.1 Tersusunnya konsep kebijakan rencana operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya berupa kolaborasi tematik quick wins program hingga tahun 2019.	Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 70,56 pada tahun 2016 menjadi 71,66 pada tahun 2021.	Bapedalda

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).			
	3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (<i>reduce, reuse, and recycle/3R</i>) melalui beroperasinya 115 unit <i>recycle center</i> skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015:1 unit).		Persentase penurunan volume sampah melalui implementasi 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) tetap dari 2% pada tahun 2016 dan 2% pada tahun 2021.	Dinas LH
	4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	4.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.		Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) meningkat dari 3,57% pada tahun 2016 menjadi 8,33% pada tahun 2021	
	5. Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	5.1 Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (<i>Green Public Procurement, GPP</i>) hingga tahun 2019.			
XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.			
	2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
XIV. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	1. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	1.1 Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015: 5 WPP).	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.	• Meningkatnya persentase peningkatan produksi perikanan budidaya laut, dari 0,78% pada tahun 2016 menjadi 1,68% pada tahun 2021.	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Perhubungan
	2. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	2.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019 (2015: 6.299.290 ton).	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.	• Meningkatnya Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap, dari 0.42% pada tahun 2016 menjadi 1,21 pada tahun 2021.	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Perhubungan
	3. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	3.1 Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 (2015: 17,3 juta Ha).		• Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi laut, dari 7 kawasan pada tahun 2016 menjadi 7 kawasan pada tahun 2021.	Dinas Kelautan dan Perikanan.
	4. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	4.1 Terkendalnya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %).		Frekuensi pengawasan kelautan dan kemaritiman meningkat dari 50 kali pada tahun 2016 menjadi 480 kali pada tahun 2021.	Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.		Persentase Indeks Tutupan Lahan meningkat dari 63,55% pada tahun 2016 menjadi 61,41% pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan
	2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	Sasaran: Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum air sungai meningkat dari 0,12 pada tahun 2016 menjadi 2021 pada tahun 201.	1. Dinas Kehutanan 2. Dinas PU PR 3. Dinas PSDA
			Sasaran: Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove meningkat dari 70% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2021. - Terumbu karang meningkat dari 30% pada tahun 2016 menjadi 2021 pada tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
		1.2 Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015:100.000 ha).		Persentase optimalisasi PNB sector kehutanan dari HHK dan HHBK meningkat dari 82% pada tahun 2016 menjadi 85% pada tahun 2021.	Dinas Kehutanan
	3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).		Penurunan lahan kritis dari 630.695 ha pada tahun 2015 menjadi 1,09 ha pada tahun 2018.	Dinas Kehutanan

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	4.1 Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).			
	5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	5.1 Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/tahun).			
	6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	6.1 Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati melalui pelaksanaan tiga kebijakan terkait pada tahun 2019 (2015: 3).			
	7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam Perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	7.1 Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.			
XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun.	1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Sasaran: Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.	Meningkatnya jumlah kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari 7 kabupaten/kota pada tahun 2016 menjadi 12 kabupaten/kota pada tahun 2021.	DPP dan PA
	2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).		Persentase prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dari 15,86% pada tahun 2019 menjadi 14,86% pada tahun 2021	Dinas PPr PA

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	2. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.			
		3.2 Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500 perkara.			
	3. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).			
	4. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).			
		5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.	Predikat Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi SAKIP) meningkat dari BB pada tahun 2016 menjadi A pada tahun 2021.	Bappeda
		5.3 Meningkatnya penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Penggunaan EProcurement terhadap Pengadaan Barang dan Jasa tetap dari 100% pada tahun 2016 dan tahun 2021. Skor terhadap presentase tender melalui tender elektronik (e-procurement) meningkat dari 83 pada tahun 2016 menjadi >83 pada tahun 2021.	Bappeda

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota:NA)		Skor Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 60-70 pada tahun 2016 menjadi 75-80 pada tahun 2021.	Setda (Biro Organisasi)
		5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.		Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau) tetap di zona hijau dari tahun 2012 sampai 2021.	Setda (Biro Organisasi)
	5. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).		Persentase keterwakilan perempuan dilembaga parlemen meningkat dari tidak ada target pada tahun 2016 menjadi 10,77% pada tahun 2021.	BPPR dan PA
		6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).			
		6.3 Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).		Persentase capaian indeks demokrasi indonesia (IDI) meningkat dari 65,22% pada tahun 2016 menjadi 68,31% pada tahun 2021.	Badan Kesbangpol
		6.4 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).			
		6.5 Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).			
	7. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
		7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).		Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran meningkat dari 75,50% pada tahun 2016	BPPR dan KB
	8. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.		Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani tetap dari 3 perkara pada tahun 2016 sampai tahun 2021.	Setda (Biro Hukum)
		8.2 Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.		Indeks Keterbukaan Informasi Publik meningkat dari 55 pada tahun 2016 menjadi 80 pada tahun 2021.	Setda (Biro Humas)
		8.3 Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.			
		8.4 Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.			
XVII. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1.1 Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	2. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	2.1 Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular.			
		2.2 Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota yang menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2019 (2015: 82% kabupaten/kota).			
		2.3 Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).			
		2.4 Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.			
	3. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	3.1 Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.			
	4. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.	4.1 Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).			

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	5. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	5.1 Menurunnya rata-rata tarif terbobot di negara Free Trade Agreement (FTA) mitra (6 negara) menjadi 6,78 pada tahun 2019 (2015: 9,05).			
	6. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	6.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%).	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya nilai ekspor, dari 1% pada tahun 2016 menjadi 2,5% pada tahun 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UKM DPM dan PTSP Setda (Biro Perekonomian) Dinas Pertanian Dina Peternakan Dinas Koperasi
	7. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	7.1 Tersedianya <i>dashboard</i> makroekonomi			
	8. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	8.1 Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antar peradaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.			
	9. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	9.2 Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.			
	10. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	10.1 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.	<p>Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Jumlah OPD yang melaksanakan tertib arsip meningkat dari 13 OPD pada tahun 2016 menjadi 50 OPD pada tahun 2021.</p> <p>Persentase terpenuhinya data statistik sektoral meningkat dari tidak ada target pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021</p>	Dinas Kom & Info

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indikator Kinerja RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	Instansi Pelaksana
	11. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	11.1 Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang profesional, integritas, dan amanah 2019.			
		11.2 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan statistik.			
		11.3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi hasil-pembangunan.	Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah OPD yang melaksanakan tertib arsip meningkat dari 13 OPD pada tahun 2016 menjadi 50 OPD pada tahun 2021. Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapaian pada RPJMD Provinsi meningkat dari 60% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2021.	Dinas Kominfo Bappeda

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs.

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi dari MDGs.

MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator. Capaian MDGs Indonesia pada tahun 2015 adalah dari 67 indikator sudah 49 indikator tercapai dan 18 indikator yang belum tercapai. TPB/SDGs sebagai transformasi MDGs, memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan program MDGs sebelumnya. Penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih komprehensif, yakni melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal;
- 2) Memperluas sumber pendanaan (pemerintah, swasta, dan sumber lain);
- 3) Menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan;
- 4) Inklusif (*no one left behind*);
- 5) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS, dan Media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi;
- 6) Zero goals, menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator.
- 7) Cara pelaksanaan (*means of implementation*), menggambarkan gabungan sumber daya yang mendukung secara nasional yang diperlukan untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan.

Beberapa contoh transformasi MDGs menjadi TPB/SDGs, adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi sebanyak 3 tujuan, yaitu:
 - a) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;
 - b) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
 - c) Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 tujuan meliputi:
 - a) Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 - b) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau;
 - c) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
 - d) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim;
 - e) Tujuan 14 Ekosistem Lautan;
 - f) Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target tujuan global, TPB/SDGs bertujuan menuntaskan seluruh target dari tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal”. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zero).

Selain itu, apabila dibandingkan dengan MDGs, TPB/SDGs juga memiliki 4 tujuan baru yaitu:

- a) Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- b) Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan;
- c) Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan
- d) Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Ditinjau dari indikatornya, MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs memiliki 241 Indikator. Meski menghadapi sejumlah tantangan, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi:

- 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari;
- 2) akses pendidikan dasar;
- 3) kesetaraan gender dalam pendidikan;
- 4) Angka Kematian Bayi dan Balita;
- 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria;
- 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan; dan
- 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015 yaitu:

- 1) Kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional;
- 2) Angka Kematian Ibu;
- 3) Prevelansi HIV dan AIDS;
- 4) Tutupan lahan;
- 5) Air minum layak perdesaan; dan
- 6) Sanitasi layak perdesaan.

Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Di tingkat daerah, hal ini pun juga yang diteruskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.3. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan TPB/SDGs tersebut, mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat di Provinsi Sumatera Barat yang terefleksi dari sinergitas antara RPJMD dengan TPB/SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Provinsi Sumatera Barat bagi Indonesia dan selanjutnya bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan kerja sama baik tingkat lokal, regional, dan secara lebih luas kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana. Dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Presiden RI mengarahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas dan media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Komitmen yang sama diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-462-2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2021.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal yang bermakna TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas ***Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media***, dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Sumatera Barat berketetapan untuk memperkuat komitmen nasional menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs Sumatera Barat telah secara optimal melibatkan seluruh platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.5. Pembiayaan TPB/SDGs

Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang berkomitmen menjalankan TPB/SDGs, juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang

bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan.

Kegiatan filantropi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan, yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan atau keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dll, mempunyai potensi yang sangat besar. Selain itu, Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, dan akan semakin berkembang terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*, yang menjadi standar pedoman bagi perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan serta kaitannya dengan TPB/SDGs. Selanjutnya, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pembiayaan inovatif juga dapat dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs, misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian tujuan/goal 9 TPB/SDGs yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan serta konservasi energi yang mendukung pencapaian tujuan/goal 7 yaitu Energi Bersih dan Terbarukan.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu enam bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, pada level nasional dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019 harus ditetapkan.

Perpres merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga, juga bagi pemerintah daerah yang juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN TPB/SDGs pada tingkat nasional dan RAD TPB/SDGs pada tingkat provinsi menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading agency* pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat melibatkan keempat platform TPB/SDGs, yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) **Sosialisasi**, untuk memberikan penjelasan tentang TPB/SDGs dan membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs, sosialisasi ini dihadiri oleh stakeholders terkait.
- 2) **Rapat Tim Koordinasi TPB/SDGs**, rapat ini bertujuan untuk membahas pengisian matriks RAD TPB/SDGs, yang dimulai dengan menyusun Matriks Pemetaan Target dan Indikator TPB/SDGs – RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yang menjadi template bagi daerah Kabupaten/Kota dan *nonstate actor* lainnya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengisian matriks yakni matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah.
- 3) Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (*online*) melalui surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Kondisi Pencapaian Pelaksanaan SDGs

2.1.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana pun

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat telah mengalami penurunan dan capaiannya lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Namun Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan. Sebanyak 12 daerah kabupaten dan kota mempunyai tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan antar rumah tangga miskin dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indikasi ini perlu diatasi dengan melakukan intervensi yang lebih spesifik kepada keluarga miskin.

Selanjutnya ketimpangan pendapatan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan Indeks Gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson selama periode 2010-2015 termasuk kategori rendah. Hal ini merupakan hasil capaian pembangunan yang menggembarakan, namun demikian sampai tahun 2015, Sumatera Barat masih mempunyai tiga daerah kabupaten (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan) berdasarkan kategorisasi Kementerian terkait termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Ketiga daerah kabupaten ini perlu menjadi pusat perhatian semua instansi secara intensif dan sinergi untuk mengatasi ketertinggalannya dan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan lebih cepat.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, BPS), untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2015 adalah Rp.403.947 (kapita/bulan). Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2015 adalah 349.529 jiwa, jumlah ini mengalami penurunan 0,6 % dibandingkan kondisi Maret 2015. Selain itu, lebih dari duapertiga penduduk miskin atau tepatnya 66,10 % penduduk

miskin tinggal di perdesaan, sedangkan sekitar 33,89 % penduduk miskin tinggal di perkotaan, seperti terlihat dalam Tabel 2.1.

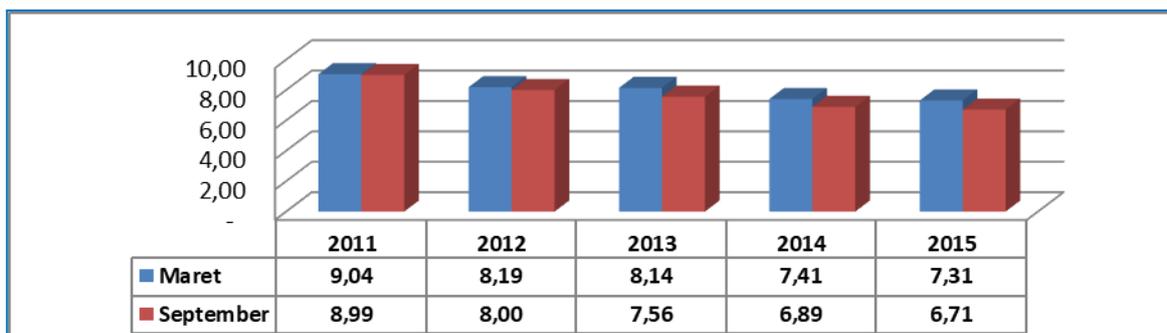
Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2010 – September 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2010	106.181	323.843	430.024	6,84	10,88	9,50
Maret 2011	141.240	303.198	444.438	7,42	10,07	9,04
Sept 2011	145.988	298.782	444.770	7,61	9,85	8,99
Maret 2012	128.817	279.138	407.955	6,67	9,14	8,19
Sept 2012	125.388	276.133	410.521	6,45	8,99	8,00
Maret 2013	120.604	290.518	411.121	6,16	9,39	8,14
Sept 2013	126.024	258.061	384.085	6,38	8,30	7,56
Maret 2014	108.076	271.120	379.196	5,43	8,68	7,41
Sept 2014	108.532	246.206	354.738	5,41	7,84	6,89
Maret 2015	118.034	261.575	379.609	5,73	8,35	7,31
Sept 2015	118.481	231.048	349.529	5,73	7,35	6,71

Sumber Data : Susenas, BPS

Perkembangan penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan pada kondisi Maret yaitu dari 9,04 persen pada Maret 2011 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015, sedangkan jika dibandingkan pada kondisi September yaitu dari 8,99 persen pada September 2011 turun menjadi 6,71 pada September 2015, sebagaimana pada Diagram 2.1.

Grafik 2.1.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret dan September 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dilihat dari perkembangan menurut perdesaan dan perkotaan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami perubahan relative lebih tinggi dari daerah perkotaan. Penduduk miskin daerah perkotaan sama dengan kondisi Maret 2015, yaitu 5,73 persen sedangkan di daerah perdesaan, persentase penduduk miskinnya mengalami penurunan dari 8,35 persen menjadi 7,35 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat menurut daerah lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.2.

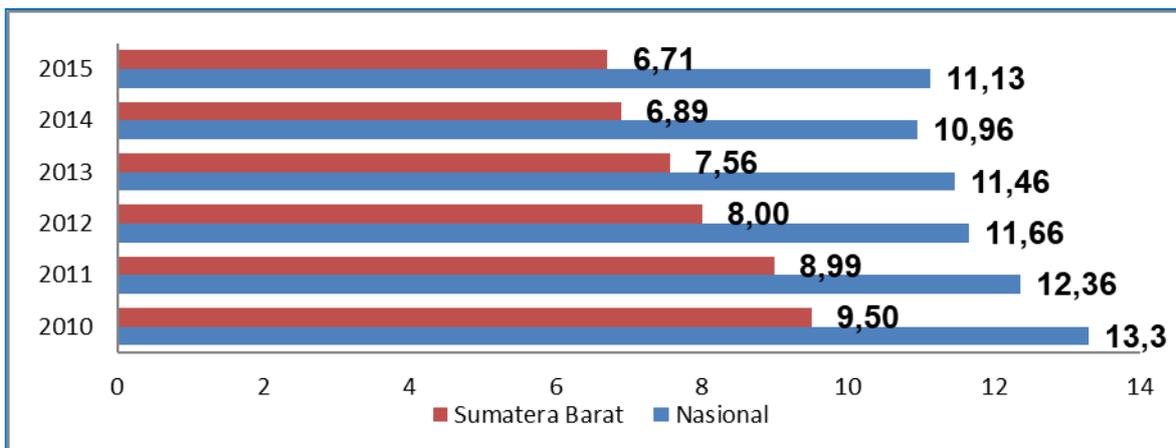
Grafik 2.2.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Kondisi Maret dan September 2011-2015



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2010 sampai 2015, terlihat tingkat kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari pada nasional, seperti Grafik 2.3.

Grafik 2.3.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi September 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2015 adalah Rp.403.947 (kapita/bulan).

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 76,38 persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 80,09 persen

lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 71,18 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2015, seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Maret 2012-September 2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Perkotaan					
Maret 2012	223.796	85.317	309.113	127,81	6,67
Sept 2012	232.153	88.975	321.128	124,25	6,45
Maret 2013	235.317	97.520	332.837	119,53	6,17
Sept 2013	261.644	99.124	360.768	124,89	6,38
Maret 2014	269.473	105.495	374.968	108.076	5,43
Sept 2014	282.276	108.587	390.862	108.532	5,41
Maret 2015	288.410	117.925	406.335	118.034	5,73
Sept 2015	301.356	121.984	423.339	118.480	5,73
Pedesaan					
Maret 2012	207.242	50.733	257.975	276,93	9,14
Sept 2012	219.987	53.668	273.655	273,60	8,99
Maret 2013	231.942	56.272	288.215	287,94	9,39
Sept 2013	257.459	63.792	321.252	255,74	8,30
Maret 2014	268.291	65.220	333.511	271.120	8,68
Sept 2014	279.289	70.535	349.824	246.206	7,84
Maret 2015	293.768	75.985	369.753	261.575	8,33
Sept 2015	313.294	77.884	391.178	231.050	7,35
Kota + Desa					
Maret 2012	213.655	64.129	277.784	404,74	8,18
Sept 2012	224.702	67.350	292.052	397,86	8,00
Maret 2013	233.250	72.252	305.502	407,47	8,14
Sept 2013	259.085	77.521	336.606	380,63	7,56
Maret 2014	268.751	80.904	349.656	379,19	7,41
Sept 2014	280.453	85.374	365.827	354,74	6,89
Maret 2015	291.641	92.637	384.277	379.609	7,31
Sept 2015	308.554	95.393	403.947	349.530	6,71

Pada Tabel 2.2, jika dibandingkan kondisi Maret 2015 dan September 2015, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 4,18 %. Sedangkan di daerah pedesaan meningkat 5,79 %. Jika dilihat menurut komponennya, maka terjadi perbedaan antara perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan garis kemiskinan non makanan mengalami perubahan yang lebih besar daripada garis kemiskinan non makanan, kondisi yang berlawanan terjadi di daerah perkotaan.

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (PI) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan

pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2012	0,942	1,248	1,129
September 2012	1,132	1,300	1,235
Maret 2013	0,999	1,019	1,011
September 2013	1,117	1,363	1,267
Maret 2014	0,654	1,122	0,940
September 2014	0,536	0,888	0,751
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
P2			
Maret 2012	0,213	0,343	0,293
September 2012	0,296	0,322	0,312
Maret 2013	0,238	0,191	0,209
September 2013	0,292	0,313	0,305
Maret 2014	0,125	0,278	0,219
September 2014	0,096	0,181	0,148
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290

Sumber Data :Berita Resmi Statistik

Dari Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari Maret 2015 ke September 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Begitu juga jika dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan maka indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan mengalami peningkatan. Sementara untuk Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Indeks untuk daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan.

Tabel. 2.4
Status Kesejahteraan di Sumatera Barat
Menurut Jumlah Rumah Tangga dan Individu

No	KAB/KOTA	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
	Kabupaten :										
1	Kep. Mentawai	867	1.597	2.275	3.296	8.035	6.209	9.166	10.930	13.348	39.653
2	Pesisir Selatan	8.604	10.117	12.245	7.044	38.010	54.010	50.742	50.148	22.009	176.909
3	Solok	2.290	7.360	11.262	9.134	30.046	14.791	38.919	49.411	31.236	134.357
4	Sijunjung	1.082	2.378	5.170	3.385	12.015	6.469	11.956	20.796	11.100	50.321
5	Tanah Datar	737	3.234	7.864	8.147	19.982	4.550	17.140	34.613	28.034	84.337
6	Padang Pariaman	2.590	6.907	9.974	9.024	28.495	16.053	34.779	41.284	33.766	125.882
7	Agam	1.212	2.918	6.685	10.637	21.452	7.965	15.991	30.467	38.256	92.679
8	Lima Puluh Kota	2.263	6.270	13.246	10.369	32.148	12.827	29.514	46.995	31.650	120.986
9	Pasaman	2.348	4.342	9.969	8.845	25.504	14.684	22.913	43.977	29.566	111.140
10	Solok Selatan	746	2.225	2.696	3.667	9.334	5.172	12.373	12.733	14.222	44.500
11	Dharmasraya	783	1.269	2.724	2.270	7.046	4.402	5.827	10.844	7.507	28.580
12	Pasaman Barat	8.280	8.019	13.176	10.563	40.038	46.786	36.152	46.443	31.816	161.197
	Kota :										
13	Padang	3.776	9.843	18.777	10.708	43.104	22.272	48.831	80.640	44.095	195.838
14	Solok	253	606	940	655	2.454	1.371	2.962	4.301	2.598	11.232
15	Sawahlunto	233	254	522	573	1.582	1.287	1.175	2.004	1.950	6.416
16	Padang Panjang	352	807	543	391	2.093	1.550	3.180	2.121	1.524	8.375
17	Bukittinggi	639	628	1.580	1.034	3.881	3.229	2.869	6.433	4.045	16.576
18	Payakumbuh	623	1.622	3.027	1.159	6.431	3.721	8.082	12.862	4.284	28.949
19	Pariaman	808	809	1.528	1.369	4.514	4.923	4.076	6.675	5.566	21.240
	SUMATERA BARAT	38.486	71.205	124.203	102.270	336.164	232.271	356.647	513.677	356.572	1.459.167

Sumber : Basis data terpadu untuk program perlindungan sosial Tahun 2015

Keterangan:

Desil 1 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 10% terendah di Indonesia

Desil 2 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 11%-20% terendah di Indonesia

Desil 3 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 21%-30% terendah di Indonesia

Desil 4 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan 31%-40% terendah di Indonesia

Dari Tabel 2.4 memperlihatkan status kesejahteraan di Sumatera Barat menurut jumlah rumah tangga individu berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015. Selanjutnya pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015 akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Pengangguran Terbuka

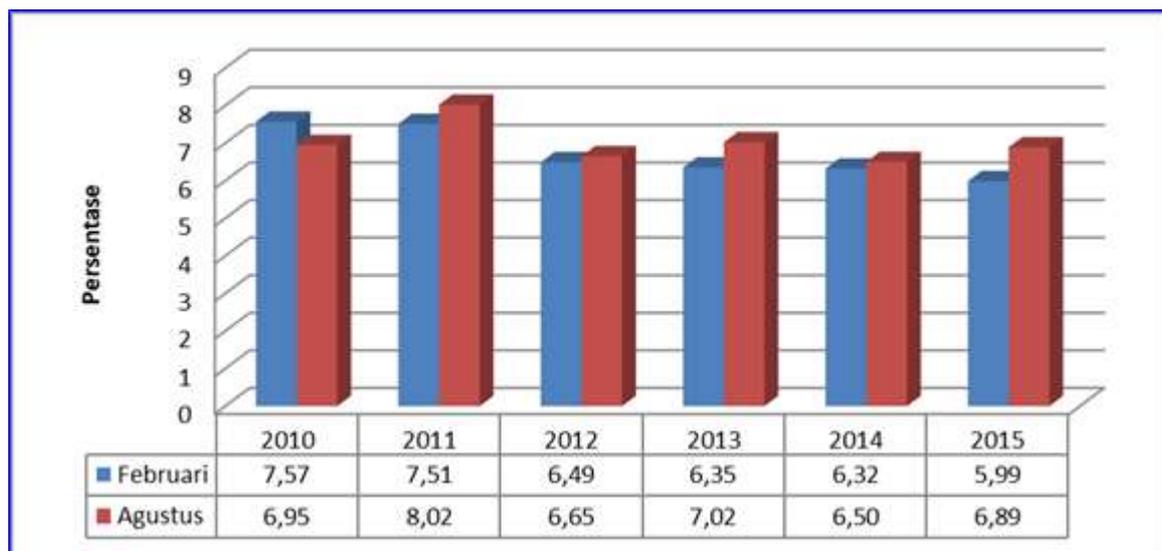
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada Agustus 2015 menunjukkan proses dinamis di pasar tenaga kerja Sumatera Barat, yang digambarkan dengan terjadinya fluktuasi jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan tingkat pengangguran (dihitung dua kali setahun yaitu bulan Februari dan Agustus). Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 sebanyak 2,35 juta orang berkurang sebanyak

134,67 ribu orang dibanding keadaan Februari 2015, namun jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 bertambah sebanyak 14,17 ribu. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 2,18 juta orang berkurang sebesar 6,33% dibanding keadaan Februari 2015, namun jika dibandingkan dengan Agustus 2014, mengalami peningkatan 0,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Agustus 2015 mencapai 6,89%, mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2015 sebesar 5,99% dan TPT Agustus 2014 sebesar 6,50%. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu setahun ini relative stabil dengan sedikit penurunan dari 68,73% di Februari 2015 menjadi 64,56% di Agustus 2015.

Persentase tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7,57% pada Februari 2010 menjadi 5,99% pada Februari 2015, sedangkan kondisi Agustus 2010 sebesar 6,95% turun menjadi 6,89% di September 2015, seperti terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4.
Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Februari dan Agustus 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Kontribusi lulusan Sekolah Menengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat cukup signifikan dibandingkan dengan kualifikasi pendidikan lainnya. Pada tahun 2015, untuk lulusan pendidikan SMA memberikan kontribusi sebesar 12,30%, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan memberikan kontribusi sebesar 13,32%.

Pada tahun 2010-2015, angka kelulusan siswa di Sumatera Barat dari tahun ke tahun memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Angka kelulusan siswa SD/MI pada tahun 2010 sebesar 99,80 % turun menjadi 96,07% tahun 2015, sedangkan SMP/MTs sebesar 94,20% pada tahun 2010 naik menjadi 99,84% pada tahun 2015. Selanjutnya angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 98,77%

pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 99,95%. Jika dibandingkan antara kelulusan SD melanjutkan ke SMP dan kelulusan SMP melanjutkan ke SMA yang paling besar adalah angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,56% sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 95,56%, seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,80	99,53	96,72	97,99	97,99	96,07
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	94,20	95,16	97,56	99,02	99,95	99,84
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	98,77	95,25	99,40	85,39	99,60	99,95
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	97,30	95,28	94,53	99,28	99,56
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,99	88,90	90,81	99,13	98,49	95,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2015 tidak mengalami perubahan, dimana sektor pertanian, perdagangan, sektor industri, konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi jasa kemasyarakatan, serta keuangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Selama setahun terakhir (Agustus 2014 - Agustus 2015) jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada sebagian besar sektor lapangan pekerjaan utamanya, terutama di sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 42,97 ribu orang (10,26%), sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air) sebanyak 8,80 ribu orang (18,56%), dan sektor industri sebanyak 3,41 ribu orang (2,28%). Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan yang mengalami kenaikan jumlah penduduk bekerja pada lapangan pekerjaan tersebut masing-masing sebesar 4,61 persen dan 4,95 persen. Komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Kondisi Agustus 2011 – 2015 di Provinsi Sumatera Barat (ribu orang)

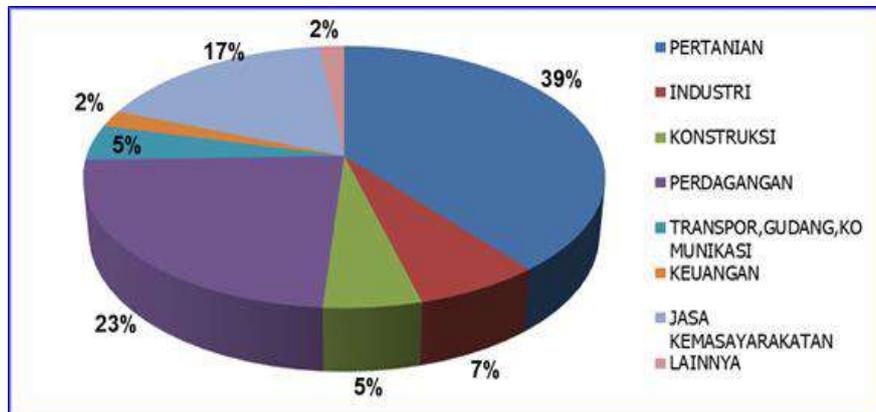
No	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	813,7	827,3	817,9	818,7	856,4
2	Industri	153,1	159,0	132,3	149,5	146,0
3	Perdagangan	441,8	431,8	472,8	487,1	511,1
4	Jasa Kemasyarakatan	347,7	325,9	354,4	419,0	376,0
5	Lainnya*)	314,4	293,6	283,7	306,1	295,1
TOTAL		2.070,7	2.037,6	2.061,1	2.180,3	2.184,6

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Ket : *)Pertambangan dan Penggalan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan.

Selanjutnya persentase penduduk menurut lapangan pekerjaan dapat dilihat pada grafik 2.6.

Grafik 2.5
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Agustus 2015 di Sumatera Barat



Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari 2.184,6 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2015, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 697,14 ribu orang (31,91 persen), diikuti berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap masing-masing sebesar 464,55 ribu orang (21,26 persen) dan 382,43 ribu orang (17,51 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebesar 80,28 ribu orang (3,67 persen).

Dari enam status pekerjaan sesuai Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), secara sederhana dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Pada Agustus 2015 terdapat 777,41 ribu orang atau 35,59 persen pekerja bergerak pada kegiatan ekonomi formal dan sisanya sebesar 1,41 juta orang atau 64,51 persen termasuk kegiatan informal, seperti terlihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (ribu orang)

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Berusaha Sendiri	459,3 (22,18%)	442,4 (21,71%)	475,4 (23,07%)	524,6 (24,06%)	464,5(21,26%)
2	Berusaha Dibnt Buruh tdk Tetap	352,1 (17,00%)	345,1 (16,94%)	364,7 (17,69%)	383,1 (17,57%)	382,4 (17,5%)
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	114,7 (5,54%)	97,8 (4,80%)	96,1 (4,66%)	95,5 (4,38%)	80,2 (3,67%)
4	Buruh/Karyawan	622,6 (30,07%)	629,3 (30,88%)	636,3 (30,87%)	678,4 (31,11%)	697,1 (31,91%)
5	Pekerja Bebas	220,8 (10,66%)	230,5 (11,31%)	198,7 (9,64%)	216,5 (9,93%)	260,2 (11,91%)
6	Pekerja Tak Dibayar	301,2 (14,55%)	292,5 (14,36%)	289,9 (14,07%)	282,1 (12,94%)	299,9 (13,73%)
TOTAL		2.070,7 (100%)	2.037,6 (100%)	2.061,1 (100%)	2.180,3 (100%)	2.184,6 (100%)

Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan pada Agustus 2015 yang tertinggi adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 13,32 persen, Sekolah Menengah Atas 12,30 persen, dan tamatan Diploma sebesar 11,25 persen, secara lengkap terlihat datanya pada Tabel 2.7.

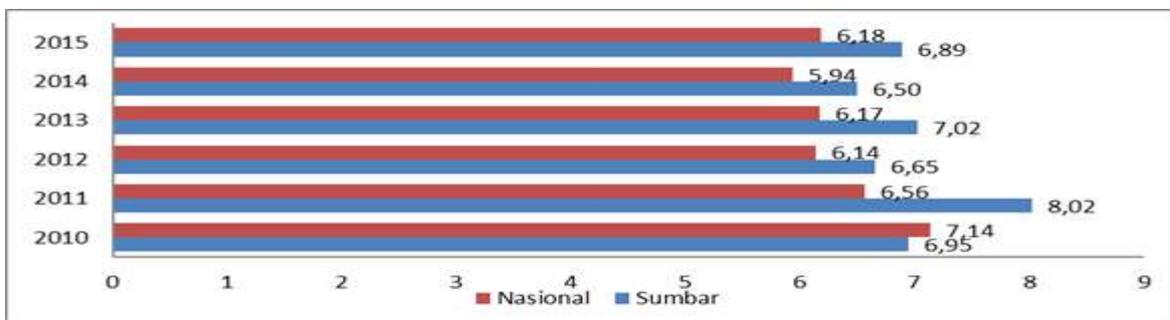
Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2011-Agustus 2015 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	AGUSTUS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD ke Bawah	3,34	3,87	3,85	3,90	2,98
2	Sekolah Menengah Pertama	7,12	6,42	6,13	6,19	3,80
3	Sekolah Menengah Atas	10,98	10,58	11,23	9,22	12,30
4	Sekolah Menengah Kejuruan	9,59	9,54	13,00	11,15	13,32
5	Diploma I/II/III	4,09	5,15	6,98	5,79	11,25
6	Sarjana (S1, S2, S3)	7,75	8,07	8,30	8,46	8,23
JUMLAH		6,45	6,52	7,02	6,50	6,89

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.66/11/13/Th.XVIII, Tanggal 05 November 2015

Jika dibandingkan tingkat pengangguran di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2010 sampai 2015, terlihat tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih tinggi sedikit daripada nasional, seperti grafik dibawah ini.

Grafik 2.6
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat Dengan Nasional Kondisi Agustus 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Angka partisipasi angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, secara umum memperlihatkan persentase yang menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2015, sedangkan indikator Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun semakin meningkat dari 0,29% menjadi 1,49%.

Pencari kerja yang ditempatkan memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan, namun pada tahun 2015 menunjukkan persentase yang meningkat dari 13,88% pada tahun 2010 menjadi menjadi 19,12%. Tingkat pengangguran terbuka, juga memperlihatkan trend yang semakin menurun. Sedangkan Keselamatan dan perlindungan kerja secara umum meningkat dari tahun 2010

sebesar 11,03% menjadi 14.46 % pada tahun 2015. Sedangkan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Barat sejak tahun 2010-2015 tidak pernah terjadi, seperti terlihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	66,36	66,19	64,47	62,92	65,19	64,56
2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	0,29	0,25	0,31	0,36	0,47	1,49
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,36	66,19	64,47	62,92	65,19	64,56
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	13,88	6,58	10,97	7,90	14,28	19,12
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,95	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89
6	Keselamatan dan perlindungan kerja	%	11,03	11,74	14,40	14,75	13,75	14,46
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0
		Unit	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui dengan menelusuri terlebih dahulu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan, yakni Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada Grafik 2.7. berikut ini.

Grafik 2.7
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Ketimpangan wilayah diukur berdasarkan Indeks Williamson yang dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai indeks williamson $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamson antara $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi dengan indeks williamson $>0,7$. Sumatera Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan indeks selama lima tahun terakhir berada pada kisaran $0,45 - 0,35$ yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya atau ketimpangannya semakin berkurang. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat prioritas penanganannya untuk bisa lepas dari ketertinggalan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Karakteristik Kabupaten Tertinggal di Sumatera Barat

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	JML KEC.	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS	JML PENDDK 2015
1	Kep. Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kep. Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 98, 4 buah pulau besar (Sibeurt, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (sibaru-baru dan sinyanyau)	10	43	00° 55' – 03° 21' LS 98° 35' – 100° 32' BT	85.300
2	Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kerinci Prov. Jambi, Kabupaten ini termasuk daerah tertinggal provinsi Sumatera Barat, yang memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter d pl, dengan yang 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong	7	34	01° 17' 13" – 01° 46' 45" LS 100° 53' 24" – 101° 26' 27" BT	159.800

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	JML KEC.	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS	JML PENDDK 2015
			sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok Selatan masih merupakan daerah tertinggal.				
3	Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di Utara Prov. Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Prov. Sumut yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan Antara Madina Prov. Sumut dengan Padang prov. Sumbar, topografi Pasaman dengan ketinggian antara 0-2.912 m (G. Malintang, G. Talamau). Kabupaten Pasaman Barat masih merupakan daerah tertinggal.	11	19	0° 33' LU – 0° 11' LS 99° 10' – 100° 04' BT	410.300

Sumber RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Secara umum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Kemiskinan;
- 2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, selama kurun waktu lima tahun terakhir telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam hal pemberdayaan keluarga miskin, termasuk perempuan

rawan sosial ekonomi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), telah mendapatkan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha. Diantara keluarga miskin di lingkungan kumuh perkotaan telah mendapatkan bantuan bahan bangunan rumah dan peralatan guna perbaikan rumah. Penanganan anak terlantar termasuk anak jalanan juga telah diupayakan melalui upaya pemberdayaan melalui pelayanan pemberdayaan sosial. Pelayanan rehabilitasi juga telah diberikan bagi penyandang cacat, anak nakal dan korban penyalahgunaan narkoba, wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana serta para lanjut usia. Kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Sumatera Barat Tahun 2015

No	KAB/KOTA	Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia Terlantar	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Alam
	Kabupaten :						
1	Kepulauan Mentawai	59	354	280	1,184	10,303	9,351
2	Pesisir Selatan	1,357	3,531	1,276	3,118	26,367	-
3	Solok	463	1,480	654	1,885	5,576	1,033
4	Sijunjung	9,266	1,207	727	3,206	10,104	42
5	Tanah Datar	154	1,448	1,300	3,625	18,634	84
6	Padang Pariaman	373	4,923	1,176	3,643	33,944	374
7	Agam	626	1,354	2,000	3,275	839	62
8	Lima Puluh Kota	443	1,787	2,170	2,272	27,444	13
9	Pasaman	361	1,131	1,145	3,714	20,193	2,250
10	Solok Selatan	114	1,319	438	1,472	20,825	2,022
11	Dharmasraya	245	502	457	491	2,240	-
12	Pasaman Barat	478	829	871	2,438	13,966	262
	Kota :						
13	Padang	834	95	1,865	1,303	240,849	78
14	Solok	672	158	304	532	2,496	-
15	Sawahlunto	36	462	491	506	19,057	75
16	Padang Panjang	24	326	191	351	99	-
17	Bukittinggi	114	2,508	1,740	1,278	10,911	-
18	Payakumbuh	100	454	280	228	1,853	19
19	Pariaman	237	755	459	444	3,662	34
	Jumlah	15,956	24,623	17,824	34,965	469,362	15,699

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumbar

2.1.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Pangan

Berbagai indikator terkait urusan pangan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12 menggambarkan perkembangan yang cukup baik, hal ini didukung oleh adanya regulasi ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2010 yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal di Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2013 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 dan pada tahun 2015 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan. Perkembangan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir, seperti pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan Indikator Pangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA BERAS								
1	Menurut Produksi	Ton	1,146,787	1,170,732	1,389,956	1,395,819	1,384,570	1,433,975
2	Ketersediaan Beras	Kg/kap/th	234	239	280	275	270	276
3	Konsumsi Beras	Kg/kap/th	109,56	112,65	108,08	105,16	107,70	105,07
4	Kebutuhan Beras	Ton	531,027	552,487	535,813	532,775	552,706	549,248
5	Surplus Beras	Ton	615,760	618,245	854,143	863,044	831,864	884,727
6	Ketersediaan Energi Beras	Kkal/kap/hr	2,331	2,374	2,773	2,734	2,677	2,738
7	Total Energi Ideal kelompok bahan makanan sesuai PPH Ketersediaan	%	2,200	2,200	2,200	2,400	2,400	2,400
8	Persentase Angka Kecukupan Energi beras pada tingkat ketersediaan	%	202,20	194,00	221,60	241,60	147,20	158,30

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Ketersediaan pangan terutama beras di Sumatera Barat, sudah melebihi dari kebutuhan dan setiap tahun terjadi surplus beras yang selama ini dimanfaatkan kebutuhan provinsi tetangga.

Gizi Balita

Indikator kinerja kesejahteraan sosial dari aspek kesehatan dilihat dari penurunan angka kematian bayi, peningkatan angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk. Untuk lebih jelasnya perkembangan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	28	28	27	27	27	27
Usia harapan hidup	67.59	67.79	68	68.21	68.32	68,66
Persentase balita gizi buruk	8.2	8.2	6.5	4.3	5.9	4.8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Gizi buruk masih merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kekurangan pada balita. Berdasarkan data yang ada perkembangan angka prevalensi balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010 – 2015 sudah mencapai prevalensi dibawah 5 %.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk membawa ke posyandu untuk penimbangan serta gencarnya penyuluhan gizi ditengah masyarakat serta adanya peran serta PKK yang semakin tinggi. Selain itu, setiap anak balita keluarga miskin diberikan makan pendamping (MP) ASI yaitu bubur susu bagi anak berumur 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak berumur 12 - 24 bulan selama 90 Hari Makan Anak (HMA).

Pertanian Berkelanjutan

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat

provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Kawasan pertanian, potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2015 seluas 2.830.235 Ha. Dari potensi tersebut 70,34% dimanfaatkan dan sisanya 29,66% belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2013 tentang Master Plan Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013-2025 yang menetapkan wilayah pengembangan ekonomi menjadi tiga koridor, yaitu:

- 1) **Koridor Gerbang Timur:** Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota merupakan pusat produksi industri, perdagangan, pariwisata alam dan peternakan.
- 2) **Koridor Lintas Sumatera:** Padang, Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan industri agro.
- 3) **Koridor Pantai Barat:** Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro dan pariwisata bahari.

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Luas lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2015 tercatat seluas 230.665 hektar, yang terdiri dari lahan sawah irigasi 185.147 hektar dan sawah tadah hujan 43.895 hektar, yang tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas

Sumatera Barat dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat rentang tahun 2010 – 2015 terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

KOMODITI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi						
Padi (Ton)	2.211.248	2.279.602	2.368.390	2.430.384	2.519.020	2.550.609
Palawija (Ton)						
1. Jagung	354.261	471.849	495.497	547.437	605.352	602.549
2. Kedelai	1.834	1.925	1.106	732	911	353
3. Kacang Hijau	1.134	1.121	1.074	753	559	419
4. Kacang Tanah	9.162	11.908	9.597	9.093	7.410	5.964
5. Ubi kayu	193.188	191.946	213.647	218.830	219.277	208.386
6. Ubi jalar	104.302	98.120	124.881	134.453	159.865	160.922
Sayur-sayuran (Ton)	389.147	419.438	498.286	574.019	531.133	608.579
Buah-Buahan (Ton)	377.032	443.539	481.897	468.061	492.577	523.207
Tanaman Hias (Tangkai/Kg)	1.000.856	965.574	694.838	582.305	779.165	719.742
Tanaman Biofarmaka (Kg)	8.498.400	6.973.417	7.414.098	9.508.247	10.160.753	11.670.135
Produktifitas						
Padi (Kw/Ha)	48,02	49,37	49,71	49,82	50,06	50,25
Palawija (Kw/Ha)	83,97	85,20	89,91	92,14	89,53	95,02
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	98,33	94,72	130,08	125,98	115,36	133,19
Buah-Buahan (Kw/Ha)	24,20	25,67	26,78	26,53	28,01	28,99
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M2)	7,21	7,59	8,60	4,16	6,59	12,03
Tanaman Biofarmaka (Kg/M2)	2,83	3,19	3,27	3,65	3,31	3,21

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.14 terlihat bahwa produksi utama tanaman pangan dan hortikultura pada umumnya setiap tahun mengalami peningkatan seperti padi, pada tahun 2010 sebesar 2.211.248 ton menjadi 2.550.609 ton pada tahun 2015, produksi jagung dari 354.261 ton pada tahun 2010 menjadi 602.549 pada tahun 2015, ubi kayu dari 193.188 ton pada tahun 2010 menjadi 208.386 ton pada tahun 2015, dan ubi jalar dari 104.302 ton pada tahun 2010 menjadi 160.922 ton pada tahun 2015, dan Sementara, untuk produksi sayur-sayuran meningkat dari 389.147 ton pada tahun 2010 menjadi 608.579 ton pada tahun 2015.

Namun, selain terdapat peningkatan pada ketiga produksi palawija di atas, beberapa jenis palawija produksinya mengalami penurunan. Jenis palawija yang produksinya menurun selama rentang waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kedelai, dari 1.834 ton pada tahun 2010 menjadi 353 ton pada tahun 2015.
2. Kacang Hijau, dari 1.134 ton pada tahun 2010 menjadi 419 ton pada tahun 2015.
3. Kacang Tanah, dari 9.162 ton pada tahun 2010 menjadi 5.964 ton pada tahun 2015.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 diiringi dengan peningkatan produktifitas komoditi seperti padi pada tahun 2010 produktifitasnya sebesar 48,02 kuintal per hektar menjadi 50,25 kuintal per hektar pada tahun 2015, palawija dari 83,97 kuintal per hektar menjadi 95,02 kuintal per hektar pada tahun 2015.

2.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Kesehatan

Indikator kinerja kesejahteraan sosial dari aspek kesehatan dilihat dari penurunan angka kematian bayi, peningkatan angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk. Untuk lebih jelasnya perkembangan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Bidang Kesehatan
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	28	28	27	27	27	27
Usia harapan hidup	67.59	67.79	68	68.21	68.32	68,66
Persentase balita gizi buruk	8.2	8.2	6.5	4.3	5.9	4.8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami penurunan dari 28 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2010 menjadi 27 per 1.000 KH pada tahun 2015 namun penurunannya belum signifikan. Kinerja ini perlu terus dilanjutkan dan ke depan pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk menekan kematian bayi yang lebih rendah.

Selanjutnya, Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator makro yang cukup penting dalam pembangunan sosial budaya dan sumber daya manusia. Secara rata-rata angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 memang masih berada dibawah angka harapan hidup rerata Indonesia tahun 2015 sebesar 70,59 tahun dan Sumatera Barat sebesar 68,66 tahun. Usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat, agar sebagian besar permasalahan kesehatan masyarakat dapat diatasi. Sejalan dengan upaya pemerintah Sumatera Barat melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, maka hal tersebut telah diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Beberapa pelayanan

kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah adanya posyandu, penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis.

Urusan kesehatan memperlihatkan perkembangannya sejak tahun 2010-2015 dengan indikator antara lain rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, serta beberapa indikator cakupan layanan kesehatan seperti terlihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Perkembangan Indikator Rasio Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 71	1 : 71	1 : 71	1 : 72	1 : 73	1 : 74
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:19.467	1:19.421	1:19.231	1:19.411	1:19.587	1:19.628
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:124.752	1:120.320	1:117.852	1:73.313	1:72.280	1:73.187
4	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.592	1:4.928	1:4.821	1:4.119	1:4.582	1:4.348
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:2.818	1:2.838	1:2.510	1:2.118	1:2.790	1:2.759

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

- **Posyandu**

Posyandu terus mengalami peningkatan dari sebanyak 6.999 unit tahun 2010 menjadi 7.414 unit pada tahun 2015. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat berjalan dengan baik. Namun rasio posyandu per satuan balita sedikit mengalami penurunan dari sebesar 1 : 71 pada tahun 2010 menjadi 1 : 74 pada tahun 2015, artinya pada tahun 2015 terdapat 1 unit posyandu melayani 75 orang balita.

Keberadaan dan penyelenggaraan posyandu ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu serta meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana.

- **Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu.**

Puskesmas merupakan pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Peran Puskesmas sangat penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat umum (*public goods*). Puskesmas juga merupakan organisasi kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat untuk membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Rasio pelayanan Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat sudah mencukupi standart pelayanan Puskesmas dengan rasio 1:30.000. Puskesmas yang ditunjang oleh puskesmas pembantu merupakan lembaga layanan masyarakat yang sangat dekat dengan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan lembaga layanan ini cukup mudah dijangkau. Oleh karena itu keberadaan lembaga layanan kesehatan Puskesmas, Poliklinik dan Pukesmas Pembantu menjadi sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

- **Rumah Sakit**

Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), maka terjadi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kelas bawah oleh pemerintah, khususnya pada rumah sakit.

Pelayanan kesehatan tingkat tersier di Provinsi Sumatera Barat terus terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh satu Rumah sakit. Pada tahun 2010 rasio rumah sakit di Sumatera Barat per satuan penduduk sebesar 1 : 124.752 yang artinya satu rumah sakit melayani 124.752 orang, kemudian pada tahun 2015 rasio menunjukkan meningkat menjadi 1 : 73.187. Hal ini menunjukkan dalam lima tahun terakhir telah terjadi penambahan rumah sakit baik swasta maupun pemerintah, sehingga akses pelayanan pada masyarakat juga semakin meningkat. Rasio tersebut telah memenuhi indikator WHO, satu tempat tidur di rumah sakit untuk 100 ribu penduduk.

- **Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Sumber daya manusia kesehatan yang digambarkan dari rasio tenaga kesehatan per 100.000 ribu penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih kekurangan tenaga seperti; dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan sanitarian, terutama untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada daerah terpencil dan sangat terpencil.

Dalam pembangunan kesehatan, sumberdaya manusia merupakan salah faktor penting yang perlu mendapat perhatian terutama terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan sumberdaya manusia kesehatan. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu sumberdaya kesehatan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan dan peningkatan uji kompetensi.

Dokter umum terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, berdasarkan rasio dokter per satuan penduduk tahun 2010 didapatkan angka 1:6.592 bila dikonversikan dengan rasio dokter adalah 15 per 100.000 penduduk, sedangkan target indikator Indonesia sehat adalah rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, maka Provinsi Sumatera Barat belum mampu memenuhi mencapai target tersebut.

Untuk lebih lengkapnya konversi rasio dokter per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Perkembangan Indikator Rasio dokter per satuan penduduk
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:6.592	1:4.928	1:4.821	1:4.119	1:4.582	1:4.348
2.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	15	20	21	24	22	23
3.	Dokter Umum	738	1.001	1.037	1.230	1.120	1.195
4.	Jumlah penduduk	4.865.331	4.933.112	5.000.184	5.066.476	5.131.882	5.196.300

Sumber: Data diolah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar; BPS Provinsi Sumbar

Pada kondisi tersebut, artinya Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dokter hampir dua kali lipat dari jumlah dokter saat ini, karena jumlah dokter yang ada baru sebanyak 1.195 dokter umum, sedangkan jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebanyak 5.196.300 penduduk, maka kebutuhan dokter seharusnya adalah 2.079 orang.

Dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional, maka Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan sekitar 1.338 orang dokter umum, untuk itu perlu dilakukan pengangkatan tenaga dokter secara bertahap untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada lima tahun ke depan.

Selanjutnya sumberdaya manusia bidang kesehatan yang lain, selain dokter adalah tenaga medik seperti perawat dan bidan. Keberadaan perawat dan bidan menjadi sangat penting untuk kondisi penduduk Provinsi Sumatera Barat, khususnya untuk perawatan ibu dan balita. Berdasarkan Indikator Indonesia bahwa rasio perawat adalah 117 per 100.000 penduduk dan rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Untuk lebih lengkapnya konversi rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Perkembangan Indikator Rasio tenaga medis per satuan penduduk
di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:2.818	1:2.838	1:2.510	1:2.118	1:2.790	1:2.759
2.	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	35	35	40	47	36	36
3.	Rasio perawat per 100.000 penduduk	4.806	4.030	4.030	4.395	4.545	4.967
4.	Rasio bidan per 100.000 penduduk	3.706	3.556	3.556	3.556	3.838	4.980

Sumber: data diolah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar 2015

Dalam lima tahun terakhir dari rasio yang diperlihatkan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan yang berarti dari rasio tenaga medis persatuan penduduk.

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk belum disertai dengan peningkatan jumlah tenaga medis. Jumlah tenaga medis tidak mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga tidak mencukupi sesuai standar yang ditetapkan. Pada kondisi tersebut, artinya Provinsi Sumatera Barat membutuhkan tenaga medis hampir tiga kali lipat dari jumlah tenaga medis saat ini. Jumlah tenaga medis saat ini adalah sebanyak 9.947 tenaga medis. Dengan jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 5.196.300 penduduk, maka dibutuhkan tenaga medis sebanyak 5.389 orang.

Rasio bidan dan perawat berimplikasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, sehingga hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional, maka perlu ditingkatkan rasio bidan dan perawat per 100.000 penduduk untuk lima tahun ke depan.

- **Cakupan Kesehatan Sumatera Barat**

Selanjutnya, pelayanan urusan kesehatan lainnya seperti halnya indikator : cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Cakupan Kesehatan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

NO	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	68,10	70,00	82,00	71,50	74,74	75,73
2	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	90,80	85,80	88,25	89,00	90,02	90,00
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %	97,00	86,60	91,00	71,20	77,40	85,00
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) (%)	55,23	59,55	58,94	60,97	63,97	65,45
6	Cakupan penemuan kasus baru TB (CNR) (%)	125,15	135,65	137,41	135,48	144,27	144,74
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan kunjungan bayi	95,33	83,60	88,41	88,15	93,43	93,45
10	Cakupan puskesmas visitrate	142,05	144,32	147,73	145,81	146,37	147,49
11	Cakupan puskesmas pembantu	635,7	692,0	725,6	719,8	734,9	734,9

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

- **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Selama periode 2010-2015 terlihat cakupan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terlihat fluktuatif dari tahun 2010 sebesar 90,80%, kemudian turun di tahun 2011 sebesar 85,80% dan akhirnya meningkat kembali secara bertahap sampai di tahun 2015 sebesar 90,00%.

Berbagai capaian indikator kinerja tersebut di atas, telah memperlihatkan semakin baiknya kualitas persalinan terhadap bayi dan pelayanan ibu melahirkan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Harapan ke depan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan bisa mencapai 100% dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut bidan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu tenaga bidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidan harus memiliki kompetensi minimal sesuai dengan standar praktek kebidanan. Pada saat ini kendala yang dihadapi adalah kompetensi bidan belum sesuai standar karena berkembangnya lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas beragam serta belum terlaksananya sistim akreditasi pendidikan kesehatan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi minimal sesuai standar maka pada setiap tenaga perlu dilakukan uji kompetensi terhadap tenaga bidan secara berkala, sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.900/Menkes/SK/VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Uji Kompetensi Bidan ini dilaksanakan oleh Tim penguji kompetensi yaitu kologium kebidanan pusat/daerah, organisasi profesi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, lembaga pendidikan.

- **Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani**

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani dalam periode 2010-2015 telah juga memperlihatkan gambaran peningkatan pada tahun ketiga sampai 82%, dan kemudian menurun menjadi 71.50% tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 75%.

Hal ini disebabkan antara lain, karena belum optimalnya proses penyediaan, penempatan, pendistribusian, mutu dan kinerja sumber daya kesehatan. Meskipun secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Sumatera Barat, namun ketersediaan jumlah tenaga

kesehatan tersebut belum dapat memenuhi dan memadai dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

Berbagai capaian indikator kinerja tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam upaya memperbaiki kualitas persalinan terhadap bayi dan ibu melahirkan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan bayi dan ibu melahirkan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

- **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

UCI (Universal Child immunization) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0.11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 Dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis IT. Kualitas kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui indikator seperti Jumlah Desa/Jorong/Kelurahan Cakupan Imunisasi (Desa Universal Child Immunization).

Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan dengan adanya stigma Imunisasi Haram yang beredar dalam media sosial dan meluas sampai ke masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan angka cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2010 sudah sangat baik dengan cakupan sebesar 97,00% dan selanjutnya mengalami penurunan tahun 2011 menjadi 86,60%, naik kembali tahun 2012 menjadi 91,00% dan tahun 2013 menurun tajam menjadi 71,20%, pada tahun 2014 sudah diupayakan tindakan penyuluhan dapat meningkat menjadi 77,40% dan pada tahun 2015 dapat menjadi 85,00%.

Dampak dari penurunan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini mengakibatkan beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami wabah Diptheri dan Campak. Upaya pemerintah Sumatera Barat sudah berusaha membatasi perluasan wabah ini. Diharapkan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization akan semakin meningkat pada periode tahun 2016-2021

- **Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan**

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai angka 100%, hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan dan telah mendapatkan perawatan seluruhnya. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah baik. Upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

- **Cakupan penelusuran kasus baru TB BTA positif (CDR) dan penemuan kasus baru TB (CNR)**

Penanggulangan Tuberkulosis sudah mengalami peningkatan, cakupan penelusuran kasus baru TB BTA positif (CDR) pada tahun 2010 sebesar 55,23% dan meningkat secara bertahap pada tahun 2015 menjadi 65,45%. Begitu juga untuk penemuan kasus baru TB (CNR) telah mengalami peningkatan selama periode 2010-2015 dari 125,15 pada tahun 2010 meningkat secara bertahap menjadi 144,74 pada tahun 2015. Namun upaya ini masih perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan pengendaliannya untuk masa yang akan datang.

Terkait dengan penyakit menular Provinsi Sumatera Barat memiliki kendala yaitu rendahnya penemuan cakupan penderita tuberkulosis (TBC) target MDGs tahun 2015 sebesar 90 %. Dan penemuan kasus baru TB diharapkan diatas 200 orang per 100.000 penduduk. Kondisi ini, disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak (Sputum). Upaya menghilangkan stigma menjadi prioritas dalam penanggulangan TB. Disamping itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberkulosis dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan obat antituberculosis (OAT) ditingkat pelayanan primer harus diperhatikan.

- **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD setiap tahunnya seluruhnya sudah 100%. Namun demikian angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih tinggi dilihat dari Incident Rate 59,48%, walaupun demikian angka kematian akibat DBD relatif kecil.

Menurunnya angka kematian akibat DBD ini, menunjukkan bahwa penanganan penderita DBD sudah relatif baik. Namun demikian, pembinaan terhadap masyarakat agar dapat terhindar dari penyakit DBD penting untuk ditingkatkan, selain peningkatan pelayanan kesehatan kepada penderitanya.

Untuk itu perlu perhatian pada upaya perubahan perilaku masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui penyuluhan dan promosi kesehatan serta penyelenggaraan *system surveilans* dan kewaspadaan dini.

- **Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat dimana selama periode 2010-2015 sudah dicakup sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian target cakupan layanan kesehatan menyeluruh pada tahun 2019 maka Pemerintah Sumatera Barat perlu melakukan upaya penjaminan terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Kartu

Indonesia Sehat menjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah.

Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 66,20%. Selanjutnya jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Askeskin/Jamkesmas adalah sebesar 1.533.170. Namun demikian jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas masih terbatas dan dianggap belum tepat sasaran. Peningkatan jumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas dengan pengembangan peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta penerima upah, dan bukan penerima upah, serta integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional

- **Cakupan kunjungan bayi**

Cakupan kunjungan bayi di Sumatera Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tercatat sangat baik yaitu 95,33%, tahun 2011 menurun menjadi 83,60%, selanjutnya meningkat secara bertahap dan pada tahun 2015 menjadi 93,45%. Harapannya ke depan Cakupan kunjungan bayi bisa mencapai 100% dalam rangka penurunan angka kematian bayi.

- **Cakupan Puskesmas *Visit Rate***

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu dan dan keluarga juga dapat ditunjukkan dengan peningkatan cakupan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas (*Visite Rate*). Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian, selama 5 tahun terakhir dimana angka cakupan mencapai 142,05 pada tahun 2010 dan meningkat secara bertahap mencapai 147,49 pada tahun 2015.

- **Cakupan puskesmas pembantu**

Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas pembantu dihitung dengan cara menjumlahkan puskesmas pembantu yang terdapat di setiap kecamatan dibagi dengan jumlah kecamatan di kabupaten setiap tahunnya. Cakupan puskesmas pembantu di daerah Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami trend yang meningkat.

Kesejahteraan Sosial

Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau, dikenal pula sebagai penganut ajaran agama Islam serta memiliki adat dan tradisi daerah yang berfalsafah Adat Basandi

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Seiring dengan terjadinya perkembangan kemajuan teknologi dan informasi serta derasnya pengaruh globalisasi dan penetrasi budaya asing menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran penerapan dan pengamalan nilai-nilai adat dan agama di tengah kehidupan masyarakat.

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama terus dilakukan yang terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mengindikasikan terjadinya kegairahan kehidupan beragama ditengah masyarakat. Namun, masih ditemui tingkah dan perilaku sosial yang menyimpang, antara lain ditandai dengan masih adanya tindakan kriminalitas, kasus-kasus perbuatan asusila serta kasus korupsi.

Salah satu permasalahan kasus perbuatan maksiat yang terjadi dari tahun ke tahun diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. Dari data akumulasi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat, pada tahun 2013 sebanyak 1.199 orang yang ditahan karena kasus narkoba dan turun sedikit di tahun 2014 sebanyak 1.101 kasus.

Pada tahun 2015, penerimaan zakat dari PNS Provinsi dan masyarakat sebesar Rp.7,4 milyar dan telah disalurkan kepada mustahik sebesar Rp.6,5 milyar. Implementasi keshalehan sosial, belum dapat terwujud secara maksimal yang ditandai dengan masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan peranan lembaga sosial agama (Baznas, PKPU, dll) untuk pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti zakat, waqaf, infak dan sadaqah. Lembaga agama yang mengelola zakat, infaq, dan wakaf sesungguhnya mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan bila didukung oleh masyarakat yang mempunyai sifat dan pengamalan nilai kesalehan sosial.

Pada tataran kerukunan umat beragama, sampai dengan kondisi tahun 2015 Sumatera Barat termasuk daerah yang jarang terjadi konflik antar maupun intra umat beragama. Namun kondisi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lengah dan hilang kewaspadaan. Sumatera Barat memiliki penduduk yang beragam dari sisi agama atau kepercayaan. Di samping itu, masing-masing agama juga memiliki keragaman pemahaman yang dapat melahirkan aliran, sekte, atau kelompok. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik berpotensi melahirkan ketegangan, gesekan, dan konflik apalagi jika ada faktor pemicunya. Hal ini menghendaki adanya upaya terencana dan berkesinambungan untuk menjaga harmonisasi dalam menjalankan kehidupan umat beragama.

Selanjutnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan dengan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.1.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Pendidikan

• Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2010-2015 di Sumatera Barat antara lain dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata.

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan pendidikan dasar di Sumatera Barat tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20
Perkembangan Pendidikan Dasar di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah	98,24	98,10	98,38	98,81	98,99	99,18
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 0,83	1 : 0,74	1 : 0,66	1 : 0,68	1 : 0,67	1 : 0,67
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 6,84	1 : 8,82	1 : 8,87	1 : 7,84	1 : 7,83	1 : 6,91
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 1,86	1 : 1,77	1 : 2,23	1 : 2,17	1 : 3,78	1 : 4,55

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 2.20 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan setiap tahun dari 98,24 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi 99,18 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah murid sekolah dasar mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk Sumatera Barat, sesuai dengan program wajib belajar pemerintah 9 tahun. Sementara dari perbandingan guru terhadap murid dan murid per kelas rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak ada permasalahan, namun yang perlu diperhatikan dari sisi pendistribusian guru antar sekolah, antar daerah dan antar wilayah.

- **Pendidikan Menengah**

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan di usia anak 16 – 19 tahun, yang diukur dengan indikator yang sama dengan pendidikan dasar yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, seperti di lihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkembangan Pendidikan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Sekolah	89,51	89,64	90,79	92,22	99,27	99,28
2	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1 : 0,37	1 : 0,29	1 : 0,25	1 : 0,39	1 : 0,25	1 : 0,27
3	Rasio Guru Terhadap Murid	1 : 8,10	1 : 6,28	1 : 6,58	1 : 8,75	1 : 11,85	1 : 8,30
4	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	1 : 13,92	1 : 13,98	1 : 11,32	1 : 11,38	1 : 11,56	1 : 11,84

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah juga mengalami peningkatan setiap tahun dari 89,51 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi 99,28 per 1.000 jumlah penduduk pada tahun 2015, Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah murid menempuh pendidikan menengah mengalami peningkatan per 1.000 jumlah penduduk.

Indikator lainnya yakni Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata, juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2015, menunjukkan gambaran bahwa 1 guru tingkat pendidikan menengah melayani sebanyak 11,84 murid atau dibulatkan 12 murid, artinya bahwa guru yang mengajar di kelas tidak kekurangan malahan berlebih, namun kondisi yang terjadi pada pendistribusian guru di pendidikan menengah juga belum merata.

Penduduk yang berusia 15-64 tahun melek huruf mengalami peningkatan. Indikator ini dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Berdasarkan data tahun 2010 angka melek huruf di Sumatera Barat sebesar 98,13%, dan tahun 2014 sebesar 98,44%, artinya angka melek huruf meningkat sebesar 0,31% pada kurun waktu lima tahun terakhir.

- **Fasilitas Pendidikan**

Selanjutnya pada indikator fasilitas pendidikan terdiri dari sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2010 sebesar 55,70 %, dan tahun 2014 meningkat menjadi 69,78% atau meningkat sebesar 14,08%. Berbeda halnya dengan pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Data memperlihatkan bahwa kondisi bangunan baik tahun 2010 sebesar 90,58% dan tahun 2014 sebesar 85,38%, atau menurun 5,02%. Data ini mengisyaratkan untuk kondisi bangunan sekolah pada

tingkat pendidikan menengah memerlukan perhatian untuk dilakukan perbaikan/rehabilitasi, karena sudah banyak gedung-gedung sekolah yang rusak.

- **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan lima perkembangan, yaitu : kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Angka Partisipasi Kasar PAUD dan TK di Sumatera Barat pada tahun 2010 -2015 memperlihatkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2011 sebesar 34,56% menjadi 67,27% pada tahun 2015. Kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan APK PAUD dan TK tertinggi adalah Kota Sawahlunto sebesar 96,53%, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi sebesar 95,41% dan 92,97%.

Satuan pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 di Sumatera Barat dengan jumlah lembaga PAUD sebanyak 3.332 unit, dengan murid sebanyak 73.927 orang murid dan guru sebanyak 14.752 orang. Sedangkan jumlah taman kanak-kanak sebanyak 2.292 sekolah dengan 4.803 jumlah lokal, 133.694 orang murid dan guru sebanyak 20.647 orang.

- **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah (APS), pada tingkat SD/MI, mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010 sebesar 0,18% dan tahun 2015 sebesar 0,22%, berbeda halnya dengan APS tingkat pendidikan SMP/MTs, mengalami penurunan dari 0,79% tahun 2010 menjadi 0,46% tahun 2015, dan APS tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, juga menurun dari angka 1,97% tahun 2010 menjadi 0,95% tahun 2015. Seperti terlihat pada Tabel 2.22

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,18	0,17	0,15	0,21	0,21	0,22
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,79	0,49	0,45	0,37	0,44	0,46
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1,97	0,87	0,88	0,89	0,92	0,88

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

- **Angka Kelulusan**

Pada tahun 2010-2015, angka kelulusan siswa di Sumatera Barat dari tahun ke tahun memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Angka kelulusan siswa SD/MI pada tahun 2010 sebesar 99,80 % turun menjadi 96,07% tahun 2015, sedangkan SMP/MTs sebesar 94,20% pada tahun 2010 naik menjadi 99,84% pada tahun 2015. Selanjutnya angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 98,77% pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 99,95%. Jika dibandingkan antara kelulusan SD melanjutkan ke SMP dan kelulusan SMP melanjutkan ke SMA yang paling besar adalah angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,56% sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 95,56%, seperti terlihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,80	99,53	96,72	97,99	97,99	96,07
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	94,20	95,16	97,56	99,02	99,95	99,84
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	98,77	95,25	99,40	85,39	99,60	99,95
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	97,30	95,28	94,53	99,28	99,56
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,99	88,90	90,81	99,13	98,49	95,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Kontribusi lulusan Sekolah Menengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat cukup signifikan dibandingkan dengan kualifikasi pendidikan lainnya. Pada tahun 2015, untuk lulusan pendidikan SMA memberikan kontribusi sebesar 12,30%, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan memberikan kontribusi sebesar 13,32%.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan integritas peserta didik yang ditandai dengan capaian Integritas Peserta Didik di Sumatera Barat dengan capaian di tahun 2015 sebesar 58%. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan integritas peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan karakter

Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan minat baca melalui peningkatan keberagaman dan kelengkapan koleksi bahan bacaan dan peningkatan layanan perpustakaan. Salah satu ukuran peningkatan minat baca ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah dengan rata-rata peningkatan kunjungan pertahun sebanyak 1.000 kunjungan.

- **Angka Partisipasi Kasar Dan Angka Partisipasi Murni**

Masalah pemerataan pendidikan ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk kondisi Sumatera Barat cukup bervariasi. Untuk APK SD/MI/Paket A hingga tahun 2015 sudah cukup tinggi yaitu 116,48 %, Untuk tingkat APK SMP/MTs/Paket B

Tahun 2015 mencapai 105,01 %, APK tingkat SMA/SMK/MA/Paket C telah mencapai 96,65 % Tahun 2015, pencapaian APK di Sumatera Barat untuk semua jenjang pendidikan telah melampaui target nasional.

Untuk APM hingga tahun 2015 umumnya juga lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, untuk capaian APM SD/MI sebesar 99,57 % tahun 2015, APM SMP/MTs/Paket B sebesar 81,15 % tahun 2015, APM SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2015 sebesar 73,10 %. Kondisi ini juga lebih tinggi dari pada capaian APM tingkat Nasional.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkembang dengan cepat, hal ini berdampak pada meningkatnya APK SD/MI/SDLB, pada tahun 2015 telah mencapai 116,48 %. Tingginya angka APK ini ada beberapa kemungkinan faktor penyebabnya, seperti adanya sebagian anak (dilihat dari segi usia) mestinya belum waktunya masuk SD, tetapi kenyataannya mereka sudah duduk di bangku sekolah SD. Hal ini terjadi karena anak sudah merasa bosan mengikuti pendidikan di PAUD dan kemampuannya sudah mendukung untuk masuk SD. Secara riil APM yang dicapai SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2015 sebesar 99,57 % Tahun 2015. Angka APM lebih rendah karena APM ini adalah anak-anak yang berada di sekolah itu sesuai dengan usianya pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk APK dan APM capaiannya memang sudah di atas capaian nasional, tetapi untuk Sumatera Barat masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkannya sampai batas optimal. Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terlihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Provinsi Sumbar Tahun 2010-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)						
1	SD sederajat						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	680.491	678.504	666.695	647.413	676.739	654.789
1.2.	APK SD/MI	109,17	111,91	111,94	111,95	116,42	116,48
2	SMP sederajat						
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	201.138	206.957	202.789	200.589	208.876	20.126
2.2.	APK SMP/MTs	87,16	92,96	93,51	93,68	104,76	105,01
3	SLTA sederajat						
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	183.700	164.099	195.581	193.240	208.193	212.174
3.2.	APK SMA/MA/SMK	68,10	67,42	86,75	86,94	96,64	96,65
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)						
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	680.491	678.504	666.695	647.413	679.739	654.789

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.2.	APM SD/MI	93,85	94,46	94,49	94,48	99,56	99,57
2.	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah siswa kelompok 13-15 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	201.138	206.957	202.789	200.589	208.876	20.126
2.2.	APM SMP/MTs	66,85	75,43	80,90	80,95	81,12	81,15
3.	SMA/MA/SMK						
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	183.700	164.099	195.581	193.240	208.193	212.174
3.2.	APM SMA/MA/SMK	51,55	50,34	69,67	69,88	73,08	73,10

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

2.1.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Memperhatikan perkembangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur semakin berkurang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Sedangkan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan persentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah untuk memenuhi kuota 30%, seperti data series lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator Pembangunan	Sat	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Eselon II 6,8 Eselon III 25 Eselon IV 35	Eselon II 6,8 Eselon III 25 Eselon IV 35	Eselon II 8,81 Eselon III 27,27 Eselon IV 41,41	Eselon II 4,9 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18	Eselon II 5,0 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18	Eselon II 5,0 Eselon III 27,9 Eselon IV 39,18
2	Rasio KDRT	%	78	65	60	100	0	0
3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	1,11	8,9	1,69	1,69	0,001	0,001
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26,40	25,49	56,01	56,01	50,65	50,65
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	1	3	14	14	0	0

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat

2.1.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan data pada Tabel 2.26, memperlihatkan bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2010-2015, hal ini tergambar dari data indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, dan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Sebagian besar indikator pekerjaan umum rata-rata mengalami peningkatan, kecuali persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasi/saluran pembuangan air, persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan luas lingkungan permukiman yang nilainya tetap tidak berubah. Bagi indikator persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, nilai yang ada ini perlu tetap dipertahankan, sedangkan bagi indikator persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, rasio permukiman layak huni, dan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	80	89	89	92	96	80,5
2	Rasio Jaringan Irigasi (Panjang jaringan (km) / luas sawah (ha))	%	1 : 36	1 : 36	1 : 36	1 : 36	1 : 45	1 : 105
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	3,39	3,45	3,51	3,57	3,66	3,77
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,73	58,15	60,94	63,63	65,37	66,84
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	32,5	32,7	33,05	33,05	34,02	34,02*)
6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	73,65	73,85	73,85	74,50	75,70	75,70*)
7	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45
8	Rasio Permukiman layak huni	Rasio	25,940	27,600	28,510	30,390	31,110	31,150
9	Panjang Jalan dilalui roda 4	Km	1.029,44	1.029,44	1.029,44	1.230,53	1.024,040	1.024,040
10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	5	5	5	5	5	5
11	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	2	2	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
12	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0
13	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	5.193,96	5.347,09	5.499,80	6.348,12	6.859,38	6.859,39
14	Lingkungan Pemukiman	Ha	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan memperhatikan data perkembangan layanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berdasarkan indikator-indikator yang ada, seperti halnya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik (PLN + non PLN), rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni, dalam waktu lima tahun terus mengalami peningkatan, dan bagi pemerintah yang perlu diperhatikan adalah indikator lingkungan permukiman kumuh yang nilai persentasenya terus mengalami kenaikan dari 13,72% tahun 2010 menjadi 15,04% pada tahun 2015, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45
2	Rumah tangga pengguna listrik (PLN + non PLN)	%	90,77	91,40	93,70	93,70	94,00	95,00
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,73	58,15	60,94	63,63	65,37	66,84
4	Lingkungan permukiman	Ha	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
5	Lingkungan permukiman kumuh	Ha	13,72	14,04	13,25	14,57	15,03	15,04
6	Luas kawasan permukiman	Ha	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09	484.978,09
7	Jumlah kawasan permukiman penduduk	Kawasan	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
8	Rumah layak huni	%	67,47	70,01	73,57	74,30	75,00	76,00
9	Rasio permukiman layak huni	Rasio	25,940	27,600	28,510	30,390	31,110	31,150
10	Rumah Khusus Nelayan	Rumah	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Rumah	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat

2.1.9 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral seperti terlihat dari dua indikator pada Tabel 2.28 bahwa Pertambangan tanpa izin persentasenya semakin berkurang dari tahun yakni 5,00% tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,15%, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB semakin meningkat, hal ini menindikasikan bahwa, usaha pertambangan yang ilegal dapat ditekan, berikut kontribusi sektor pertambangan semakin meningkat dalam pendapatan daerah.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	%	7,15	7,15	7,09	6,98	5,47	5,00
		Ha	-	1.650	1.533	1.426	1.348	1.281
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	4,55	4,46	4,44	4,60	4,88	4,96

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

2.1.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 178,81 triliun, dan harga konstan sebesar Rp. 140,53 triliun dengan PDRB perkapita sebesar Rp 34,41 juta atau US\$ 2 572,41. Ekonomi Sumatera Barat tahun 2015 tumbuh 5,41 % melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,86 %. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian mengalami perlambatan dari 5,84 % tahun 2014 menjadi 4,33 % di tahun 2015. Dari sisi pengeluaran, perlambatan disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan modal tetap bruto dari 5,23 % di tahun 2014 menjadi 4,34 % di Tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2015 (%)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.72	4.61	2.63	3.42	5.86	4.33
2. Pertambangan dan Penggalian	6.56	5.15	5.82	7.61	4.34	3.58
3. Industri Pengolahan	2.18	4.74	6.46	5.14	5.40	1.84
4. Pengadaan Listrik & Gas	-1.11	4.90	8.14	3.56	8.68	0.84
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5.47	4.22	3.69	4.92	3.89	5.99
6. Konstruksi	8.58	7.80	9.96	10.30	6.58	6.85
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.92	5.92	8.62	6.31	5.30	5.10
8. Transportasi dan Pergudangan	9.02	8.53	7.77	8.47	7.51	8.07

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.62	4.76	5.29	5.90	6.44	6.85
10. Informasi dan Komunikasi	14.18	9.24	11.75	9.11	8.37	9.86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.28	9.30	9.79	6.27	5.14	3.63
12. Real Estate	4.84	4.05	4.60	5.50	5.56	5.30
13. Jasa Perusahaan	6.47	4.93	5.96	7.30	6.97	6.15
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.29	8.85	0.16	1.75	1.95	4.71
15. Jasa Pendidikan	12.70	8.45	10.13	8.39	6.18	8.92
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.08	8.11	10.55	7.76	7.97	7.27
17. Jasa Lainnya	6.96	5.98	6.79	5.30	6.52	7.46
PDRB SUMATERA BARAT	5.60	6.34	6.31	6.02	5.85	5.41

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2014-2015

Kalau dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan provinsi se Sumatera dan nasional pada tahun 2015, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di posisi ke dua setelah Provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,72
2. Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10
3. Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41
4. Riau	5,57	3,76	2,48	2,70	0,22
5. Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21
6. Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,70	4,50
7. Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,14
8. Lampung	6,56	6,44	5,78	5,08	5,13
9. Kep.Bangka Belitung	6,90	5,40	5,20	4,67	4,08
10. Kep.Riau	6,96	7,63	7,11	7,32	6,02
Nasional	6,49	6,26	5,56	5,02	4,79

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera Tahun 2016

Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
1. Aceh	23,43	24,29	25,22	26,09	25,83
2. Sumatera Utara	28,52	31,11	34,54	37,91	41,02
3. Sumatera Barat	24,06	26,29	28,99	32,13	34,41
4. Riau	84,81	95,00	100,69	109,78	102,83

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
5. Jambi	32,68	35,66	39,55	43,30	45,59
6. Sumatera Selatan	29,83	32,83	36,02	38,83	41,32
7. Bengkulu	18,37	20,30	22,36	24,61	26,85
8. Lampung	21,98	23,91	25,77	28,78	31,19
9. Kep.Bangka Belitung	32,47	35,29	38,31	41,95	44,43
10. Kep.Riau	72,57	80,24	87,71	94,73	103,03

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi se Sumatera Tahun 2016

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan 24,84 %, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 14,68 % serta transportasi dan pergudangan 12,05 %, seperti terlihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.32
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (%)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.97	25.74	25.02	24.68	25.00	24,84
2. Pertambangan dan Penggalian	4.55	4.46	4.44	4.60	4.88	4,94
3. Industri Pengolahan	11.69	11.71	11.53	11.02	10.57	10,97
4. Pengadaan Listrik & Gas	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0,09
5. Pengadaan Air	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0,09
6. Konstruksi	7.88	8.04	8.37	8.77	9,11	9,45
7. Perdagangan Bsr & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	15.14	15.05	15.11	14.77	14.40	14,68
8. Transportasi dan Pergudangan	10.42	10.62	10.58	11.23	11.78	12,05
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.03	1.05	1.07	1.12	1,22
10. Informasi dan Komunikasi	5.49	5.40	5.56	5.26	5.12	4,79
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.89	2.94	3.16	3.15	3.10	3,12
12. Real Estate	2.05	1.98	1.92	1.93	1.97	2,01
13. Jasa Perusahaan	0.44	0.42	0.42	0.43	0.42	0,43
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.32	6.37	6.39	6.29	5,88	5,43
15. Jasa Pendidikan	3.21	3.32	3.46	3.69	3.60	3,71
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.20	1.23	1.32	1.34	1.28	1,26
17. Jasa Lainnya	1.53	1.51	1.51	1.62	1.62	1,64
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2014, komponen konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kenaikan yaitu 4,30 persen dan 4,68 persen pada tahun 2015, sedangkan pengeluaran konsumsi lembaga non profit turun dari 13,42% tahun 2014 menjadi 3,39% tahun 2015 diikuti penurunan ekspor luar negeri dari 14,15% menjadi 12,74 % pada tahun 2015.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,01 %, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 53,53 %.

Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 31,22 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,72 % yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar

30,18 % dan 13,21 %. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 233.

Tabel 2.33.
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2013-2015

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.48	4.21	4.30	54.64	53.53	54.01
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	12.05	13.42	3.39	1.08	1.12	1.12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.83	3.31	4.68	13.40	13.21	13.72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.62	5.23	4.34	29.75	30.18	31.22
Perubahan Inventori	-59.36	-83.36	17.37	0.52	0.04	0.09
Ekspor Luar Negeri	9.83	3.32	5.84	14.30	14.15	12.74
Impor Luar Negeri	-14.44	4.76	-1.73	8.35	8.40	5.51
Net Ekspor Antar Daerah	11.35	-26.50	-6.04	-5.35	-3.83	-7.39
PDRB SUMATERA BARAT	6.08	5.86	5.41	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016.

• Laju Inflasi

Perekonomian sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana barometer inflasi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi tahun kalender Kota Padang sampai Desember 2015 adalah sebesar 0,85 %. Sedangkan di Kota Bukittinggi laju inflasi tahun kalender sampai Desember 2015 adalah 2,79 %. Dari inflasi kedua kota tersebut maka inflasi Sumatera Barat Tahun 2015 sebesar 1,08%.

Inflasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi antara lain oleh: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minum, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air ,listrik, gas dan bahan bakar, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Secara umum inflasi di Sumatera Barat cenderung berada di atas nasional, kecuali pada tahun 2015 yang jauh berada di bawah inflasi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.34
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2015 (%)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sumatera Barat	7,84	5,37	4,16	10,87	11,90	1,08*)
Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	8,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

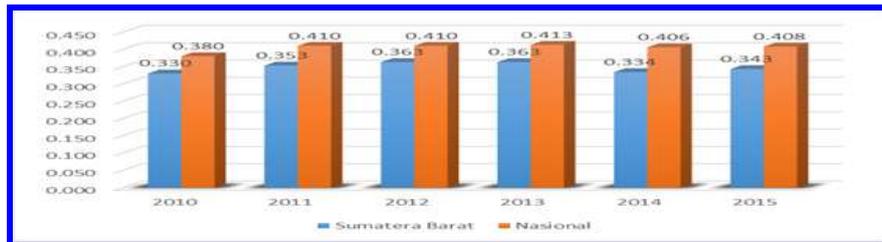
*) Data Bank Indonesia

• Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada Grafik 2.8.

Grafik 2.8
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Ketimpangan wilayah diukur berdasarkan Indeks Williamson yang dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai indeks williamson $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamson antara $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi dengan indeks williamson $>0,7$. Sumatera Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan indeks selama lima tahun terakhir berada pada kisaran $0,45 - 0,35$ yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya atau ketimpangannya semakin berkurang. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat prioritas penanganannya untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

2.1.9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya (jalan nasional dan provinsi) tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat mencapai 2.679,34 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1.448,81 km, jalan Provinsi sepanjang 1.230,53 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*), Kementerian PU), Jalan Status Nasional kualitas mantap pada tahun 2015 mencapai 1.166,29 km atau 80,5 persen, tidak mantap 282,52 km atau 19,5 persen. Kondisi kemantapan jalan pada jalan Nasional terjadi penurunan dari 96,00% untuk tahun 2014 menjadi 80,50 untuk tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan jalan baru dan peralihan status kewenangan jalan. Kemudian untuk jalan provinsi, kualitas mantap mencapai 1.121,38 Km atau 91,13 %, tidak mantap sepanjang 109,15 km atau 8.87%. Kondisi kemantapan jalan terjadi peningkatan 2,9% dari tahun 2014 ke tahun 2015, dimana kondisi kemantapan jalan sebesar 88,20 untuk tahun 2014 dan tahun 2015, kondisi kemantapan jalan menjadi 91,13%.

Jika dilihat Tabel 2.35 menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan secara umum di Sumatera Barat dalam kondisi baik, namun untuk lebih meningkatkan daya saing daerah perlu melakukan percepatan perbaikan kondisi kemantapan jalan di Sumatera Barat, sehingga biaya perjalanan menjadi lebih efisien.

Tabel 2.35
Panjang Jalan dan Kemantapan Jalan di Sumatera Barat
menurut statusnya Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Panjang Jalan (Km)						
1	Negara	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.212,89	1.448,81
2	Provinsi	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53	1.230,53
	Kemantapan Jalan (%)						
1	Jalan Nasional	80,00	89,00	89,00	92,00	96,00	80,50
2	Jalan Provinsi	80,00	83,00	88,09	87,87	88,20	91,13

Sumber : Dinas Prasarjarkim Provinsi Sumatera Barat

• Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah jumlah total rumah tangga yang berlistrik dibagi dengan total rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Trend Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan rentang peningkatan hingga 6%. Rasio elektrifikasi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah 83,38% masih di bawah target Nasional yaitu sebesar 85,15%. Rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun di Sumatera Barat adalah 69,50% pada tahun 2010, 71,60% pada tahun 2011, 73,48% pada tahun 2012, dan 77,69%, 83,16%, 83,38% pada tahun 2013, 2014 dan 2015

2.1.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.

Kesejahteraan masyarakat tergambar dari tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang sering digunakan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sejak lima tahun terakhir terus terjadi peningkatan IPM, dari 67,25 pada tahun 2010 menjadi 69,98 pada tahun 2015, hal ini memberikan indikasi bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan indeks pembangunan manusia dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 2.36.

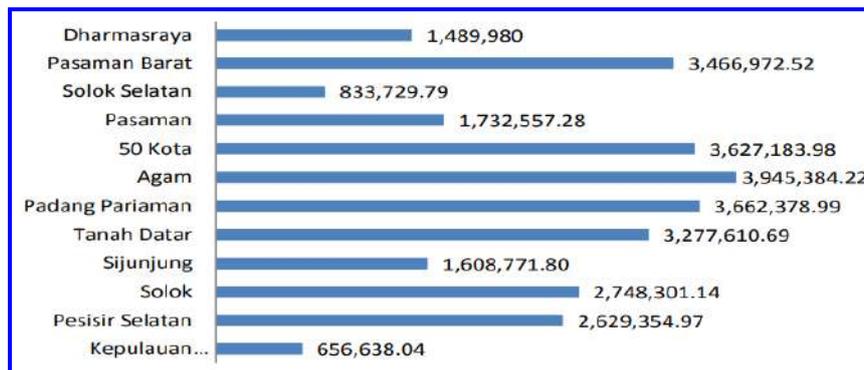
Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	67,59	67,79	68,00	68,21	68,32	68,66
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,22	12,52	12,81	13,16	13,48	13,60
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,20	8,27	8,28	8,29	8,42
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	9.339	9.409	9.479	9.570	9.621	9.804
Indeks Pembangunan Manusia Prov.Sumatera Barat			67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2015

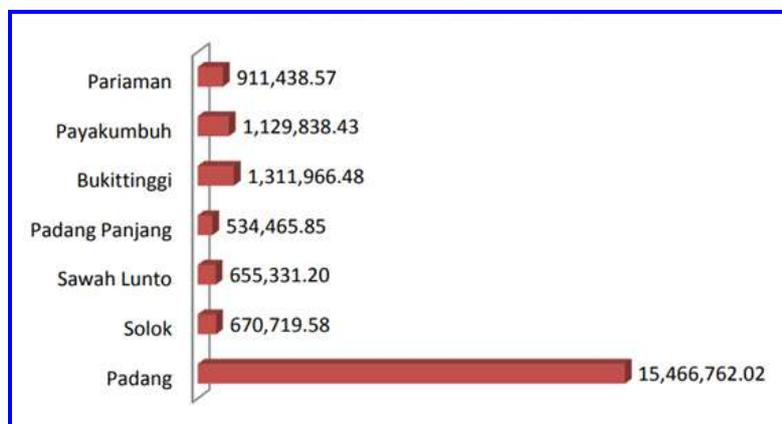
Ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, sehingga pada suatu daerah terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat dari perbedaan pada distribusi pendapatan.

Grafik 2.9.
PDRB Antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat, diolah.

Grafik 2.10
PDRB Antar Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

Grafik 2.11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000, Tahun 2014 (%)



Sumber: : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah, data diolah

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan antar daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan

2.1.11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat, umlah kawasan pemukiman penduduk pada tahun 2015 sejumlah 1.145 kawasan, atau sejumlah 1,532 Ha.

Dengan memperhatikan data perkembangan layanan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, berdasarkan indikator-indikator yang ada, seperti halnya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik (PLN + non PLN), rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni, dalam waktu lima tahun terus mengalami peningkatan, dan bagi pemerintah yang perlu diperhatikan adalah indikator Lingkungan permukiman kumuh yang nilai persentasenya terus mengalami kenaikan dari 13,72% tahun 2010 menjadi 15,04% pada tahun 2015.

2.1.12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.

Propinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada tahun 2015.

Upaya untuk mencapai Tujuan 12 TPB/SDGs, yakni Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Upaya-upaya tersebut tertuang dalam sejumlah program yaitu:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Program Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan;
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi.

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi menyebabkan terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

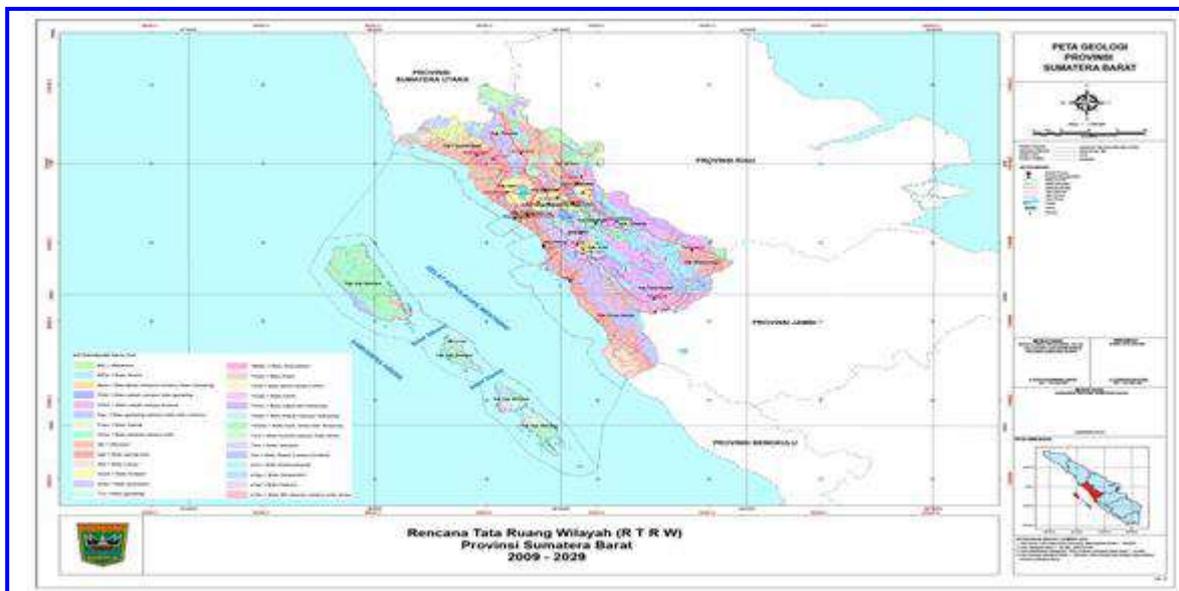
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan

Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur pelipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Gambar 2.2 memperlihatkan peta geologi Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.1
Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

Wilayah Rawan Bencana

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng *Indo-Australia* dan *Euro Asia* di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu

wilayah Sumatera Barat mempunyai jenis tanah yang mudah longsor. Tabel 2.12 memperlihatkan wilayah daerah rawan bencana.

Tabel 2.37.
Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
	Kabupaten :				
1	Kepulauan Mentawai	Menengah	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
2	Pesisir Selatan	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Gempa Laut
3	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
4	Sijunjung	Menengah	-	-	-
5	Tanah Datar	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
6	Padang Pariaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
7	Agam	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
8	Lima Puluh Kota	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	
9	Pasaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
10	Solok Selatan	Menengah - Tinggi	-	-	
11	Dharmasraya	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
12	Pasaman Barat	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
	Kota :				
13	Padang	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
14	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
15	Sawahlunto	Menengah - Tinggi	-	-	-
16	Padang Panjang	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
17	Bukittinggi	Menengah	Menengah	-	Gempa Darat
18	Payakumbuh	-	Menengah - Tinggi	-	-
19	Pariaman	-	-	Menengah-Tinggi	Gempa Laut

Keterangan :

1. Menengah – Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.

2. Menengah

Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

3. Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Bencana Tsunami ,Gerakan Tanah, Banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana yang sangat tinggi akibat yang akan

ditimbulkan jika terjadi bencana, terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai yang berpotensi akan terjadinya Tsunami.

Berdasarkan Tabel 2.37 di atas, semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk mengalami bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.14 Pelestarian dan Pemanfaat Ekosistem Kelautan

Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan.

Perairan laut Sumatera Barat mempunyai luas total wilayah sebesar 179.760,23 km² (luas zona territorial sebesar 57,880 km² dan luas zona eksklusif sebesar 128,700 km²) sementara itu luas perairan umum pada tahun 2015 tercatat mempunyai luas lahan sebesar 124.202,82 Ha.

Perkembangan produksi perikanan dari tahun 2010 – sampai tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,08 % per tahun seperti terlihat pada Tabel 2.37. Selanjutnya produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata 21,65% per tahun, perikanan tangkap 1,29 % per tahun dan perairan umum sebesar 1,8 % per tahun. Produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 4,64 %, hal ini disebabkan antara lain menurunnya jumlah nelayan perikanan tangkap pada tahun 2015 dan diduga pengaruh fenomena cuaca ekstrim.

Jumlah nelayan perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tercatat sebanyak 42.061 orang yang terdiri nelayan penuh 28.133 orang dan nelayan sambilan 13.928 orang, dengan sarana tangkap yang digunakan adalah perahu tanpa motor sebanyak 1.160 unit, motor tempel 6.512 unit dan kapal motor sebanyak 2.197 unit.

Tabel 2.38
Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat
Tahun 2010-2015 (Ton)

No	Realisasi	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Perikanan Laut (ton)	192.658,40	196.511,50	197.460,20	211.003,40	214.734,00	204.771,00
2	Perairan Umum	9.941,10	8.945,20	10.406,60	10.372,40	10.464,90	10.688,90
3	Prod. Perikanan Budidaya (ton)	109.371	131.555	180.664	206.869,49	262.863	286.711,58
	Total	311.970,50	337.011,68	388.531,11	428.245,29	488.062,11	502.171,48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi sangat penting dari hasil tangkapan adalah ikan tuna, cakalang, dan udang. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada fishing ground utama perairan laut Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.2
Produksi Tiga Jenis Komoditi Bernilai Ekonomis Utama Perikanan Tangkap di Perairan Laut Sumatera Barat Tahun 2015



Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumatera Barat 2015

Selain tiga jenis hasil tangkapan utama yakni tuna, cakalang, dan udang yang bernilai ekspor tinggi terdapat juga jenis ikan dan komoditi perikanan lainnya yang juga bernilai ekonomis baik untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri. Misalnya ikan tongkol, tenggiri, cumi-cumi, sotong, gurita, rumput laut, dan sebagainya.

Kegiatan perikanan budidaya air tawar dilakukan di lingkungan perairan. Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi ikan perikanan budidaya ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah sistem kolam, kolam air deras, karamba, jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Budidaya air payau biasa dilakukan pada kolam di daerah pesisir dengan salinitas air berkategori sedang hingga mendekati salinitas air laut. Kolam air payau (*brackish water pond*) yang disebut tambak. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman secara geografi menjadi wilayah untuk pengembangan budidaya air payau di Sumatera Barat.

Berdasarkan tingkat produksi masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten

Kepulauan Mentawai. Sebagai produsen perikanan laut terbesar, Kabupaten Pasaman Barat menghasilkan sekitar 40 % produksi perikanan Sumatera Barat.

Berbagai jenis ikan dihasilkan dari tujuh sentra produksi perikanan laut di atas. Setidaknya terdapat tujuh jenis ikan laut dengan tingkat produksi yang besar seperti tatengkek, kwee, tongkol, selar, teri dan udang. Melihat dari jenis dan jumlah ikan yang dihasilkan, sekitar 20 sampai 30 persen atau sekitar 41,1 ribu ton diantaranya merupakan jenis ikan yang memungkinkan dikalengkan. Jumlah ini relatif sangat memadai dalam sebuah industri pengalengan ikan. Namun demikian, sejauh ini industri pengolahan hasil perikanan laut di Sumatera Barat masih didominasi oleh pengolahan bercorak tradisional seperti pada Tabel 2.39

Tabel 2.39
Jenis Industri Pengolahan Sumatera Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	INDUSTRI PENGOLAHAN
	Kabupaten :	
1.	Kepulauan Mentawai	Penggaraman pengeringan
2.	Pesisir Selatan	Penggaraman pengeringan
3.	Solok	Pengasapan, pengolahan lain
4.	Sawahlunto	Pengasapan, segar, pengolahan lain
5.	Tanah Datar	Pengolahan lain
6.	Padang Pariaman	Penggaraman, pemindangan, surimi, segar
7.	Agam	Penggaraman pengeringan, pengasapan
8.	Lima Puluh Kota	Penggaraman pengeringan, pengasapan
9.	Pasaman	Pengeringan, pengasapan
10.	Solok Selatan	Pengeringan, pengolahan lain
11.	Dharmasraya	Pengasapan, pengolahan lain
12.	Pasaman Barat	Penggaraman pengeringan, segar
	Kota :	
13.	Padang	Penggaraman, pemindangan, surimi, abon, segar
14.	Solok	Pengasapan, pereduksian
15.	Sawah Lunto	Pengolahan lain
16.	Padang Panjang	Pengasapan, surimi
17.	Bukittinggi	Pengasapan, pengolahan lain
18.	Payakumbuh	Pengasapan, pengolahan lain
19.	Pariaman	Penggaraman pengeringan, pereduksian

Sumberdaya Ekosistem Pesisir dan Maritim: Hutan Bakau Terumbu Karang, Padang Lamun dan Rumput Laut

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di ekosistem pesisir (ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground* dan ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian

sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut. Karena, ekosistem-ekosistem tersebut selain sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) dari populasi lain yang membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Luas terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 diperkirakan 36.693,27 Ha dengan rata-rata tingkat kerusakan mencapai 82%. Kerusakan terjadi akibat proses yang berlangsung secara alami di samping dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, membom ikan, pengambilan karang, dsb. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.7. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

Tabel 2.40
Sebaran Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Areal (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	244,5
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.065,37
3.	Kabupaten Padang Pariaman	54,60
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	35.218
5.	Kabupaten Agam	16,2
6.	Kota Padang	83,65
7.	Kota Pariaman	10,95
	Jumlah	36.693,27

Sumber data: DKP Provinsi, 2015

Hutan bakau di Sumatera Barat tahun 2015 seluas 43.186,71 Ha dengan kondisi 77,33% dalam keadaan baik, 7,67% dalam keadaan sedang dan 15% dalam keadaan rusak. Sumber utama kerusakan hutan bakau adalah akibat dampak pemanfaatan hutan bakau secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah pemanfaatan hutan bakau yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambangan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan bakau dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan bakau

untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau. Sebaran hutan bakau di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Sebaran Hutan Bakau di Sumatera Barat Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	6.273,50
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.549,55
3.	Kabupaten Padang Pariaman	190,00
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32.600,00
5.	Kabupaten Agam	313,50
6.	Kota Padang	1.250,16
7.	Kota Pariaman	10,00
	Total	43.186,71

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2015

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acoroides*, *Halodule universis*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten. KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), P. Kasiak dan P. Talua (Kabupaten Pasaman Barat), P. Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisma laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

melalui dana APBN lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencaharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga). Telah dilaksanakan fasilitas kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pada tahun 2011 dilaksanakan *restocking* perairan umum lubuk larangan di 11 kabupaten/kota sebanyak 648.200 ekor bibit ikan yang terdiri dari 453.200 ekor bibit ikan nila berukuran 5-8 cm dan bibit ikan mas sebanyak 195.000 ekor.

Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 25 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun \pm 3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500 per orang selama kunjungan.

2.1.15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

Kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 35/Kpts-II/2013, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat 2.342.893,24 Ha dengan rincian: Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas \pm 769.774,66 Ha, Hutan Lindung (HL) \pm 791.671,00 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 233.210,58 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas \pm 360.608,00 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 187,629.00 Ha, seperti pada Tabel 2.2.

Selain itu, kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindari timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Tabel 2.42

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

No	KABUPATEN/ KOTA	Fungsi Hutan						JUMLAH
		KPA/KSA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
	Kabupaten							
1	Kep. Mentawai	183.396,94	7.712,06	0.00	247.186,38	54.956,37	107.883,25	601.135,00
2	Pesisir Selatan	285.420,14	23.905,73	46.274,19	4.563,14	30.974,06	188.357,73	579.495,00
3	Solok	48.245,45	117.542,85	12.799,27	5.645,18	9.808,67	179.758,58	373.800,00
4	Sijunjung	40.048,87	78.663,69	29.923,48	21.916,46	15.601,80	126.925,70	313.080,00
5	Tanah Datar	20.125,40	19.682,90	0.00	9.317,98	96,53	84.337,19	133.600,00
6	Padang Pariaman	16.118,20	15.624,54	0.00	0.00	0.00	101.136,25	132.879,00
7	Agam	26.513,66	22.679,11	7.696,34	3.133,52	8.449,83	154.757,54	223.230,00
8	Lima Puluh Kota	20.598,48	124.040,96	19.504,94	5.287,18	11.371,04	154.627,39	335.430,00
9	Pasaman	32.732,17	200.539,68	26.801,27	0.00	8.614,86	176.075,02	444.763,00
10	Solok Selatan	65.836,33	83.794,72	53.684,20	13.049,50	19.753,96	98.501,28	334.620,00
11	Dharmasraya	5.967,08	11.935,30	31.100,58	26.591,73	16.795,40	203.722,91	296.113,00
12	Pasaman Barat	59,46	72.070,74	5.041,84	18.838,68	6.986,93	235.779,35	338.777,00
	Kota							
13	Padang	23.938,32	12.066,08	245,36	0.00	0.00	33.246,24	69.496,00
14	Solok	770,01	342,99	0.00	0.00	0.00	4.651,00	5.764,00
15	Padang Panjang	4,14	601,77	0.00	0.00	0.00	1.694,09	2.300,00
16	Sawahlunto	0.00	120,60	139,11	5.078,25	4.219,54	17.787,51	27.345,00
17	Bukittinggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.524,00	2.524,00
18	Payakumbuh	0.00	347,28	0.00	0.00	0.00	7.695,72	8.043,00
19	Pariaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.336,00	7.336,00
	JUMLAH	769.774,66	791.671,00	233.210,58	360.608,00	187.629,00	.886.836,76	.229.730,00

Sumber: Dinas Kehutanan, Tahun 2015

KPA/KSA : Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam/Nature Conservation Area/Nature Sanctuary Area

HL : Hutan Lindung

HPT : Hutan Produksi Terbatas

HP : Hutan Produksi Tetap

HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi

APL : Areal Penggunaan Lain

Kehutanan

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dalam skala luas dari tahun 2010-2015, mengalami fluktuasi setiap tahunnya pada setiap indikator, seperti terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/tahun	2,00	2,97	5,12	4,96	5,81	2,58
		%	2,00	4,97	10,09	15,04	20,86	23,44
2	Luas lahan hutan dan lahan kritis yang rehabilitasi	Ha	7.449	11.050	19.058	18.456	21.641	9.616
3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	15,70	11,26	0,45	0,41	0,40	0,40
4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,54	1,48	1,44	1,41	1,41	1,56

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 2.48. Data menunjukkan bahwa pesentase penanganan sampah dengan indikator perkiraan timbunan sampah per hari pada tahun 2012 sebanyak 856.575,60 m³ menjadi 546.277,19 m³ pada tahun 2015. Indeks Pencemaran Air menurun dari 61,90 pada tahun 2011 menjadi 53,71 pada tahun 2015, Indeks Pencemaran Udara menurun dari 91,05 pada tahun 2011 menjadi 89,16 pada tahun 2015 dan Indeks Tutupan Hutan menurun dari 67,24 pada tahun 2011 menjadi 65,13 tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perkiraan timbunan sampah per hari	M3	n/a	856.575,60	809.408,53	680.605,69	546.277,19	546.277,19
2	Indeks Kualitas Air	indeks	n/a	82,59	72,71	56,59	58,31	65,98
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	n/a	86,02	86,41	89,16	88,16	88,98
4	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks	n/a	67,24	65,51	65,13	65,13	63,55

Sumber : Dinas Prasjal Tarkim dan Bappedalda Provinsi Sumatera Barat

2.1.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Terkait dengan kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB / SDGS dalam hal perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh penting untuk diketahui terlebih dahulu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kewenangan dan urusannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah karena menjadi dasar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Wujud perhatian tersebut dituangkan melalui strategi dalam bentuk gerakan terpadu reformasi birokrasi yang dilaksanakan tahun 2010-2015 dengan berbagai arah kebijakan yang mendukung pencapaian strategi tersebut.

Berikut disajikan gambaran umum target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat dan realisasi pencapaian target sampai dengan kondisi Tahun 2015 antara lain sebagaimana disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Gambaran Umum Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Provinsi Sumatera Barat

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sosial									
	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:									
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) PMK skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	0.95	1.46	2.83	30.00	30	17.1
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	38.17	39.69	41.98	18.02	100	100.00
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:									
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	2008-2015	43.51	45.04	48.09	20.00	11.91 %	100.00
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Presentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	2008-2015	14.40	20.16	20.99	20.00	19.10	100.00

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
		luar panti.								
	Penanggulangan korban bencana: a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80	2008-2015	100.0 0	00.00	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.00
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80	2008-2015	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	-
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: - Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40	2008-2015	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tercapainya target SPM
2	Lingkungan Hidup									
	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100		20.00	60.00	80.00	-	100.0 0	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100		26.32	47.37	78.95	-	100.0 0	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat	100		40.00	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tercapainya target SPM

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti								
3	Perumahan Rakyat									
	a Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2009-2025	0.738	0.738	0.739	0.740	0.741	0.741
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan dasar	70%	2009-2025	0.030588	0.040587	0.051175	0.061175	0.071175	0.080998
4	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan									
	a Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	-	-	-	-	-	100
	b Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	-	-	-	-	-	100
	c Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	-	-	-	-	-	51
	d Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan	80%	2014	-	-	-	-	-	100

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	kekerasan	pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak								
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	-	-	-	-	-	100
5	Ketenagakerjaan									
	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	-	-	-	-	76.98	Tercapainya target SPM
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	-	-	-	-	76.95	Tercapainya target SPM
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	-	-	-	-	76.92	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	-	-	-	-	10.75	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	-	-	-	-	13.33	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	-	-	-	-	113.61	Tercapainya target SPM
	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	-	-	-	-	6.99	Tercapainya target SPM
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	-	-	-	-	-	-
6.	Ketahanan Pangan									
	a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	15	42	52,4	67,4	126,4	151,4
	b. Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	-	100	100	100	100	Tercapainya target SPM
	c. Penganekaragaman dan Keamanan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	-	86,25	81,82	80,67	72,50	73,81

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pangan									
	d. Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	-	71.43	50	33.33	100	Tercapainya target SPM 100
	7 Kesenian									
	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		4. Misi Kesenian	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		6. Cakupan Tempat (100%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
		7. Cakupan Organisasi (34%)	100	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
	8 Perhubungan									
	Angkutan Jalan									
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2014	-	-	-	-	61.61	Tercapainya target SPM
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	-	-	-	-	85	Tercapainya target SPM
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60%	2014	-	-	-	-	62.31	Tercapainya target SPM
	i. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada	100%	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
		perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.								
	Angkutan Penyeberangan									
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75%	2014	-	-	-	-	100	Tercapainya target SPM
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75%	2014	-	-	-	-	66.67	-
	9 Penanaman Modal									
	a. Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2014	-	-	-	-	2 sektor / bidang usaha	-
	b. Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali/tahun	2014	6 kali	4 kali, 2 MoU	4 kali, 2 MoU	8 kali, 5 MoU	-	-
	c. Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	100%	2014	0%	100%	100%	100%	-	-

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
	f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	100%	2014	0	100%	100%	100%	-	-
	g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	0	0	1 kali	0	-	-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, layanan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada enam urusan, sedangkan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari delapan belas urusan, disamping itu untuk layanan urusan pilihan terdapat delapan urusan.

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, selama kurun waktu 2010-2015 memperlihatkan perkembangan, kemajuan dan peningkatan yang cukup baik.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2010-2015, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.42 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan. Hal ini, sejalan dengan upaya pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, pembinaan politik daerah, serta upaya lainnya dalam penegakan Perda, cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, keindahan).

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No,	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	3	3	3
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	%	4,12	4,07	3,98	3,58	3,59	4,84
	Jumlah Polisi Pamong Praja	personil	2.001	2.004	1.990	1.995	1.995	2.509
4	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10,000 Penduduk	%	*	*	*	51,72	30,02	30,08
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	*	*	*	*	0,7	0,8
6	Jumlah Pos Siskamling di Sumatera Barat	Unit	*	*	*	*	1,139	1.139
7	Penegakan PERDA	%	90,00	90,20	90,20	90,30	92,00	95,00
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	75,00	77,00	77,00	81,00	100	100
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman di Provinsi Sumatera Barat	%	86,00	89,00	89,00	90,00	89,00	96,00

Sumber : Badan Kesbanlinmas dan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.55 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2010-2015. Hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk mencapai 59,99% pada tahun 2015 dari sebelumnya 26,05% pada tahun 2011, dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai 3.334.692 orang pada tahun 2015 dari sebelumnya 1.172.146 orang pada tahun 2010, demikian juga halnya ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tersedia, ini menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di daerah keadaannya semakin membaik.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0	26,05	57,02	57,18	59,99	59,99
2	Pasangan berakte nikah	Pasangan	134,172	23,123	26,432	138,441	138,441	138.441
3	Kepemilikan KTP	Orang	1.172,146	1,373,813	2,999,213	3,127,188	3,334,692	3.334.692
4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Penduduk	156	77	122	31	38	38
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan data pada Tabel 2.56, memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2010-2015 dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini ditandai oleh meningkatnya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 912 tahun 2010 menjadi 1.139 pada tahun 2015. Pada indikator Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif juga memperlihatkan peningkatan, serta Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat terus meningkat dari 570 kelompok tahun 2010 menjadi 3.796 kelompok pada tahun 2015, namun pada indikator lainnya seperti Posyandu aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, menunjukkan angka yang berfluktuasi setiap tahunnya, seperti terlihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	LPM	912	912	912	1.139	1.139	1.139
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	40,29	38,81	35,58	35,37	35,50	35,50
3	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	251	312	341	341	341	341
4	LPM Berprestasi	lembaga	0	0	0	0	3	3
5	PKK aktif	Kelompok	1.179	1.224	1.335	1.343	1.338	1.338
6	Posyandu aktif	%	94,06	93,78	95,63	86,5	93,79	95,59
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Rp.Jt	17.678	17.668	106.578	110.685	113.980	115.275
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Kelompok	570	570	912	3.503	3.796	3.796

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Perkembangan urusan keluarga berencana dapat dikatakan, bahwa sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti, seperti terlihat dari Tabel 2.56. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan dari 4,12 pada tahun 2010 menjadi 2,8 pada tahun 2015, artinya pengendalian jumlah anak per keluarga sudah dapat ditekan. Rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikutnya untuk Keluarga Pra Sejahtera

dan Sejahtera I, memperlihatkan angka yang menurun persentasenya dari 32,90% pada tahun 2010 menjadi 27,30% pada tahun 2014, seperti terlihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	4,12	3,95	3,95	2,8	2,8	2,8
2	Rasio akseptor KB	%	74,35	75,30	74,90	73,41	74,90	74,95
3	Cakupan peserta KB aktif	%	67,19	73,79	74,90	75,60	75,67	76,50
		Orang	593,885	611,415	626,414	629,348	624,473	642,263
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	32,90	30,90	30,40	27,80	27,30	27,30*
		Keluarga	390,546	370,951	369,287	342,836	338,902	338,902*
	a. Pra Sejahtera	Keluarga	108,238	97,642	98,004	86,592	81,853	81,853*
	b. Keluarga Sejahtera I	Keluarga	282,308	273,309	271,282	256,244	257,069	257,069*

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Sumatera Barat

Urusan Perhubungan

Jumlah penumpang Angkutan Umum merupakan salah satu indikator keberhasilan di dalam Penyelenggaraan/Pengelolaan Angkutan Umum. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang yang terangkut dengan menggunakan Angkutan Umum. Peningkatan Jumlah penumpang Angkutan umum sangat tergantung kemudahan akses layanan (jangkauan perjalanan) dan kehandalan (frekuensi perjalanan) dari angkutan umum itu tersendiri.

Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum di Sumatera Barat sangat berfluktuasi, terutama pada Angkutan Darat, Laut dan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). Dengan memperhatikan Tabel 2.58 menunjukkan bahwa penumpang angkutan umum Darat menunjukkan kecenderungan kenaikannya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Kenaikan jumlah penumpang angkutan darat dari tahun 2011 - 2013 rata-rata sebesar 4,92% atau rata-rata 404,748 orang/tahun. Namun jumlah penumpang pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 2.388.163 atau 27%. Penurunan tersebut disebabkan karena masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan darat juga berpengaruh terhadap penurunan pengoperasian atau rit perjalanan angkutan umum. Pada tahun 2015, jumlah penumpang angkutan darat mulai mengalami peningkatan, dari 6.456.885 orang tahun 2014 menjadi 7.136.115 orang tahun 2015.

Selanjutnya tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan pada Angkutan Laut dan penurunan jumlah penumpang pada Angkutan SDP. Pada tabel tersebut, jumlah penumpang angkutan laut meningkat dari 13.831 orang untuk tahun 2014 menjadi 59.874 orang untuk tahun 2015 dan dan Angkutan SDP memiliki jumlah penumpang 102.235 orang untuk tahun 2014 menjadi 66.781 orang untuk tahun 2015. Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa semenjak

beroperasi Kapal Cepat Angkutan Laut ke Padang - Mentawai menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang kapal SDP. Dan peningkatan frekuensi layanan pengoperasian Kapal Cepat menjadi salah satu faktor beralihnya penumpang dari menggunakan kapal SDP ke Kapal Cepat Angkutan Laut.

Penumpang Angkutan Udara dan Kereta Api terus mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk Angkutan Udara, rata-rata peningkatan setiap tahun adalah sebesar 8.36%, sedangkan untuk Angkutan Kereta Api adalah sebesar 17,16%. Peningkatan tersebut di sebabkan karena peningkatan frekuensi layanan masing-masing angkutan. Penambahan frekuensi layanan disebabkan adanya kecenderungan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan tersebut, karena angkutan tersebut memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dan kenyamanan dibandingkan angkutan lain. Data jumlah penumpang, lebih rinci dapat dilihat Tabel 2.50

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penumpang Angkutan Umum							
1	Angkutan darat	orang	8.035.552	8.435.800	8.845.048	6.456.885	7.136.115
2	Angkutan Laut	orang	17.722	16.055	17.358	13.831	59.874
3	Angkutan Udara	orang	2.211.884	2.585.768	2.659.797	2.745.438	3.032.561
4	Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan	orang	46.423	60.425	96.801	102.235	66.781
5	Angkutan Kereta Api	orang	560.762	582.785	628.711	611.319	975.737
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal							
1	Pelabuhan Penyeberangan Padang – Mentawai	Pel, Penyeb	4	4	4	4	4
2	Bandara	Bandara	3	3	3	3	4
3	Terminal Bis	Terminal	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Kemudian ketersediaan fasilitas Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal belum mengalami peningkatan. Penambahan fasilitas hanya terdapat pada fasilitas bandara yakni terbangunnya 1 (satu) fasilitas bandar udara di Pasaman Barat. Sedangkan untuk fasilitas pelabuhan dan terminal belum mengalami penambahan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaran pemerintahan di Sumatera Barat telah didukung oleh sistim teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service To Internet*) dan Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah (Jarkompusda). Perkembangan sistim komunikasi dan informasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2015

No	Indikator	Sat.	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	2 (Astinet dan jarkompusda)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)	3 (Astinet dan jarkompusda telepresence)
2	Website milik Pemerintah Daerah	Web	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota
3	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Sistim	70	72	75	77	80	83

Sumber : KPID Provinsi Sumatera Barat

2.1.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup baik yaitu sebesar 16,43% per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari Rp 1.006.821 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 1.876.733 juta pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena terhitung tahun 2014 terdapat penambahan sumber pendapatan yang berasal dari pajak rokok. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,65 % selama periode 2010-2015.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari Rp. 46,8 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 85,1 milyar pada tahun 2015. Meskipun mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat selama periode Tahun 2010-2015, kontribusi pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan masih kurang dari 5% dari total PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Askrida.

Struktur pendapatan daerah mengalami perubahan selama periode 2010-2015. Peranan Pendapatan Asli Daerah turun dari 52,41 % pada tahun 2010 menjadi 46,31 % pada tahun 2015. Kontribusi Dana Perimbangan juga mengalami penurunan dari 40,89 % menjadi 34,32 % pada tahun 2015. Sebaliknya peranan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan dari 6,69 % pada tahun 2010 menjadi 19,36 % pada tahun 2015. Komponen terbesar dari kelompok pendapatan ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mengalami peningkatan dari Rp 48.111 juta

pada tahun 2010 menjadi Rp 753.037 juta pada tahun 2015 dan komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus diterima daerah terhitung tahun 2012.

Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatandari Rp 2.239.753 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 4.022.264 juta pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,31 % pertahun. Kenaikan belanja ini lebih rendah dari kenaikan pendapatan daerah pada periode yang samasebesar 16,43 %. Keadaan ini mencerminkan terjadinya SILPA setiap tahunnya.

Tabel 2.52

**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat
(Dalam Rp Juta)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	1.006.821	1.224.414	1.225.466	1.366.178	1.729.222	1.876.733
2	Dana Perimbangan	785.575	931.882	1.143.895	1.240.880	1.333.059	1.390.876
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128.575	27.661	553.220	540.782	573.556	784.640
4	Total	1.920.971	2.183.958	2.922.582	3.147.840	3.635.838	4.052.249
5	PAD terhadap PDRB	0,524	0,560	0,419	0,434	0,476	0,463

Sumber : DPKD Provinsi Sumatera Barat

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Perkembangan jumlah investor di Provinsi Sumatera Barat, merupakan hasil dari adanya kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat, di mana selama periode 2010-2015 cenderung berfluktuatif meningkat baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2010 jumlah investor PMDN sebanyak 158 investor meningkat menjadi 280 investor pada tahun 2015 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 24,4% per tahun. Nilai investasi PMDN meningkat dari Rp.398.269,06 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 3.185.075,82 juta pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah investasi PMDN di Sumatera Barat relatif tinggi dibandingkan dengan nilainya yang berarti ada perubahan skala investasi relatif kecil per unit proyek.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk jangka periode selama 5 tahun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Selain memuat visi dan misi daerah Provinsi Sumatera Barat, dokumen tersebut memuat pula prioritas pembangunan Sumatera Barat, yang merupakan kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan. Prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Prioritas 1: Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
- Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- Prioritas 5: Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
- Prioritas 6: Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.
- Prioritas 7: Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.
- Prioritas 8: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.
- Prioritas 9: Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.
- Prioritas 10: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Kesepuluh prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut sebagian besar telah selaras dengan TPB/SDGs, baik sasaran, arah kebijakan maupun program pembangunan yang dilakukan. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:



Tujuan 1: TANPA KEMISKINAN

3.1 Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 1 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kemiskinan**, telah tertuang dalam Prioritas ke-8 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu ***Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal***.

Dalam rangka mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, sasaran dan program pembanguna Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 *telah selaras* dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 2) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 3) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- 4) Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 1 terkait ***Menurunnya jumlah penduduk miskin***, adalah:

- 1) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 3) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 4) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- 5) Peningkatan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- 6) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
- 7) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 terkait ***Menurunnya jumlah penduduk miskin*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah;
- 3) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 4) Peningkatan Produksi dan Produktifitas;
- 5) Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM;
- 6) Pengembangan Perumahan;
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan;
- 8) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 1 terkait ***Menurunnya tingkat pengangguran terbuka***, adalah:

- 1) Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu;
- 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja;
- 4) Peningkatan hubungan industrial ketenagakerjaan;
- 5) Peningkatan kewirausahaan;
- 6) Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 terkait ***Menurunnya tingkat pengangguran terbuka*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha;

- 3) Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
- 4) Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja;
- 5) Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 1 terkait ***Menurunkan jumlah daerah tertinggal***, adalah:

- 1) Pemenuhan pembangunan pelayanan dasar pada daerah tertinggal;
- 2) Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah tertinggal.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 terkait ***Menurunkan jumlah daerah tertinggal tersebut***, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah;
- 2) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan;
- 4) Pengembangan perumahan;
- 5) Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
- 6) Pemulihan Daerah Pasca Bencana;
- 7) Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 1 terkait sasaran ***menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial***, adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan panti sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Peningkatan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 terkait ***menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut***, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup:

- 1) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pembinaan Anak Terlantar;
- 4) Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma;

- 5) Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar;
- 6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
- 7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- 9) Pemberdayaan Fakir Miskin.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	% (kondisi September 2015)	6,71	6,43	6,15	5,87	5,59	5,31	5,50
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Kesehatan, Dinas Kesehatan	% (kondisi 2015)	12,46	12,46	12,46	9,45	3,76	3,76	3,76
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Kesehatan, Dinas Kesehatan	% (kondisi 2015)	15,98	16,02	16,42	16,55	16,80	16,80	16,80
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Kesehatan, Dinas Kesehatan	Jumlah panti	2	2	2	2	2	2	2
	Total Coverage			66,20	73,96	81,72	89,48	100	100	100

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Kesehatan	%	87	87	88	89	90	90	90
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap ((kelompok penduduk 40% terbawah).)	Dinas Kesehatan	%	74,1	91	91,5	92	92,5	93	95
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Kesehatan	%	51,3	-	-	-	55,4	58,60	60,20

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	68	-	-	71	-	-	-
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	72	-	-	74	75	76	77
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	79	-	-	82	83	84	86
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Pendidikan	%	73,08 (2014)	73,35	73,60	73,85	74,10	74,35	74,60

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75	-	-	85	88	90	90
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Bappeda	%	-	51	-	-	-	-	55
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	%	75	-	-	75	75	75	75
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	-	75	75	75	75	75	75	75



Tujuan 2: TANPA KELAPARAN

3.2 Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 2 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kelaparan**, telah tertuang dalam Prioritas ke-5 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu ***Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis***.

Dalam rangka mewujudkan tanpa kelaparan, sasaran dan program pembanguna Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- 2) Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- 3) Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.
- 4) Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- 5) Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional,

serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian.

Upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan***, adalah:

- 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- 2) Peningkatan penguatan cadangan pangan;
- 3) Peningkatan keamanan pangan;
- 4) Peningkatan produksi pangan utama;
- 5) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- 6) Peningkatan peran kelembagaan pangan di pemerintahan dan masyarakat.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan*** tersebut, program pembangunan daerah yang dilaksanakan mencakup:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 2) Diversifikasi Pangan;
- 3) Peningkatan Produksi dan produktivitas;
- 4) Peningkatan Produksi dan Produktivitas;
- 5) Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis***, adalah:

- 1) Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah;
- 2) Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis dan minapolitan;
- 3) Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian dan perikanan;
- 4) Peningkatan usaha investasi pertanian dan perikanan;
- 5) Peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna pertanian dan perikanan;
- 6) Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul serta perluasan logistiknya;

- 7) Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian dan perikanan;
- 8) Pejangkauan jaringan pemasaran produk pertanian dan perikanan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup:

- 1) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan***, adalah:

- 1) Peningkatan produktivitas dan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan;
- 2) Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
Penumbuhan dan peningkatan olahan limbah organik;
- 3) Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan budidaya laut;
- 4) Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan;
- 5) Peningkatan pemanfaatan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 2 terkait ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup:

- 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas.

Target pencapaian indikator Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		Persentase	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	4,80	4,75	4,7	4,65	4,60	4,55	4,50
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	-	-	4,8	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	4,5
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pangan	%	83,70	-	-	85,20	85,80	86,40	87



Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3 Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Upaya untuk mencapai **Tujuan 3 TPB/SDGs, yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, telah tertuang dalam Prioritas ke-4 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*.

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, sasaran dan program pembanguna Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- 2) Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- 3) Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- 4) Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- 5) Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- 7) Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- 8) Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

- 3) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata***, adalah:

- 1) Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan;
- 3) Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas;
- 5) Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah;
- 6) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
- 7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- 8) Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
- 9) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia;
- 10) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan tuberculosis;
- 11) Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan;
- 12) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
- 13) Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi;
- 14) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan;
- 15) Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;
- 16) Peningkatan ketepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 5) Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular;
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- 9) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
- 10) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- 11) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- 12) Peningkatan Pelayanan BLUD ;
- 13) Standarisasi pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana***, adalah:

- 1) Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana;
- 2) Penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi remaja;
- 3) Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- 4) Penguatan koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- 5) Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- 6) Peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana,*** program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Keluarga Berencana;
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 3) Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
- 4) Peningkatan Pengendalian Kependudukan;
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,*** adalah:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pemanfaatannya oleh masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas atlit dan pelatih;
- 3) Peningkatan sumberdaya manusia olahraga pada sektor Pendidikan;
- 4) Peningkatan kompetisi olahraga;
- 5) Peningkatan dan pengembangan sistem penghargaan untuk atlit dan pelatih.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,*** program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 3) Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,*** adalah:

- 1) Keterampilan pemuda;
- 2) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 3) Peningkatan penguatan karakter dan jati diri pemuda;
- 4) Peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kepramukaan;
- 5) Peningkatan aktivitas kepemudaan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 terkait ***Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,*** program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 2) Peningkatan Penyadaran Kepemudaan

Target pencapaian indikator Tujuan 3 dapat dilihat pada tabel 3.3. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.3 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	87	-	-	89	90	90	90
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	87	87	88	89	90	90	90
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	74,1	91	91,5	92	92,5	93	95
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya;										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	100	100	45	47	50	52	55
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
3.4.2.(a)	Junmlah kabupaten/ kota yang memiliki RSUD (Puskesmas di Sumatera Barat belum menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa) yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	%	25	25	50	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan										
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Dinas Sosial	%	15,59	-	-	16,59	16,59	16,59	16,59
3.5.1 (c)	Jumlah korban penggunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosila di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial	%	15,59	-	-	16,59	16,59	16,59	16,59
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	51,30	-	-	-	55,40	58,60	60,20
3.7.2.*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	23,4	-	-	-	17,00	13,60	11,90

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	2,70	-	-	-	2,42	2,36	2,33
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	9,10	-	-	-	7,00	6,20	5,80
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	12,46	-	-	9,45	3,76	3,76	3,76
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	80	-	-	86	90	93	100

Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS

3.4 Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Upaya untuk mencapai **Tujuan 4 TPB/SDGs, yakni Pendidikan Berkualitas**, telah tertuang dalam Prioritas ke-3 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan*.

Dalam rangka mewujudkan **Pendidikan Berkualitas**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 3) Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan Teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- 5) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait *Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat*, adalah:

- 1) Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan dasar dan menengah;

- 2) Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 3) Penyediaan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif;
- 4) Peningkatan angka partisipasi murni pendidikan secara merata di setiap daerah;
- 5) Peningkatan ketersediaan SMA, SMK dan SMALB di daerah yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan pembangunan SMP-SMA satu atap; dan meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait *Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat* tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan
- 2) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
- 3) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait *Meningkatnya integritas peserta didik*, adalah:

- 1) Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan budaya sekolah;
- 2) Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada ranah afektif dalam peningkatan pendidikan karakter;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan untuk membina budi pekerti, akhlak, karakter, dan kepribadian peserta didik;
- 4) Pengembangan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter;
- 5) Peningkatan peran aktif siswa dan guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan proses pembelajaran dikelas sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik dan mendorong peserta didik untuk membentuk perilaku yang berkarakter di sekolah;

- 6) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, pendidikan jasmani serta kewirausahaan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya integritas peserta didik*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pendidikan Berkarakter.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan***, adalah:

- 1) Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
- 2) Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;
- 3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
- 4) Peningkatan pemerataan distribusi dan kualifikasi guru;
- 5) Peningkatan kualitas dan penerapan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi;
- 6) Peningkatan kualifikasi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tata usaha;
- 7) Peningkatan kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan dan tenaga tata usaha;
- 8) Peningkatan manajemen sekolah dan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan;
- 9) Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah;
- 2) Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;

- 4) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan;
- 5) Peningkatan SDM Pertanian;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja***, adalah:

- 1) Penguatan kompetensi keahlian di SMK untuk bidang-bidang aplikatif;
- 2) Penguatan kecakapan akademik siswa SMK untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
- 3) Pengembangan kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
- 4) Peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di dunia usaha dan dunia industry;
- 5) Penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, kimia, fisika dan pemecahan masalah serta bahasa inggris untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar pada era globalisasi;
- 6) Peningkatan kesiapan peserta didik SMA dan SMK untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada SMA.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah;
- 2) Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya minat baca dan budaya membaca***, adalah:

- 1) Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat;
- 2) Peningkatan efektifitas dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan;
- 4) Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi;

- 5) Peningkatan pustakawan yang professional dan bersertifikat;
- 6) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya minat baca dan budaya membaca*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi***, adalah:

- 1) Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbang;
- 2) Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah;
- 3) Pengembangan sistem inovasi daerah;
- 4) Pembangunan technopark sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 terkait ***Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan;
- 2) Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Penguatan Inovasi Daerah.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 dapat dilihat pada tabel 3.4. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	-	-	70,81	72,23	73,67	75,14	76,65	78,18	79,74
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA Sederajat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun.	-	-	-	8,59	8,66	8,72	8,79	8,85	8,92
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini (PAUD).	-	-	67,27	68,15	70,25	72,18	74,6	76,2	77,5
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan Teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /Sederajat.	Dinas Pendidikan	%	73,08 (2014)	73,35	73,60	73,85	74,10	74,35	74,60
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1.*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD/MI sederajat.	-	-	95,92	99,58	99,59	99,6	99,61	99,62	100
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/sederajat.	-	-	79,57	81,2	81,3	81,35	81,5	81,55	81,55
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA/SMK/ MA sederajat.	-	-	73,08	73,35	73,60	73,85	74,10	74,35	74,6

Tujuan 5: KESETARAAN GENDER

3.5 Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Upaya untuk mencapai **Tujuan 5 TPB/SDGs, yakni Kesenjangan Gender**, telah tertuang dalam Prioritas ke-4 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*.

Dalam rangka mewujudkan **Kesenjangan Gender**, sasaran dan program pembanguna Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 2) Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- 3) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.

Upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah (non state actors).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 5 terkait *Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak*, adalah:

- 1) Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

- 3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
- 4) Penguatan sistem data terpisah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan;
- 5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
- 6) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 5 terkait ***Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 2) Peningkatan Perlindungan Perempuan;
- 3) Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- 5) Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak;
- 6) Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Target pencapaian indikator Tujuan 5 dapat dilihat pada tabel 3.5. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ratio	50	-	48	47	46	45	44
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan										
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ratio	23,40	21,00	18,90	18,90	17,00	13,60	11,90
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Dinas Pendidikan	%	96,64 (2014)	96,88	97,11	97,34	97,57	97,80	98,03
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut										
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	9,10	8,30	7,60	7,60	7,00	6,20	5,80



Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

3.6 Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Upaya untuk mencapai **Tujuan 6 TPB/SDGs, yakni Air Bersih dan Sanitasi Layak**, telah tertuang dalam Prioritas ke-9 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur*.

Dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat dengan **Air Bersih dan Sanitasi Layak**, sasaran dan program pembanguna Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- 2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- 4) Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- 6) Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 6 terkait *Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air*, adalah:

- 1) Peningkatan fungsi kelembagaan dalam pengaturan sumberdaya air;

- 2) Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi partisipatif untuk meningkatkan produksi pangan;
- 3) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur irigasi;
- 4) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan infrastruktur konservasi sumber daya air;
- 5) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengendali daya rusak air (pantai, sungai).

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 terkait ***Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air***, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya;
- 2) Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
- 3) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 5) Penyediaan dan pengolahan air baku.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 6 terkait ***Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung***, adalah:

- 1) Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh;
- 2) Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase;
- 3) Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 terkait ***Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;l
- 3) Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi;
- 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

- 5) Pengembangan perumahan;
- 6) Pemberdayaan komunitas perumahan;
- 7) Pengelolaan Pertanahan;
- 8) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 dapat dilihat pada tabel 3.6. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	68	69	70	71	72	73	74
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minimum , aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	68	69	70	71	72	73	74
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(b)	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	72	72	73	74	75	76	77
6.2.1.(f)	Porporasi rumah tangga yang terlayani system pengelolaa air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	72	72	73	74	75	76	77
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	58,71	-	-	50	68	89	100
Target 6.6 Pada tahu 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.6.1.(d)	Jumlah lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	-	Ha	-	0,32	0,63	1,09	2,00	2,21	2,26



Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

3.7 Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Upaya untuk mencapai **Tujuan 7 TPB/SDGs, yakni Energi Bersih dan Terjangkau**, telah tertuang dalam Prioritas ke-9 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur*.

Dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat dengan **Energi Bersih dan Terjangkau**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target TPB/SDGs, yakni pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 2 terkait *Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)*, adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan investasi di bidang usaha energi baru dan terbarukan;
- 2) Peningkatan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik;
- 3) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah terisolir, terpencil dan perbatasan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 2 terkait *Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)* tersebut, program pemabangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
- 2) Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Target pencapaian indikator Tujuan 7 dapat dilihat pada tabel 3.7. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	83,38	85	88,57	92,16	95,01	96,26	97,00

3.8 Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya untuk mencapai Tujuan 8 TPB/SDGs, yakni **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, telah tertuang dalam Prioritas ke-6 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi*.

Terkait dengan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- 2) Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- 3) Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Upaya-upaya dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 8 terkait *Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah*, adalah:

- 1) Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis kluster;
- 2) Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial;
- 3) Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro;
- 4) Peningkatan pemberdayaan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi;

- 5) Penumbuhan koperasi sektor riil di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata;
- 6) Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan;
- 7) Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern, memasyarakatkan transaksi non tunai;
- 8) Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari;
- 9) Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM;
- 10) Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- 11) Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar;
- 12) Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha;
- 13) Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha;
- 14) Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- 15) Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil;
- 16) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 17) Peningkatan promosi dan pemasaran produk;
- 18) Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM binaan koperasi;
- 19) Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor;
- 20) Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor;
- 21) Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional;
- 22) Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri;
- 23) Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi;
- 24) Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa;
- 25) Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel;
- 26) Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 27) Peningkatan upaya promosi investasi;
- 28) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 29) Peningkatan pendapatan dari efektifitas pengelolaan BUMD;
- 30) Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 31) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha;

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 terkait *Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah* tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan kewilayahan industry;
- 2) Pengembangan industri kecil dan menengah;
- 3) Peningkatan Kualitas Produk Industri;
- 4) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- 5) Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi;
- 6) Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM;
- 7) Peningkatan Perlindungan konsumen;
- 8) Pengembangan perdagangan dalam negeri;
- 9) Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 10) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan terpadu;
- 12) Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 8 terkait *Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara*, adalah:

- 1) Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan memberi kemudahan akses;
- 2) Penyiapan destinasi untuk keperluan Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
- 3) Pengembangan destinasi wisata pada daerah strategis;
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
- 5) Penyediaan lahan pengembangan pariwisata yang siap dimanfaatkan (*clear and clean*);
- 6) Penyediaan konektivitas antar destinasi wisata;
- 7) Pengembangan pariwisata halal dan nuansa islami;
- 8) Peningkatan perilaku sadar wisata dan pelaksanaan sapta pesona
- 9) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
- 10) Peningkatan pengaturan, penguatan kelembagaan, keamanan dan kenyamanan kepariwisataan;
- 11) Pengembangan kualitas pelayanan kepariwisataan;
- 12) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan kuliner;
- 13) Pengembangan kegiatan berbasis budaya dan atraksi;

- 14) Peningkatan jejaring kerjasama produk kreatif;
- 15) Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi;
- 16) Peningkatan kemitraan pemasaran pariwisata;
- 17) Peningkatan citra pariwisata melalui konsep branding, advertising and selling.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 terkait ***Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata;
- 2) Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi;
- 3) Pengembangan industri kecil dan menengah;
- 4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 5) Pengembangan nilai-nilai budaya;
- 6) Peningkatan akses pemerataan dan mutu pendidikan menengah;
- 7) Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 8) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 9) Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah;
- 10) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 11) Pengelolaan Pertanahan;
- 12) Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 13) Pengembangan kelembagaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 14) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 15) Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah;
- 16) Pengembangan ekonomi kreatif;
- 17) Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM;
- 18) Pengembangan pemasaran pariwisata;
- 19) Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 dapat dilihat pada tabel 3.8. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1.(a)	PDRP per kapita	-	Rp. Juta	34,53	37,21	39,95	42,70	45,44	48,19	50,93
Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.										
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	orang	8,79	17,43	19,04	19,17	19,32	19,46	19,61
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	%	78,274	10,25	15,25	20,25	25,25	30,25	35,25
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	%	6.973	6,02	9,02	12,02	15,02	18,02	21,02



Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

3.9 Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Upaya untuk mencapai Tujuan 9 TPB/SDGs, yakni **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**, telah tertuang dalam Prioritas ke-6 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi*, Prioritas ke-9 yaitu *Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur*.

Terkait dengan **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- 2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Upaya-upaya dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 9 terkait *Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah*, adalah:

- 1) Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis kluster;
- 2) Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial;
- 3) Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro;
- 4) Peningkatan pemberdayaan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi;
- 5) Penumbuhan koperasi sektor riil di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata;

- 6) Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan
- 7) Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern, memasyarakatkan transaksi non tunai;
- 8) Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari;
- 9) Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM;
- 10) Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- 11) Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar;
- 12) Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha;
- 13) Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha
- 14) Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- 15) Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil;
- 16) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 17) Peningkatan promosi dan pemasaran produk;
- 18) Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM binaan koperasi;
- 19) Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor;
- 20) Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor;
- 21) Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional;
- 22) Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri;
- 23) Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi;
- 24) Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa;
- 25) Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel;
- 26) Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 27) Peningkatan upaya promosi investasi;
- 28) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 29) Peningkatan pendapatan dari efektifitas pengelolaan BUMD;
- 30) Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 31) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

Berdasarkan sasaran, dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 9 terkait ***Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan kewilayahan industri;
- 2) Pengembangan industri kecil dan menengah;
- 3) Peningkatan Kualitas Produk Industri;
- 4) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- 5) Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi;
- 6) Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM;
- 7) Peningkatan Perlindungan konsumen;
- 8) Pengembangan perdagangan dalam negeri;
- 9) Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 10) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan terpadu;
- 12) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 9 terkait ***Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi***, adalah:

- 1) Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi;
- 2) Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi;
- 3) Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah;
- 4) Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain);
- 5) Pengembangan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil;
- 6) Pengembangan layanan transportasi untuk mendukung pariwisata;
- 7) Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- 8) Pembangunan infrastruktur simpul transportasi (bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api);
- 9) Penyediaan dukungan pembangunan fasilitasi keselamatan kereta api;
- 10) Penguatan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum;
- 11) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perhubungan;
- 12) Penataan sistim perijinan transportasi.

Berdasarkan sasaran, dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 9 terkait ***Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah*** tersebut, program pembangunan daerah yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 2) Peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut;
- 4) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- 5) Peningkatan pelayanan angkutan;
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 7) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi.

Target pencapaian indikator Tujuan 9 dapat dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	91,13	70	71	72	73	74	75
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	BPS	%	10,97	11,19	11,42	11,65	11,87	12,10	12,33



Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

3.10 Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Upaya untuk mencapai Tujuan 10 TPB/SDGs, yakni **Berkurangnya Kesenjangan**, telah tertuang dalam Prioritas ke-6 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi*.

Terkait dengan **Berkurangnya Kesenjangan**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- 2) Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- 3) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- 4) Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- 5) Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- 6) Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- 7) Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

- 8) Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.
- 9) Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
- 10) Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 10 terkait ***Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah***, adalah:

- 1) Pengembangan dan peningkatan usaha industri berbasis kluster;
- 2) Pengembangan dan penumbuhan sentra industri potensial;
- 3) Pengembangan industri rumah tangga berbasis agro dan non agro;
- 4) Peningkatan pemberdayaan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi;
- 5) Penumbuhan koperasi sektor riil di bidang pertanian, perikanan, industri dan usaha kecil, pariwisata;
- 6) Penguatan penyediaan bahan baku industri kecil menengah unggulan;
- 7) Pemberdayaan usaha retail UMKM dan koperasi dengan manajemen modern, memasyarakatkan transaksi non tunai;
- 8) Pengembangan lembaga keuangan mikro di nagari;
- 9) Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM;
- 10) Peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- 11) Peningkatan kemitraan strategis antara UMKM dengan pengusaha besar;
- 12) Penguatan kapabilitas UMKM di bidang manajemen usaha;
- 13) Peningkatan akses dan kemudahan pembiayaan usaha;
- 14) Pengawasan barang yang diperdagangkan sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- 15) Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri kecil;
- 16) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 17) Peningkatan promosi dan pemasaran produk;
- 18) Pengembangan sistem informasi hasil produk UMKM binaan koperasi;
- 19) Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor;

- 20) Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor;
- 21) Penguatan kelembagaan dan kerjasama perdagangan regional dan internasional;
- 22) Pengembangan negara tujuan ekspor dan jejaring kerjasama perdagangan luar negeri;
- 23) Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi;
- 24) Peningkatan daya saing produk, tenaga kerja, dan jasa;
- 25) Penyusunan regulasi peningkatan pelayanan usaha yang lebih efisien, transparan dan akuntabel;
- 26) Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 27) Peningkatan upaya promosi investasi;
- 28) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 29) Peningkatan pendapatan dari efektifitas pengelolaan BUMD;
- 30) Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 31) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 10 terkait *Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah* tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Pengembangan kewilayahan industri;
- 2) Pengembangan industri kecil dan menengah;
- 3) Peningkatan Kualitas Produk Industri;
- 4) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- 5) Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi;
- 6) Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM;
- 7) Peningkatan Perlindungan konsumen;
- 8) Pengembangan perdagangan dalam negeri;
- 9) Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- 10) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan terpadu;
- 12) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Target pencapaian indikator Tujuan 10 dapat dilihat pada tabel 3.10. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini	RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	Indeks	0,319	0,331	0,330	0,329	0,328	0,328	0,327
10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Kemendes	Kabupaten	3	3	3	3	2	1	1
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	103.184 (org)	6,86	7,07	7,28	7,49	7,72	7,94



Tujuan 11: KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

3.11 Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Upaya untuk mencapai Tujuan 11 TPB/SDGs, yakni **Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**, telah tertuang dalam Prioritas ke-9 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur*.

Terkait dengan **Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target TPB/SDGs, yakni pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 11 terkait *Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung*, adalah:

- 1) Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh;
- 2) Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase;
- 3) Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan.

Berdasarkan saran dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 terkait *Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan* tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- 3) Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi;

- 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- 5) Pengembangan perumahan;
- 6) Pemberdayaan komunitas perumahan;
- 7) Pengelolaan Pertanahan;
- 8) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota.

Target pencapaian indikator Tujuan 11 dapat dilihat pada tabel 3.11. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.11 Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	79	1,2	1,35	1,41	1,48	1,56	-

Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

3.12 Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Upaya untuk mencapai Tujuan 12 TPB/SDGs, yakni **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab**.

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut merupakan isu utama dalam tujuan 12 untuk pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab untuk mewujudkan TPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barta telah menetapkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas yaitu: meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion; dan menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Kebijakan menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan : (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD adalah:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c. Program Pengelolaan Kawasan Lindung
- d. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut



Tujuan 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

3.13 Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Sumatera Barat belum mempersiapkan diri lebih maksimal untuk menghadapi perubahan iklim global yang akan berdampak terhadap peningkatan rasio debit maksimum dan minimum, ancaman banjir, longsor dan abrasi pantai. Kemudian Sumatera Barat juga perlu mempersiapkan diri lagi untuk menurunkan emisi dalam rangka mendukung program penurunan emisi nasional dan menerapkan konsep ekonomi hijau (*green economy*) dalam melaksanakan pembangunan.

Namun demikian, sudah tercantum dalam Sasaran 3 : Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan, dengan menerapkan strategi sebagaimberikut:

Strategi 1: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi ekosistem kawasan hutan dan lahan.

Strategi 2: Melakukan pemulihan dan pengamanan fungsi kawasan hutan dan lahan.

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah Pemulihan fungsi kawasan hutan dan lahan, penegakan hukum dibidang kehutanan serta peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim.



3.14 Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Upaya untuk mencapai Tujuan 14 TPB/SDGs, yakni **Ekosistem Lautan**, telah tertuang dalam Prioritas ke-10 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam..*

Terkait dengan **Ekosistem Lautan**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, yakni pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 14 terkait *Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan*, adalah:

- 1) Peningkatan peran serta dalam pengamanan kawasan hutan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan;
- 3) Peningkatan Pengawasan serta penertiban perizinan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- 4) Pemulihan fungsi kawasan hutan dan lahan, penegakan hukum dibidang kehutanan serta peningkatan upaya mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 terkait *Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut* tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan sistem pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu;
- 2) Peningkatan kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan pesisir dan laut.

Target pencapaian indikator Tujuan 14 dapat dilihat pada tabel 3.14. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan.	Kawasan	7	7	7	7	7	7	7



3.15 Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah/lembaga antara lain : (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan sasaran meningkatnya aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan; (2) Pengelolaan Kawasan Lindung (3) Pengelolaan Kawasan Lindung (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi daerah (5) Pengelolaan Kawasan Lindung; (6) Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan , (9) Pengelolaan Kawasan Lindung; (10) Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;(11) Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 15 dalam Buku Matriks RAN TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tujuan 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH.

3.16 Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Upaya untuk mencapai Tujuan 16 TPB/SDGs, yakni **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**, telah tertuang dalam Prioritas ke-2 Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan*.

Terkait dengan **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.**, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 telah selaras dengan target-target TPB/SDGs, sebagai berikut:

- 1) Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- 2) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- 3) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (*non state actors*).

Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan 16 terkait *Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan*, adalah:

- 1) Penetapan indikator kinerja daerah, perangkat daerah dan individu aparatur;
- 2) Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 3) Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- 4) Peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern;
- 5) Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
- 6) Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual;
- 7) Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8) Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement;

- 9) Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
- 10) Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public;
- 11) Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian;
- 12) Peningkatan penyediaan data statistik sectoral;
- 13) Peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah;
- 14) Peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi;
- 15) Penataan pemerintahan nagari desa/ kelurahan;
- 16) Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual;
- 17) Peningkatan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD);
- 18) Modrenisasi pengelolaan barang milik daerah;
- 19) Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa;
- 20) Penyusunan Peraturan pengelolaan pendapatan daerah;
- 21) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
- 22) Pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 23) Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah;
- 24) Penerapan tertib arsip daerah berbasis teknologi infomasi;
- 25) Penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap pemerintahan yang baik.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 terkait ***Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan*** tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
- 2) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat
- 3) Manajemen Perubahan
- 4) Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah
- 5) Pengelolaan Otonomi Daerah
- 6) Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
- 7) Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 8) Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah
- 9) Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan
- 10) Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
- 11) Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
- 12) Peningkatan pelayanan kedinasan

- 13) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 14) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
- 15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) Peningkatan Pendapatan Daerah
- 17) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 18) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 19) Peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
- 20) Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 21) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 22) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- 23) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan
- 24) Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
- 25) Penguatan kelembagaan Pemerintahan Nagari
- 26) Penguatan kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat
- 27) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari
- 28) Pembangunan Kawasan Perdesaan

Program Prioritas Lainnya :

- 1) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target pencapaian indikator Tujuan 16 dapat dilihat pada tabel 3.16. di bawah ini. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 8 Permen PN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 3.16 Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	15,86	15,36	14,86
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Setda (Biro Organisasi)	Predikat	-	BB	BB	BB	A	A	A
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	-	Skor 1-100	-	60-70	60-70	60-70	65-75	65-75	75-80

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Setda (Biro Organisasi)	%	100	100	100	100	100	100	100
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.2.(a)	Indeks Demokrasi Indonesia.	-	Indeks	67,46	65,22	65,84	66,46	67,07	67,69	68,31
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (Usia 0 - 18 tahun)	-	-	-	-	-	-	85	88	90



Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

3.17 Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global pada tujuan 17 untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 5 target, yang dijabarkan ke dalam 7 indikator.

Target-target tersebut adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional; mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains; mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik.

Tujuan 17 meliputi kebijakan penting yaitu: (1) peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat dan kabupaten/kota; (2) peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri (3) meningkatkan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri

Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Aksi Tujuan 17 yang tertuang pada matriks 2 diantaranya adalah (1) Program Kerjasama Pembangunan, dengan sasaran terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri, (2) kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri, (3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah (IKM);

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Sementara, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan secara *selfassessment*. Kedua mekanisme ini selanjutnya akan disinkronkan dan digabungkan untuk menjadi satu kesatuan laporan pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

4.1. Landasan Hukum

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-462-2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat, diatur mengenai mekanisme pemantauan evaluasi, dan pelaporan. Sebagaimana dinyatakan dalam Diktum kedua huruf e, bahwa Tim Koordinasi Daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Sementara pada tingkat kelompok kerja sebagaimana disebutkan dalam Diktum empat bahwa

kelompok kerja melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga kepada Tim Koordinasi Daerah.

4.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Pencapaian TPB/SDGs pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemantauan dan Evaluasi pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program serta mengukur dampak kebijakan dan program Pencapaian Target TPB/SDGs.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pencapaian TPB/SDGs adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai. Dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :

- 1) Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

- 2) Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 3) Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs selanjutnya.
- 4) Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs yang sedang berjalan.

4.3. Tujuan/Kegunaan Pemantauan Dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian target TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Pemantauan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB/SDGs, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Dua manfaat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs yaitu:

- 1) Manfaat terkait dengan operasional

Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB/SDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian TPB/SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian TPB/SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

2) Kegunaan terkait dengan kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB/SDGs, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.

4.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
- 3) Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2021.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

4.5. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

4.5.1. Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapaun alur pemantauan pelaksanaan TPB daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat



4.5.1.1. Alur Laporan

1) Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Propinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

2) Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Barta oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.

4.5.1.2. Alur Umpan Balik

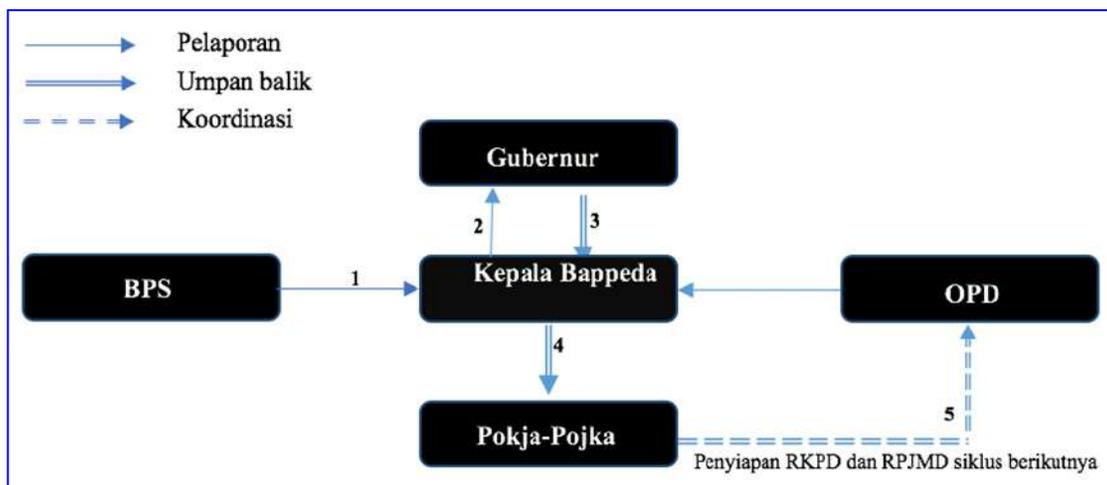
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewedahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB/SDGs yang dilaporkan oleh Gubernur

Sumatera Barta. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB/SDGs Nasional, Gubernur Sumatera Barat memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

4.5.2. Mekanisme Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahunan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB/SDGs yaitu tahun 2021. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGs serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barta. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Sumatera Barat ada sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Sumatera Barat



4.5.2.1. Alur laporan evaluasi

1) Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB/SDGs utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan

evaluasi diperoleh juga dari berbagai survai sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh OPD.

Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat untuk dikonsolidasikan.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

4.5.2.2. Alur Umpan Balik

1) Langkah 1

Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing OPD pada program dan kegiatan masing-masing.

4.6. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

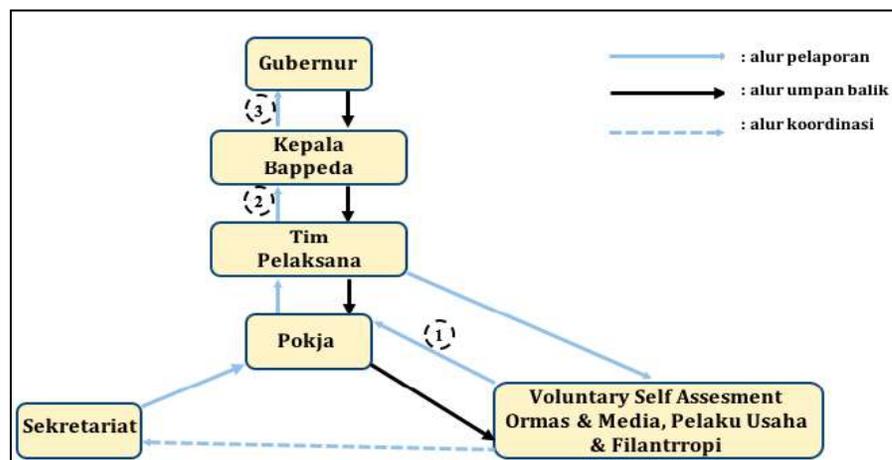
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Adapun alur informasi pemantauan dan evaluasi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :

Gambar 4.3.
Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Non-Pemerintah



4.6.1. Alur Laporan

1) Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Sumatera Barat.

2) Langkah 2

Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pelaksana.

3) Langkah 3

Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pengarah.

4.6.2. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk *secara ad hoc* oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari *stakeholders* berkaitan.

Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para *stakeholders*. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah.

Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para *stakeholders* untuk pencapaian TPB/SDGs yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.

4.7. Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB/SDGs telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi

informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB/SDGs Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 disusun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, hal ini sesuai dengan prinsip inklusif dan partisipatif dalam TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat berisi arah kebijakan dan target yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama dengan menekankan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal).

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RAD TPB/SDGs ini juga dilengkapi dengan lampiran Matrik Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat ini telah melalui proses pembahasan bersama pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat, namun sebagai sebuah dokumen yang bersifat terbuka maka masih diperlukan masukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		% (kondisi September 2015)	6,43	6,15	5,87	5,59		5,31	5,50		Susenas BPS
Program Prov											
Program Penanggulangan Kemiskinan										964.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1. Rakor TKPK bidang Pemberdayaan Masyarakat Tk. Prov. Sumbar; 2. Monitoring dan evaluasi Program Kemiskinan di Kab/Kota 3. Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan (Monev) LPG tabung 3 kg					1. 1 kali 2. 19 Kab/Kota 3. 19 Kab/Kota			164.000.000	Dinas PMD
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal		1. Data Desa/Nagari Tertinggal; 2. Sosialisasi IDM bagi Aparat Kab/Kota; 3. Rapat Teknis Kab/Kota 4. Pembinaan, Fasilitasi dan Monev					1. 1 dokumen 2. 50 orang 3. 1 kali 4. 14 kab/kota			250.000.000	Dinas PMD
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Sarana dan Prasarana pada Kawasan Perdesaan		1. Rapat Teknis 2. Sosialisasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan sarpras 3. Pembinaan, fasilitasi dan monev 4. Data kelompok masy dan SDM yang dimiliki					1. 1 kali 2. 50 orang 3. 1 kali 4. 14 kab/kota			350.000.000	Dinas PMD
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS)		1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dim Pengelolaan dan Pemanfaatan air minum & sanitasi Masyarakat. 2. Penilaian Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KP-SPAM) terbaik tingkat Sumatera Barat 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi percepatan Prog. Pamsimas 4. Inventarisasi pengelolaan sarana dan prasarana di perdesaan 6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana di perdesaan					1. 100 Orang 2. 10 KP-SPAMS 3. 19 Kab/Kota 4. 16 Kab.Kota 5. 19 Kab/Kota			100.000.000	Dinas PMD
Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kegiatan lingkungan mandiri pedesaan (LMP)		1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang LMP; 2. Sosialisasi Pemanfaatan SDA dan Lingkungan 3. Pembinaan dan monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan 4. Pembinaan dan monitoring pemanfaatan SDA dan Lingkungan di Perdesaan					1. 60 orang 2. 80 orang 3. 9 Kabupaten 4. 19 Kab/Kota			100.000.000	Dinas PMD
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan											
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		% (kondisi 2015)	12,46	12,46	9,45	3,76		3,76	3,76		Kesehatan, Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Program Prov											
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin										53.682.476.390	Dinas Kesehatan
Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	1. Workshop kemitraan jaminan kesehatan mandiri; 2. Peserta Workshop						1. 1 kali; 2. 76 orang			54.376.540	Dinas Kesehatan
Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah	1. Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ; 2. Peserta Pertemuan						1. 1 kali; 2. 57 orang			106.235.050	Dinas Kesehatan
Pembiayaan dan jaminan pelayanan kesehatan sumbar sakato (JKSS)	Peserta Jamkes Sumbar Sakato						651.555 jiwa Penduduk Miskin dan 505 jiwa penghuni panti Provinsi			53.521.864.800	Dinas Kesehatan
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		% (kondisi 2015)	16,02	16,42	16,55	16,80		16,80	16,80		Kesehatan, Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										2.497.444.500	Dinas Sosial
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Jumlah paket penyuluhan sosial melalui penyuluhan sosial keliling dan berbagai media						7 Paket			114.900.000	Dinas Sosial
Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial Se-Sumatera Barat	Jumlah peserta Bimbingan bagi pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat						50 Orang			56.872.000	Dinas Sosial
Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos Se Sumbar Dalam Rangka Akreditasi	Jumlah peserta Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos se Sumatera Barat Dalam Rangka Akreditasi						50 Orang			93.930.500	Dinas Sosial
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk.Sumbar	Jumlah peserta Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat						52 Orang			131.570.000	Dinas Sosial
KSN Expo Dan Award Dalam HKS	Keikutsertaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran KSN Expo dan Awards						1 Kegiatan			71.802.000	Dinas Sosial
Penguatan Nilai-Nilai KSN	Pelaksanaan Penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi						1 Kegiatan			171.878.000	Dinas Sosial
Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Dan Kab/Kota Se-Sumbar	Jumlah Peserta koordinasi LKKS se-Sumbar						200 Orang			621.848.000	Dinas Sosial
Penguatan Peran Pilar Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS						100 Orang			381.150.000	Dinas Sosial
Bimbingan Kapasitas Bagi TKSK Se-Sumbar	Jumlah peserta Bimbingan Kapasitas Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sumatera Barat						50 Orang			97.956.000	Dinas Sosial
Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Jumlah peserta pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat						50 Orang			54.550.000	Dinas Sosial
Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus Karang Taruna Se-Sumbar	Jumlah peserta Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus KT se- Sumatera Barat						50 Orang			57.346.000	Dinas Sosial
Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	Jumlah peserta Pertemuan FK-PSM se-Sumatera Barat						50 Orang			50.798.000	Dinas Sosial
Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan bagi PSM yang telah mengikuti pelatihan dasar						38 Orang			40.542.000	Dinas Sosial
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Jumlah peserta Pelatihan Dasar PSM						50 Orang			55.300.000	Dinas Sosial
Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	Jumlah peserta Penguatan Peran LKS Posdaya di Kab/Kota						960 Orang			497.002.000	Dinas Sosial

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)									949.430.000		Dinas Sosial
Pengadaan Kelengkapan (biaya Klien)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh biaya kelengkapan harian dalam panti					40 Orang			81.432.000		Dinas Sosial
Biaya Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	pengadaan obat-obatan					12 Bulan			11.400.000		Dinas Sosial
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti					40 Orang			390.036.000		Dinas Sosial
Pengadaan Makanan Dan Minuman	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti					40 Orang			466.562.000		Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar									2.970.220.620		Dinas Sosial
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti					180 Orang			618.614.012		Dinas Sosial
Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti					180 Orang			334.670.420		Dinas Sosial
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti					180 Orang			1.875.587.688		Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	pengadaan obat-obatan					12 Bulan			64.153.900		Dinas Sosial
Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Jumlah lanjut usia terlantar yang dapat dipulangkan dan memperoleh penguburan					12 Bulan			37.000.000		Dinas Sosial
Lanjut Usia Berkreasi	Jumlah lanjut usia yang ikut berkreasi					250 Orang			40.194.600		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin									4.817.384.209		Dinas Sosial
Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan beras					4000 Orang			2.971.357.300		Dinas Sosial
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Jumlah peserta seleksi KUBE dan pendamping berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat					38 Orang			156.994.100		Dinas Sosial
Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	Jumlah kelompok penerima Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)					20 Kelompok			463.605.400		Dinas Sosial
Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Jumlah kelompok penerima Bantuan KUBE untuk Pesisir dan Kepulauan					8 Kelompok			299.800.000		Dinas Sosial
Sosialisasi E-Warong Pedesaan	Jumlah peserta Sosialisasi Program dan Kegiatan E-Warong di Provinsi Sumatera Barat					50 Orang			86.779.900		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota					57 Orang			114.246.000		Dinas Sosial
Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah peserta bimbingan pemantapan bagi pendamping BPNT					60 Orang			119.553.309		Dinas Sosial
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Jumlah peserta bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator pemberdayaan fakir miskin					50 Orang			86.879.900		Dinas Sosial
Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Jumlah Kelompok penerima Bantuan Usaha melalui E Warong FM Perkotaan dan UMKM					6 Kelompok			225.678.400		Dinas Sosial
Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	Jumlah peserta Koordinasi Program dan Kegiatan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat					50 Orang			292.489.900		Dinas Sosial
79. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial									2.021.800.000		Biro Bintal Dan Kesra

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1. Pembinaan ; 2. penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2019					4 jenjang pendidikan (TK, SD, SMP/Mts, dan SMA/SMK/MA); 19 Kab/Kota		826.800.000		Biro Bintal dan Kesra
Rapat kerja daerah Tim pembina UKS tingkat provinsi Sumatera barat	Rakerda Tim pembina UKS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019					1 kali; 100 orang; 19 Kab/Kota		150.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan bidang kesejahteraan sosial	1. Rakor					1 kali; 102 orang		180.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanganan masalah sosial	1. Rakor; 2 Laporan					1 kali; 67 orang; 1 Rumusan Kebijakan		180.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan bidang kesehatan	1. Rakor; 2. Laporan					1 kali; 72 orang; 1 rumusan kebijakan		160.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	1. Rakor; 2. Laporan					1 kali; 100 orang; 1 rumusan kebijakan		125.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanganan bencana dan pasca bencana	Rakor, Rumusan Kebijakan					1 kali; 95 orang; 1 rumusan kebijakan		150.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Advokasi dan Supervisi Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS					1 (satu) Rumusan Kebijakan HIV dan AIDS, 150 Peserta		250.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		Jumlah panti	2	2	2	2	2	2		Kesehatan, Dinas Kesehatan
Program Prov										
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (Disabilitas)							293.159.750		Dinas Sosial
Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang dirujuk					12 Orang		128.303.500		Dinas Sosial
Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	Jumlah peserta Sosialisasi program penanganan ABH					50 Orang		69.672.500		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial					50 Orang		68.120.600		Dinas Sosial
Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	Jumlah peserta Sosialisai Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)					60 Orang		27.063.150		Dinas Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Eks Trauma	Pelayanan penyandang Disabilitas (Netra dan Grahita)							3.342.957.588		Dinas Sosial
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam panti					50 Orang		458.633.000		Dinas Sosial
Biaya Makan Dan Minuman Kelayan	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh makanan dan minuman					150 Orang		1.670.894.220		Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	Jumlah bahan obat-obatan yang disediakan					12 Bulan		21.601.800		Dinas Sosial
Biaya Kelengkapan Kelayan	Jumlah penyandang cacat dalam panti yang mendapatkan kelengkapan harian					150 Orang		357.393.000		Dinas Sosial
Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat retardasi mental dalam panti yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan					100 Orang		483.220.088		Dinas Sosial
Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan Bimbingan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas					1Kegiatan		22.130.130		Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)	Jumlah peserta bimbingan dan Pelatihan keterampilan terhadap penyandang Disabilitas melalui LB					15 Orang		113.422.850		Dinas Sosial
Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli kepada Penyandang Disabilitas					52 Orang		83.103.000		Dinas Sosial

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Jumlah peserta Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK yang berada di Provinsi Sumatera Barat					68 Orang			132.559.500		Dinas Sosial
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro											
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah).	%		87	88	89	90	90	90			Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja									500.000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap OPD KB Kab/Kota, Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja					4 Kab			500.000		
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap ((kelompok penduduk 40% terbawah).)	%		91	91,5	92	92,5	93	95			Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)									2.365.080.194		Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Tuberculosis (TB)	Terlaksananya pertemuan Monitoring dan Evaluasi tuberculosis (TB)					76 Orang			164.315.897		Dinas Kesehatan
Peningkatan kapasitas SDM untuk penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV/AIDS Komprehensif Berkesinambungan					19 Kab/Kota			281.812.386		Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Serviks	Terlaksananya Pelatihan Petugas layanan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks					19 Kab/Kota			236.585.525		Dinas Kesehatan
Workshop Teknis Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	Terlaksananya Pelatihan Teknis Program Kesehatan Jiwa dan Napza					19 Kab/Kota			120.130.400		Dinas Kesehatan
Workshop Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya workshop Penemuan Faktor Resiko penyakit tidak menular (PTM)					7 kali total peserta 380 orang			309.974.000		Dinas Kesehatan
Monitoring & Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	Laporan Evaluasi Program Surveillance dan Imunisasi					1 jenis dokumen			164.422.250		Dinas Kesehatan
Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Penyakit Menular yang dicegah dan ditanggulangi					8 penyakit menular langsung dan 6 penyakit menular bersumber binatang			322.520.000		Dinas Kesehatan
Workshop imunisasi Pengelola Kab/Kota	Terlaksananya workshop pengelola imunisasi Kab/Kota					1 kali peserta 19 kabupaten/kota			36.464.900		Dinas Kesehatan
Sosialisasi Imunisasi dengan LS (Lintas Sektor) dan LP (Lintas Program) Terkait	Sosialisasi Imunisasi dengan Ls dan LP terkait					19 Kab/Kota			23.844.000		Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M)	Terlaksananya bimbingan teknis program pengendalian penyakit menular (P2M)					19 kab/kota			458.322.600		Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Pertemuan Surveillance Dan KLB	Terlaksananya Penyusunan perencanaan dan evaluasi program Surveilans					19 kab/kota			126.585.525		Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM (Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular)	Terlaksananya Pertemuan Monitoring & Evaluasi Program P2PTM					19 kab/kota			120.102.711		Dinas Kesehatan
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah).		%	-	-	-	55,4	58,60	60,20			Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Keluarga Berencana									97.949.500		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional	Mengikuti Rangkaian Kegiatan Peringatan HARGANAS, Terlaksananya Seminar Ketahanan Keluarga, Penyerahan Hadiah Lomba KK Model					3 KK Model ASN			500.000		DPPKBKPS
Komunikasi, Informasi dan edukasi KB	Penyebarluasan Informasi tentang Progran KKBPK					Dialog interaktif 1 kali, 2 x rapat = 50 Orang			500.000		DPPKBKPS
Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan di kampung KB sesuai dengan kearifan lokal					3 Kampung KBKK dan 2 X rapat = 90 Orang			95.000.000		DPPKBKPS
Pembinaan Pelayanan KB	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB, Terlaksananya Advokasi dalam rangka Pembinaan Pelayanan KB					19 kab/ kota, 50 orang 2 hari			500.000		DPPKBKPS
Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	Peningkatan Kapasitas pembinaan , penilaian kesatuan gerak PKK-KB-KES Pemberian penghargaan kepada pelaksana terbaik pelaksana kesatuan gerak PKK-KB-KES					19 Kab/ Kota			1.449.500		DPPKBKPS
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40% terbawah).		%	-	-	71	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov											
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya									33.927.000.000		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan Embung Tambangan Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			1.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			5.000.000.000		Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Bukittinggi	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh			1.000.000.000		Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Sungai Dareh	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh			1.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Sijonie Nagari Pamuatan	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			4.000.000.000		Dinas PSDA
Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Embung	Tersedianya angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan Embung					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Sungai Putih	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	
Kajian Lingkungan Embung Rawang Gunung Malelo	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Tanah Kareh	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Aia Tawa	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Lakuak	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Bukik Sianik	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Okak Tarung-Tarung	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Cirubuih	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Aia Taganang	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sungai Aru	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Muko Banda	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Banca Rumbai	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sungai Singkek	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Ranah Paitan	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Samurai	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Talago	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Ngalau Batu	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Lurah Dalam	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Muaro Padang	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Limau Manih	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Aro	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Sabai Nan Aluih	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Bintungan	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Jolu	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Telaga Biruhun	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
Revitalisasi Embung Canduang Koto Laweh	Terlaksananya revitalisasi embung					1 Unit			2.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Payo Gadang	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			3.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Ganting	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			4.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Malako	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			3.500.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Kandih Bukik Kandung	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			2.227.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Batu Licin Kab. 50 Kota	Terlaksanya SID Embung Batu Licin Kabupaten 50 Kota					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sarasah Kab. Agam	Terlaksananya SID Embung Sarasah Kab. Agam					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sironjong Sati	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PSDA
Rehabilitasi Embung Ulu Aia	Terlaksananya rehabilitasi embung					1 Unit			200.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Pincuran Copu Jorong	Terlaksananya pembangunan embung					0 Unit			200.000.000		Dinas PSDA
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (kelompok penduduk 40% terbawah).	%				74	75	76	77			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov											
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah									2.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	Terfasilitasinya pendampingan teknis Program Sanimas IDB dan PPSP					129 lokasi			400.000.000		Dinas PU PR
Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat	Terfasilitasinya Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat					1 Paket			200.000.000		Dinas PU PR
Update Database Sanitasi	Tersedianya Data Base Sanitasi					1 Unit			200.000.000		Dinas PU PR
Penyusunan Studi Kelayakan IPAL Regional	tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan IPAL Regional					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PU PR

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya DED Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PU PR
Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PU PR
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur TPA Regional	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Dan Prasaran Infrastruktur TPA Regional					-				500.000.000		Dinas PU PR
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan										28.500.000.000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Updating Database Kawasan Kumuh	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat					1 dokumen				1.500.000.000		Dinas Perkimtan
Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 dokumen				3.900.000.000		Dinas Perkimtan
Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 lokasi				19.000.000.000		Dinas Perkimtan
Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan MBR	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 lokasi				2.500.000.000		Dinas Perkimtan
Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum MBR	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 dokumen				600.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan Kumuh	Terdatanya PSU di Kawasan Kumuh					1 dokumen				500.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan MBR	Terdatanya PSU di Kawasan MBR					1 dokumen				500.000.000		Dinas Perkimtan
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah).	%		-	-	82	83		84	86			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov												
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan										28.500.000.000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	Meningkatnya rumah tangga bersanitasi											
Updating Database Kawasan Kumuh	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat					1 dokumen				1.500.000.000		Dinas Perkimtan
Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 dokumen				3.900.000.000		Dinas Perkimtan
Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 lokasi				19.000.000.000		Dinas Perkimtan
Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan MBR	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 lokasi				2.500.000.000		Dinas Perkimtan
Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum MBR	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 dokumen				600.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan Kumuh	Terdatanya PSU di Kawasan Kumuh					1 dokumen				500.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan MBR	Terdatanya PSU di Kawasan MBR					1 dokumen				500.000.000		Dinas Perkimtan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah).	%		73,35	73,60	73,85	74,10		74,35	74,60			Dinas Pendidikan
Program Prov												

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah										125.581.309.550		Dinas Pendidikan
Pembangunan Laboraturium IPA SMA	Ruang Laboraturium IPA SMA yang dibangun					1 paket				433.713.400		Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat	Pagar Lingkungan Sekolah 725 m					1 paket				250.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat	Lanjutan pembangunan rumah dinas guru					2 unit				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat yang akan dibangun					1 Paket				1.741.022.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang akan dibangun					1 unit				1.563.297.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Fasilitas Gedung SMA yang akan dibangun					1 paket				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					1 paket				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun					2 paket				1.030.820.200		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					3 Paket				1.030.820.200		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok	Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok yang akan dibangun					1 unit				1.556.697.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar	Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar yang dibangun					1 unit				2.031.197.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat (Keberbakatan Olahraga)	Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat yang dibangun					1 unit				2.029.620.100		Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA di Kab. Kep. Mentawai	Rumah Dinas Guru SMA yang dibangun sebanyak 5 unit/10 kopel di Kab. Kep. Mentawai					5 sekolah				3.057.793.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Gallery SMA, SMK, dan SLB	Ruang Gallery SMA, SMK dan SLB yang dibangun dengan ukuran 12 m x 7 m = 84 m					1 paket				433.713.400		Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	Sarana Prasarana SMA					1 paket				37.103.872.250		Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMK se Sumatera Barat					95 Sekolah				70.138.500.000		Dinas Pendidikan
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Padang yang akan dibangun					1 paket				930.240.000		Dinas Pendidikan
Persentase penduduk umur 0 -17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah).	%				85	88		90	90			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro												
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	%			51	-	-	-	-	55			Bappeda
Program Prov												
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana										5.844.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Nagari/Desa/Kelurahan Tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (Kabupaten/Kota)					10				1.360.000.000		BPBD
Peningkatan Dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Honorarium dan Operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia (Orang)					60				1.633.000.000		BPBD

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Peningkatan Simulasi Dan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan yang terlaksana (orang)					450				765.000.000		BPBD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah TRC provinsi/Kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (Provinsi/Kab/Kota)					20				388.000.000		BPBD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Forum PRB provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (Provinsi/Kab/Kota)					17				486.000.000		BPBD
Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (orang)					200				453.000.000		BPBD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Honorarium dan operasional anggota unsur pengarah BPBD yang tersedia (orang)					11				759.000.000		BPBD
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana									971.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah Koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)					20				607.000.000		BPBD
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)					20				364.000.000		BPBD
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		%	-	-	75	75		75	75			Dinas Sosial
Program Prov												
Program Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial										847.926.580		Dinas Sosial
Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantapan Tim TRC Bencana Alam					50 Orang				85.041.200		Dinas Sosial
Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam					50 Orang				82.829.200		Dinas Sosial
Bantuan Logistik Bencana	Pengadaan Bantuan Logistik Bencana Alam					1 Kegiatan				100.917.000		Dinas Sosial
Pertemuan Pendamping dan Operator PKH	Jumlah peserta Pertemuan pendamping Program Keluarga Harapan					43 Orang				61.053.960		Dinas Sosial
Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan PKH					34 Orang				60.535.980		Dinas Sosial
Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi					52 Orang				82.262.280		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Jumlah peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam					50 Orang				82.829.200		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Jumlah peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial					50 Orang				64.279.200		Dinas Sosial
Rakor Bencana Sosial	Jumlah peserta Rakor Bencana Sosial Tk. Provinsi Sumatera Barat					62 Orang				83.593.000		Dinas Sosial
Konsinyering Koordinator PKH Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Konsinyering Program Keluarga Harapan					57 Orang				84.710.280		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Bimtek Program Keluarga Harapan					40 Orang				59.875.280		Dinas Sosial
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		%	75	75	75	75		75	75			
Program Prov												
Program Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial										847.926.580		Dinas Sosial
Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantapan Tim TRC Bencana Alam					50 Orang				85.041.200		Dinas Sosial

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	
Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam					50 Orang			82.829.200		Dinas Sosial
Bantuan Logistik Bencana	Pengadaan Bantuan Logistik Bencana Alam					1 Kegiatan			100.917.000		Dinas Sosial
Pertemuan Pendamping dan Operator PKH	Jumlah peserta Pertemuan pendamping Program Keluarga Harapan					43 Orang			61.053.960		Dinas Sosial
Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan PKH					34 Orang			60.535.980		Dinas Sosial
Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi					52 Orang			82.262.280		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Jumlah peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam					50 Orang			82.829.200		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Jumlah peserta Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial					50 Orang			64.279.200		Dinas Sosial
Rakor Bencana Sosial	Jumlah peserta Rakor Bencana Sosial Tk. Provinsi Sumatera Barat					62 Orang			83.593.000		Dinas Sosial
Konsinyering Koordinator PKH Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Konsinyering Program Keluarga Harapan					57 Orang			84.710.280		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Pendamping Program Keluarga Harapan	Jumlah peserta Bimtek Program Keluarga Harapan					40 Orang			59.875.280		Dinas Sosial

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persentase		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Program Prov											
Program Diversifikasi Pangan										1.882.933.000	Dinas Pangan
Pemantauan, Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Terlaksananya pengumpulan data konsumsi pangan masyarakat di kabupaten/kota; 2. Terlaksananya pengolahan data dan analisa data konsumsi pangan masyarakat; 3. Terlaksananya sosialisasi Pola pangan harapan (PPH); 4. Tersedianya data hasil analisa konsumsi pangan masyarakat berupa buku Pola Pangan Harapan (PPH)						20 buku laporan			80.000.000	Dinas Pangan
Pameran Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Dalam Rangka HKG-BKK	Terlaksananya Pameran Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal						1 kali			98.720.000	Dinas Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	1. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan, ternak kecil); 2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui pertemuan, media cetak dan media luar ruangan						5 buku laporan, 3 kali pertemuan, 750 orang, 22 paket instalasi hidroponik, 16 Bh Baliho, 5000 Lbr Leaflet, 5000 Lbr Poster, 1 Paket Video Dokumenter			1.239.213.000	Dinas Pangan
Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA	Terlaksananya Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi yang diikuti oleh utusan TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Barat dan utusan Sumatera Barat mengikuti Lomba di Tingkat Nasional						1 kali, 5 buah buku laporan, 5 buah buku resep, 1 kali pertemuan koordinasi (50 org)			190.000.000	Dinas Pangan
Pengembangan Pangan Tradisional (lokal) Dalam Menunjang Pariwisata	- Terlaksananya lomba pengolahan pangan lokal tingkat Prov Sumbar dan bantuan kelengkapan outlet pangan lokal						Ditetapkan 5 pemenang tingkat provinsi, 5 buah trophy, 2 paket outlet pangan lokal, 1 kali tilik pembelajaran pengembangan pangan lokal daam menunjang pariwisata			200.000.000	Dinas Pangan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)						5 buku Laporan, 1.750 batang bibit sukun,			75.000.000		Dinas Pangan
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%		4,75	4,7	4,65	4,60		4,55	4,50		Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Perbaikan Gizi Masyarakat									2.552.852.400		Dinas Kesehatan
Quick Respon Pemantauan Pelaksanaan TFC	Terlaksananya Quick Respon Pemantauan Pelaksanaan TFC					19 Kab/Kota			123.678.400		Dinas Kesehatan
Percepatan peningkatan gizi masyarakat di daerah bermasalah gizi	Terlaksananya Percepatan peningkatan gizi masyarakat di daerah bermasalah gizi					2 Kali Pertemuan, 40 Orang			300.000.000		Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program Gizi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Gizi ke Kab/Kota					19 Kab/Kota			165.923.000		Dinas Kesehatan
Pengadaan PMT KEK Bumil untuk Daerah Stunting (DAK)	Terlaksananya Pengadaan PMT KEK Bumil untuk Daerah Stunting					3 Kab/Kota			1.963.251.000		Dinas Kesehatan
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.			4,75	4,70	4,65	4,60		4,55	4,5		
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%		-	-	85,20	85,80		86,40	87		Dinas Pangan
Program Prov											
Program Diversifikasi Pangan									1.882.933.000		Dinas Pangan
Pemantauan, Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Terlaksananya pengumpulan data konsumsi pangan masyarakat di kabupaten/kota; 2. Terlaksananya pengolahan data dan analisa data konsumsi pangan masyarakat; 3. Terlaksananya sosialisasi Pola pangan harapan (PPH); 4. Tersedianya data hasil analisa konsumsi pangan masyarakat berupa buku Pola Pangan Harapan (PPH)					20 buku laporan			80.000.000		Dinas Pangan
Pameran Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Dalam Rangka HKG-BKK	Terlaksananya Pameran Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal					1 kali			98.720.000		Dinas Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	1. Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan, ternak kecil); 2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui pertemuan, media cetak dan media luar ruangan					5 buku laporan, 3 kali pertemuan, 750 orang, 22 paket instalasi hidroponik, 16 Bh Baliho, 5000 Lbr Leaflet, 5000 Lbr Poster, 1 Paket Video Dokumenter			1.239.213.000		Dinas Pangan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA						1 kali, 5 buah buku laporan, 5 buah buku resep, 1 kali pertemuan koordinasi (50 org)			190.000.000		Dinas Pangan
Pengembangan Pangan Tradisional (lokal) Dalam Menunjang Pariwisata						Ditetapkan 5 pemenang tingkat provinsi, 5 buah trophy, 2 paket outlet pangan lokal, 1 kali tilik pembelajaran pengembangan pangan lokal daam menunjang pariwisata			200.000.000		Dinas Pangan
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)						5 buku Laporan, 1.750 batang bibit sukun,			75.000.000		Dinas Pangan

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%		-	-	89	90		90	90		Dinas Kesehatan
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%		87	88	89	90		90	90		Dinas Kesehatan
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.											
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%		91	91,5	92	92,5		93	95		Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)										2.365.080.194	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Tuberculosis (TB)	Terlaksananya pertemuan Monitoring dan Evaluasi tuberculosis (TB)						76 Orang			164.315.897	Dinas Kesehatan
Peningkatan kapasitas SDM untuk penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV/AIDS Komprehensif Berkesinambungan						19 Kab/Kota			281.812.386	Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Serviks	Terlaksananya Pelatihan Petugas layanan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks						19 Kab/Kota			236.585.525	Dinas Kesehatan
Workshop Teknis Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	Terlaksananya Pelatihan Teknis Program Kesehatan Jiwa dan Napza						19 Kab/Kota			120.130.400	Dinas Kesehatan
Workshop Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya workshop Penemuan Faktor Resiko penyakit tidak menular (PTM)						7 kali total peserta 380 orang			309.974.000	Dinas Kesehatan
Monitoring & Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	Laporan Evaluasi Program Surveillance dan Imunisasi						1 jenis dokumen			164.422.250	Dinas Kesehatan
Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Penyakit Menular yang dicegah dan ditanggulangi						8 penyakit menular langsung dan 6 penyakit menular bersumber binatang			322.520.000	Dinas Kesehatan
Workshop imunisasi Pengelola Kab/Kota	Terlaksananya workshop pengelola imunisasi Kab/Kota						1 kali peserta 19 kabupaten/kota			36.464.900	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Imunisasi dengan LS (Lintas Sektor) dan LP (Lintas Program) Terkait	Sosialisasi Imunisasi dengan Ls dan LP terkait						19 Kab/Kota			23.844.000	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M)	Terlaksananya bimbingan teknis program pengendalian penyakit menular (P2M)						19 kab/kota			458.322.600	Dinas Kesehatan
Pertemuan Surveillance Dan KLB	Terlaksananya Penyusunan perencanaan dan evaluasi program Surveilans						19 kab/kota			126.585.525	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM (Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular)	Terlaksananya Pertemuan Monitoring & Evaluasi Program P2PTM						19 kab/kota			120.102.711	Dinas Kesehatan
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabalkan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya;											
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%		100	45	47	50		52	55		Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Program Prov											
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)										2.365.080.194	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Tuberculosis (TB)	Terlaksananya pertemuan Monitoring dan Evaluasi tuberculosis (TB)						76 Orang			164.315.897	Dinas Kesehatan
Peningkatan kapasitas SDM untuk penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV/AIDS Komprehensif Berkesinambungan						19 Kab/Kota			281.812.386	Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Serviks	Terlaksananya Pelatihan Petugas layanan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks						19 Kab/Kota			236.585.525	Dinas Kesehatan
Workshop Teknis Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	Terlaksananya Pelatihan Teknis Program Kesehatan Jiwa dan Napza						19 Kab/Kota			120.130.400	Dinas Kesehatan
Workshop Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya workshop Penemuan Faktor Resiko penyakit tidak menular (PTM)						7 kali total peserta 380 orang			309.974.000	Dinas Kesehatan
Monitoring & Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi	Laporan Evaluasi Program Survelance dan Imunisasi						1 jenis dokumen			164.422.250	Dinas Kesehatan
Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Penyakit Menular yang dicegah dan ditanggulangi						8 penyakit menular langsung dan 6 penyakit menular bersumber binatang			322.520.000	Dinas Kesehatan
Workshop imunisasi Pengelola Kab/Kota	Terlaksananya workshop pengelola imunisasi Kab/Kota						1 kali peserta 19 kabupaten/kota			36.464.900	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Imunisasi dengan LS (Lintas Sektor) dan LP (Lintas Program) Terkait	Sosialisasi Imunisasi dengan Ls dan LP terkait						19 Kab/Kota			23.844.000	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M)	Terlaksananya bimbingan teknis program pengendalian penyakit menular (P2M)						19 kab/kota			458.322.600	Dinas Kesehatan
Pertemuan Surveillance Dan KLB	Terlaksananya Penyusunan perencanaan dan evaluasi program Surveilans						19 kab/kota			126.585.525	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM (Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular)	Terlaksananya Pertemuan Monitoring & Evaluasi Program P2PTM						19 kab/kota			120.102.711	Dinas Kesehatan
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
Junmlah kabupaten/ kota yang memiliki RSUD (Puskesmas di Sumatera Barat belum menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa) yang menyelenggara-kan upaya kesehatan jiwa.	%		25	50	100	100		100	100		Dinas Kesehatan
Program Prov											
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										19.865.756.833	Dinas Kesehatan
Penilaian Puskesmas Berprestasi Dan Tenaga Kesehatan Teladan	Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi dan tenaga kesehatan teladan						6 Puskesmas tenaga teladan			368.550.150	Dinas Kesehatan
Pertemuan Kesmas Dan Rujukan	Terlaksananya Pertemuan koordinasi program Kesmas dan Rujukan						191 Orang			166.005.049	Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Siaga Dan Tindak Siaga Medik	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik						12 bulan			6.037.748.747	Dinas Kesehatan
Pemantauan Dan Pengamanan Makanan (food Security)	Terlaksananya pemantauan kualitas laboratorium Puskesmas dan Rs Se Sumatera Barat						6 kali			229.990.000	Dinas Kesehatan
Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan Sebagai Labor Rujukan	Terlaksananya pemantauan kualitas laboratorium Puskesmas dan Rs Se Sumatera Barat						19 Kab/Kota			115.386.456	Dinas Kesehatan
Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium	Terlaksananya kualitas udara dan air di Sumbar						110/65 titik pelanggan			230.604.250	Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Pertemuan Petugas Laboratorium Kab/Kota Dan RS	Terlaksananya pertemuan petugas laboratorium kab/kota dan RS					59 Org			68.409.274	Dinas Kesehatan
Pembinaan Dan Pemantauan Sebagai Laboratorium Rujukan Uji Silang	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan sebagai Laboratorium rujukan uji silang pada daerah binaan					19 Kab/Kota			67.040.000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik Pasien Dan Petugas Di UPTD	Terlaksananya pengadaan logistik pasien dan petugas di UPTD					12 bulan			1.163.306.100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tim P3K	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tim P3K					Event nasional Provinsi,tour de singkarak,Kunjungan kenegaraan			691.265.000	Dinas Kesehatan
Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM Dan Pelkes	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM & Pelkes					25 Org			207.843.450	Dinas Kesehatan
Kesiapsiagaan Bencana Dan Pemantauan Daerah Pra Dan Pasca Bencana	Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan Pasca Bencana					19 Kab/Kota			127.172.500	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah Dan PNS	Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah dan PNS					120 Org Anak Sekolah dan 80 Orang PNS			70.066.400	Dinas Kesehatan
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Paru	Terlaksananya Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Paru					80 orang			159.649.250	Dinas Kesehatan
Pelatihan Teknis Assesmen IPWL Dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL	Terlaksananya Pelatihan Teknis Assesment IPWL dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL					1 Kali untuk 32 Orang			79.715.050	Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya pelayanan kesehatan haji					19 kab/kota			160.282.900	Dinas Kesehatan
Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Primer	Terlaksananya program yankes primer					19 kab/kota			157.001.400	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	Terlaksananya pengelolaan BPRS					19 kab/kota			362.084.400	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Makanan, Minuman dan Parcel	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Makanan, Minuman dan Parcel					1 kegiatan			163.578.000	Dinas Kesehatan
Workshop Makanan Jajanan Anak Sekolah bagi Pengelola Program Kab/Kota	Terlaksananya Workshop Makanan Jajanan Anak Sekolah bagi Pengelola Program Kab/Kota					19 kab/kota			56.818.000	Dinas Kesehatan
Akreditasi Laboratorium Kesehatan ISO 17025 dan ISO 15189	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan ISO 17025 dan ISO 15189					1 kegiatan			159.700.000	Dinas Kesehatan
Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya pelayanan kesehatan tradisional					19 kab/kota			286.700.000	Dinas Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab/Kota					19 kab/kota			182.751.800	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga					19 kab/kota			95.980.000	Dinas Kesehatan
Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja Dan Olah Raga	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja dan olahraga					19 kab/kota			135.534.050	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas bagi Kab/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas bagi Kab/Kota					19 kab/kota			284.918.380	Dinas Kesehatan
Bimbingan dan Monitoring Program dan Registrasi FKTP	Terlaksananya Bimbingan dan Monitoring Program dan Registrasi FKTP					19 kab/kota			104.407.500	Dinas Kesehatan
Workshop program Akreditasi FKTP	Terlaksananya Workshop program Akreditasi FKTP					19 kab/kota			357.308.000	Dinas Kesehatan
Persiapan UPTD BKOM Pelkes Menuju BLUD	Terlaksananya Persiapan UPTD BKOM Pelkes Menuju BLUD					1 kegiatan			105.102.050	Dinas Kesehatan
Penguatan Kapasitas Program Yankes Rujukan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Program Yankes Rujukan					2 Kali Pertemuan, 2 Kali Workshop untuk 19 Kab/Kota			389.026.100	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Yankes Rujukan					19 kab/kota			373.572.000	Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Orientasi Pelayanan BBL (Bayi Baru Lahir) Terintegrasi	Terlaksananya Orientasi Pelayanan BBL Terintegrasi					19 kab/kota			109.798.315		Dinas Kesehatan
Akselerasi Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) - AKB (Angka Kematian Bayi) Didaerah Fokus	Terlaksananya Akselerasi penurunan AKI-AKB didaerah fokus					19 kab/kota			398.117.750		Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil					24 lokasi			2.876.343.200		Dinas Kesehatan
Workshop Pra Dan Pasca Bencana 19 Kab/Kota Dan RS	Terlaksananya workshop pra dan pasca bencana di 19 kab/kota dan rs					1 kegiatan			26.407.162		Dinas Kesehatan
Pembinaan UKM Program Kesga Gizi	Terlaksananya Pembinaan UKM Program Kesga Gizi					19 kab/kota			312.500.000		Dinas Kesehatan
Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP tingkat Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP tingkat Provinsi					19 kab/kota			251.930.000		Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik di tingkat Provinsi	Terlaksananya Evaluasi DAK Non Fisik di tingkat Provinsi					19 kab/kota			217.786.000		Dinas Kesehatan
Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas	Terlaksananya Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas					19 kab/kota			293.959.000		Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Provinsi					19 kab/kota			67.706.500		Dinas Kesehatan
Rujukan Spesimen	Terlaksananya Rujukan Spesimen					1 kegiatan			250.000.000		Dinas Kesehatan
Penjaringan Screening Indra ke Kab/Kota oleh BKIM	Terlaksananya Penjaringan Screening Indra ke Kab/Kota oleh BKIM					1 kegiatan			250.000.000		Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan UKM Sekunder	Terlaksananya Pertemuan Penguatan UKM Sekunder					19 kab/kota			375.000.000		Dinas Kesehatan
Pengawasan dan Pembinaan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan RS	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan RS					Kab/Kota			250.000.000		Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat Provinsi					19 kab/kota			195.822.500		Dinas Kesehatan
Penilaian Dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu Dan Bayi, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan	Terlaksananya penilaian dan pembinaan rumah sakit sayang ibu dan bayi, tenaga medis sub spesialis teladan					19 kab/kota			131.412.350		Dinas Kesehatan
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Awam	Terlaksananya pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Masyarakat					30 orang			64.101.100		Dinas Kesehatan
Review Program Kesehatan Keluarga	Terlaksananya Program Kegiatan Kesehatan di Kabupaten/Kota					100%			231.987.300		Dinas Kesehatan
Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota	Terlaksananya Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota					19 Kab/Kota			250.000.000		Dinas Kesehatan
Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD Laboratorium	Terlaksananya Sosialisasi Persiapan BLUD UTD Laboratorium					1 Keg			118.914.600		Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Kesehatan					1 Keg			36.454.800		Dinas Kesehatan
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan											
Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	%					16,59	16,59	16,59	16,59		Dinas Sosial
Program Prov											
Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika									500.000.000		Rumah Sakit Jiwa Hb. Saanin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA	Jumlah Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA					160 unit			500.000.000		RSJ HB. Saanin

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Jumlah korban penggunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosisla di dalam panti sesuai standar pelayanan.	%		-	-	16,59	16,59		16,59	16,59		Dinas Sosial
Program Prov											
Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba										500.000.000	Rumah Sakit Jiwa Hb. Saanin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA	Jumlah Sarana dan Prasarana Instalasi NAPZA					160 unit				500.000.000	RSJ HB. Saanin
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan											
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%		-	-	-	55,40		58,60	60,20		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Prov											
Program Keluarga Berencana										97.949.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional	Mengikuti Rangkaian Kegiatan Peringatan HARGANAS, Terlaksananya Seminar Ketahanan Keluarga, Penyerahan Hadiah Lomba KK Model					3 KK Model ASN				500.000	DPPKBKPS
Komunikasi, Informasi dan edukasi KB	Penyebarluasan Informasi tentang Program KKBPK					Dialog interaktif 1 kali, 2 x rapat = 50 Orang				500.000	DPPKBKPS
Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan di kampung KB sesuai dengan kearifan lokal					3 Kampung KBKK dan 2 X rapat = 90 Orang				95.000.000	DPPKBKPS
Pembinaan Pelayanan KB	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB, Terlaksananya Advokasi dalam rangka Pembinaan Pelayanan KB					19 kab/ kota, 50 orang 2 hari				500.000	DPPKBKPS
Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	Peningkatan Kapasitas pembinaan, penilaian kesatuan gerak PKK-KB-KES Pemberian penghargaan kepada pelaksana terbaik pelaksana kesatuan gerak PKK-KB-KES					19 Kab/ Kota				1.449.500	DPPKBKPS
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%		-	-	-	17,00		13,60	11,90		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Prov											
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja										500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap OPD KB Kab/Kota, Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja					4 Kab				500.000		DPPKBKPS
Total Fertility Rate (TFR)	%		-	-	-	2,42		2,36	2,33			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Prov												
Program Peningkatan Pengendalian Penduduk										3.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Advokasi Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Peserta yang ter advokasi					150 orang				500.000		DPPKBKPS
Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat	Grand Desain Pengendalian Kependudukan Skala Provinsi					1 Dokumen				500.000		DPPKBKPS
Rakor Pengendalian Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rakor, Jumlah Peserta Rakor					4 kali x 30 orang (120 orang)				500.000		DPPKBKPS
Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Sosialisasi Pembangunan berwawasan kependudukan yang dilaksanakan					1 kali, 150 orang				500.000		DPPKBKPS
Bimtek Strategi Pengendalian Penduduk	Jumlah Peserta yang di bimtek					1 kali (80 orang)				500.000		DPPKBKPS
Sosialisasi Dampak Kependudukan	Jumlah Peserta					100 orang				500.000		DPPKBKPS
Forum koalisi kependudukan	Terfasilitasinya forum koalisi kependudukan					12 bulan				500.000		DPPKBKPS
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar												
Unmet need pelayanan kesehatan	%		-	-	-	7,00		6,20	5,80			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%		-	-	9,45	3,76		3,76	3,76			Dinas Kesehatan
Program Prov												
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin										53.682.476.390		Dinas Kesehatan
Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	1. Workshop kemitraan jaminan kesehatan mandiri; 2. Peserta Workshop					1. 1 kali; 2. 76 orang				54.376.540		Dinas Kesehatan
Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah	1. Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ; 2. Peserta Pertemuan					1. 1 kali; 2. 57 orang				106.235.050		Dinas Kesehatan
Pembiayaan dan jaminan pelayanan kesehatan sumbar sakato (JKSS)	Peserta Jamkes Sumbar Sakato					651.555 jiwa Penduduk Miskin dan 505 jiwa penghuni panti Provinsi				53.521.864.800		Dinas Kesehatan
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat												
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%		-	-	86	90		93	100			Dinas Kesehatan
Program Prov												
Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan										8.978.429.183		Dinas Kesehatan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	
Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi					18 Bulan			1.500.000.000		Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Kimia Dan Peralatan Labor Kesehatan	Tersedianya Reagensia untuk pemeriksaan sampel Laboratorium					2 Paket			1.705.970.000		Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan , Bahan Habis Pakai BKIM	Tersedianya Bahan Obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis					2 Kegiatan			2.273.604.883		Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan Dan Perbekalan Kesehatan BP4	Tersedianya Obat-obatan dan perbekalan Kesehatan di RS Paru					5 Kegiatan			2.500.000.000		Dinas Kesehatan
Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi					12 Bulan			137.933.100		Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pengawasan Alat Kesehatan	Meningkatnya Kemampuan SDM dalam pengawasan alat Kesehatan					1 kali pertemuan, untuk 76 Orang			106.261.100		Dinas Kesehatan
Workshop Program Alkes dan PKRT	Terlaksananya sosialisasi program alkes dan PKRT					38 org			97.236.100		Dinas Kesehatan
Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam peningkatan Bimbingan dan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Terlaksananya pertemuan peningkatan kemampuan SDM dalam bimbingan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT					98 org			113.959.300		Dinas Kesehatan
Workshop Program Kefarmasian	Terlaksananya workshop program kefarmasian					1 kali untuk 60 Orang			128.305.400		Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin	Freezer penyimpanan Vaksin					3 Unit			279.000.000		Dinas Kesehatan
Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Perizinan Sarana Prodis Alkes dan PKRT	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Perizinan Sarana Prodis Alkes dan PKRT					38 org			136.159.300		Dinas Kesehatan

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada saluran pembelajaran yang relevan dan efektif.										
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	-		72,23	73,67	75,14	76,65	78,18	79,74	-	-
Program Prov										
Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan									20.407.234.690	
Pengembangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online berbasis WEB dan Mobile Based					341 orang			928.328.400	Dinas Pendidikan
Gebyar Pendidikan dan Sumbar Expo	Terlaksananya Pameran, Lomba, Seminar, Tampilan Karya Inovasi Unggulan Pendidikan					112 Sekolah			1.059.453.700	Dinas Pendidikan
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional program pendidikan antar kabupaten Kota					1146 orang			1.364.750.400	Dinas Pendidikan
Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Tersedianya konsep dan Draf Pembelajaran Muatan Lokal					126 orang			615.466.050	Dinas Pendidikan
Penyusunan Data Base Pendidikan	Tersusunnya Data Pokok dan Profil Dinas Pendidikan dan Terlatihnya Operator Dapodik SMA, SMK, SLB dan Dinas Kab/Kota di Sumatera Barat					50 buku, 219 orang			331.379.000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang terkelola dengan baik sebanyak 325 SMA, 211 SMK dan 147 SLB					680 Sekolah, 19 Kab/Kota			2.098.787.900	Dinas Pendidikan
Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Penemuan SNP Pada Sekolah Yang Terakreditasi	Terlaksananya Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan pada sekolah SMA dan SMK yang terakreditasi					360 orang			394.857.150	Dinas Pendidikan
Pengadaan Blangko Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB	Siswa SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan rapor					83.500 eks			1.182.901.500	Dinas Pendidikan
Penjamin Mutu Pendidikan	Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi					1 keg			354.917.700	Dinas Pendidikan
Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blangko Ijazah SMA, SMK dan SLB	Tersosialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan Ijazah SMA, SMK, dan SLB					171 orang			236.263.900	Dinas Pendidikan
Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	Terpilihnya Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi					72 sekolah			383.506.900	Dinas Pendidikan
Pra UN SMA dan SMK	Penyusunan, Cetak Naskah dan distribusi ke sekolah SMA dan SMK se Sumbar					72.802 orang siswa			1.268.104.200	Dinas Pendidikan
Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB	Informasi Pendidikan yang disebarakan melalui WEB					12 bulan			373.675.000	Dinas Pendidikan
Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah/Guru SMA SMK SLB dan Pengawas priode Oktober 2019 dan April 2020 Se Sumatera Barat 2. Terlaksananya Pelatihan Angka Kredit Guru SMA/SMK/SLB dan Pengawas se Sumatera Barat					800 dokumen 150 orang			693.962.600	Dinas Pendidikan
Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi	GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi yang mengikuti seleksi					16 lomba			614.041.300	Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB	Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB yang di evaluasi dan divalidasi sebanyak 1.160 KTSP					859 orang			671.671.300		Dinas Pendidikan
Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB	Terlaksananya Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/ SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat					750 orang			361.942.150		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB	Pengurus Barang dan Aset yang ditingkatkan kompetensinya dilaksanakan sebanyak 4 angkatan					371 orang			617.105.500		Dinas Pendidikan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS dilingkungan Dinas Pendidikan	PNS yang dilantik sekaligus pengambilan sumpah PNS dilingkungan Dinas Pendidikan					750 orang			22.500.000		Dinas Pendidikan
Bimtek Manajemen Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya Bimtek PP No. 11 Tahun 2017 dan Pergub Bidang Kepegawaian					374 orang			505.476.800		Dinas Pendidikan
Pengembangan Bahan Ajar Digital (Animasi) bagi Guru SMA dan SMK	Bahan ajar digital (animasi) bagi guru SMA dan SMK yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan					110 orang			298.664.550		Dinas Pendidikan
Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA dan SMK	Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA sebanyak 325 sekolah dan SMK sebanyak 211 sekolah					536 Sekolah			638.773.300		Dinas Pendidikan
Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekondik Dinas Pendidikan	Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekondik Dinas Pendidikan sebanyak 2 unit					2 unit			867.452.600		Dinas Pendidikan
Penataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat	Kelembagaan SMK se Sumatera Barat yang tertata dengan baik					210 sekolah			229.100.000		Dinas Pendidikan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	Terjalinnnya Kemitraan dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam memajukan pendidikan					60 orang			122.473.650		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi GTK Jenjang Pendidikan Dasar	Kompetensi GTK jenjang Pendidikan Dasar yang ditingkatkan untuk 4 Mapel SMP dan 3 Mapel SD					7 Mapel			941.825.000		Dinas Pendidikan
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya FLS2N SD dan SMP Prov. Sumatera Barat dan terdapatnya utusan FLS2N SD dan SMP ke Tingkat Nasional					4 cab SD dan 9 cab SMP			798.803.300		Dinas Pendidikan
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan Lomba-Lomba Siswa SD dan SMP dibidang Olahraga					6 cab SD dan 4 cab SMP			1.440.211.545		Dinas Pendidikan
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional					2 mapel SD dan 3 mapel SMP			402.132.145		Dinas Pendidikan
Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Sain Guru SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali dan ketingkat Nasional dilaksanakan 1 kali					2 mapel SD dan 3 mapel SMP			257.684.400		Dinas Pendidikan
Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat	Duta Rumah Belajar yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan					171 orang			134.177.000		Dinas Pendidikan
Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK	Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan 1 kali					7 Cabang			196.845.750		Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat.		-									-
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun.			8,59	8,66	8,72	8,79		8,85	8,92		-
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia Dini (PAUD).		-	68,15	70,25	72,18	74,6		76,2	77,5		-

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan Teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /Sederajat.	%		73,35	73,60	73,85	74,10		74,35	74,60		Dinas Pendidikan
Program Prov											
Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah										125.581.309.550	
Pembangunan Laboratorium IPA SMA	Ruang Laboratorium IPA SMA yang dibangun						1 paket			433.713.400	Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat	Pagar Lingkungan Sekolah 725 m						1 paket			250.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat	Lanjutan pembangunan rumah dinas guru						2 unit			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat yang akan dibangun						1 Paket			1.741.022.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang akan dibangun						1 unit			1.563.297.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Fasilitas Gedung SMA yang akan dibangun						1 paket			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar						1 paket			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun						2 paket			1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar						3 Paket			1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok	Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok yang akan dibangun						1 unit			1.556.697.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar	Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar yang dibangun						1 unit			2.031.197.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat (Keberbaktakan Olahraga)	Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat yang dibangun						1 unit			2.029.620.100	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA di Kab. Kep. Mentawai	Rumah Dinas Guru SMA yang dibangun sebanyak 5 unit/10 kopel di Kab. Kep. Mentawai						5 sekolah			3.057.793.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Gallery SMA, SMK, dan SLB	Ruang Gallery SMA, SMK dan SLB yang dibangun dengan ukuran 12 m x 7 m = 84 m						1 paket			433.713.400	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	Sarana Prasarana SMA						1 paket			37.103.872.250	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMK se Sumatera Barat						95 Sekolah			70.138.500.000	Dinas Pendidikan
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Padang yang akan dibangun						1 paket			930.240.000	Dinas Pendidikan
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/MTs/Sederajat; (3) SMA/SMK/MA/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.											
Program Prov											
Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah										125.581.309.550	
Pembangunan Laboratorium IPA SMA	Ruang Laboratorium IPA SMA yang dibangun						1 paket			433.713.400	Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat	Pagar Lingkungan Sekolah 725 m					1 paket				250.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat	Lanjutan pembangunan rumah dinas guru					2 unit				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat yang akan dibangun					1 Paket				1.741.022.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang akan dibangun					1 unit				1.563.297.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Fasilitas Gedung SMA yang akan dibangun					1 paket				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					1 paket				750.000.000		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun					2 paket				1.030.820.200		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					3 Paket				1.030.820.200		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok	Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok yang akan dibangun					1 unit				1.556.697.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar	Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar yang dibangun					1 unit				2.031.197.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat (Keberbakatan Olahraga)	Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat yang dibangun					1 unit				2.029.620.100		Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA di Kab. Kep. Mentawai	Rumah Dinas Guru SMA yang dibangun sebanyak 5 unit/10 kopel di Kab. Kep. Mentawai					5 sekolah				3.057.793.800		Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Gallery SMA, SMK, dan SLB	Ruang Gallery SMA, SMK dan SLB yang dibangun dengan ukuran 12 m x 7 m = 84 m					1 paket				433.713.400		Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	Sarana Prasarana SMA					1 paket				37.103.872.250		Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMK se Sumatera Barat					95 Sekolah				70.138.500.000		Dinas Pendidikan
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Padang yang akan dibangun					1 paket				930.240.000		Dinas Pendidikan
Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD/MI sederajat.			99,58	99,59	99,6	99,61		99,62	100			Dinas Pendidikan
Program Prov												
Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan										20.407.234.690		
Pengembangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online berbasis WEB dan Mobile Based					341 orang				928.328.400		Dinas Pendidikan
Gebyar Pendidikan dan Sumbar Expo	Terlaksananya Pameran, Lomba, Seminar, Tampilan Karya Inovasi Unggulan Pendidikan					112 Sekolah				1.059.453.700		Dinas Pendidikan
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional program pendidikan antar kabupaten Kota					1146 orang				1.364.750.400		Dinas Pendidikan
Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Tersedianya konsep dan Draf Pembelajaran Muatan Lokal					126 orang				615.466.050		Dinas Pendidikan
Penyusunan Data Base Pendidikan	Tersusunnya Data Pokok dan Profil Dinas Pendidikan dan Terlatihnya Operator Dapodik SMA, SMK, SLB dan Dinas Kab/Kota di Sumatera Barat					50 buku, 219 orang				331.379.000		Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola dengan baik sebanyak 325 SMA, 211 SMK dan 147 SLB					680 Sekolah, 19 Kab/Kota				2.098.787.900		Dinas Pendidikan
Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan SNP Pada Sekolah Yang Terakreditasi	Terlaksannanya Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan pada sekolah SMA dan SMK yang terakreditasi					360 orang				394.857.150		Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Pengadaan Blangko Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB	Siswa SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan rapor					83.500 eks		1.182.901.500		Dinas Pendidikan
Penjamin Mutu Pendidikan	Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi					1 keg		354.917.700		Dinas Pendidikan
Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blangko Ijazah SMA, SMK dan SLB	Tersosialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan Ijazah SMA, SMK, dan SLB					171 orang		236.263.900		Dinas Pendidikan
Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	Terpilihnya Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi					72 sekolah		383.506.900		Dinas Pendidikan
Pra UN SMA dan SMK	Penyusunan, Cetak Naskah dan distribusi ke sekolah SMA dan SMK se Sumbar					72.802 orang siswa		1.268.104.200		Dinas Pendidikan
Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB	Informasi Pendidikan yang disebarakan melalui WEB					12 bulan		373.675.000		Dinas Pendidikan
Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah/Guru SMA SMK SLB dan Pengawas priode Oktober 2019 dan April 2020 Se Sumatera Barat 2. Terlaksananya Pelatihan Angka Kredit Guru SMA/SMK/SLB dan Pengawas se Sumatera Barat					800 dokumen 150 orang		693.962.600		Dinas Pendidikan
Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi	GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi yang mengikuti seleksi					16 lomba		614.041.300		Dinas Pendidikan
Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB	Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB yang di evaluasi dan divalidasi sebanyak 1.160 KTSP					859 orang		671.671.300		Dinas Pendidikan
Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB	Terlaksananya Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/ SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat					750 orang		361.942.150		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB	Pengurus Barang dan Aset yang ditingkatkan kompetensinya dilaksanakan sebanyak 4 angkatan					371 orang		617.105.500		Dinas Pendidikan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan	PNS yang dilantik sekaligus pengambilan sumpah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan					750 orang		22.500.000		Dinas Pendidikan
Bimtek Manajemen Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya Bimtek PP No. 11 Tahun 2017 dan Pergub Bidang Kepegawaian					374 orang		505.476.800		Dinas Pendidikan
Pengembangan Bahan Ajar Digital (Animasi) bagi Guru SMA dan SMK	Bahan ajar digital (animasi) bagi guru SMA dan SMK yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan					110 orang		298.664.550		Dinas Pendidikan
Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA dan SMK	Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA sebanyak 325 sekolah dan SMK sebanyak 211 sekolah					536 Sekolah		638.773.300		Dinas Pendidikan
Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan	Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan sebanyak 2 unit					2 unit		867.452.600		Dinas Pendidikan
Penataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat	Kelembagaan SMK se Sumatera Barat yang tertata dengan baik					210 sekolah		229.100.000		Dinas Pendidikan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	Terjalannya Kemitraan dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam memajukan pendidikan					60 orang		122.473.650		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi GTK Jenjang Pendidikan Dasar	Kompetensi GTK jenjang Pendidikan Dasar yang ditingkatkan untuk 4 Mapel SMP dan 3 Mapel SD					7 Mapel		941.825.000		Dinas Pendidikan
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya FLS2N SD dan SMP Prov. Sumatera Barat dan terdapatnya utusan FLS2N SD dan SMP ke Tingkat Nasional					4 cab SD dan 9 cab SMP		798.803.300		Dinas Pendidikan
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan Lomba-Lomba Siswa SD dan SMP dibidang Olahraga					6 cab SD dan 4 cab SMP		1.440.211.545		Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional					2 mapel SD dan 3 mapel SMP			402.132.145		Dinas Pendidikan
Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Sain Guru SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali dan ketingkat Nasional dilaksanakan 1 kali					2 mapel SD dan 3 mapel SMP			257.684.400		Dinas Pendidikan
Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat	Duta Rumah Belajar yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan					171 orang			134.177.000		Dinas Pendidikan
Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK	Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan 1 kali					7 Cabang			196.845.750		Dinas Pendidikan
Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat.			81,2	81,3	81,35	81,5		81,55	81,55		Dinas Pendidikan
Program Prov											
Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan									20.407.234.690		
Pengembangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online berbasis WEB dan Mobile Based					341 orang			928.328.400		Dinas Pendidikan
Gebyar Pendidikan dan Sumbar Expo	Terlaksananya Pameran, Lomba, Seminar, Tampilan Karya Inovasi Unggulan Pendidikan					112 Sekolah			1.059.453.700		Dinas Pendidikan
Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional program pendidikan antar kabupaten Kota					1146 orang			1.364.750.400		Dinas Pendidikan
Pemberdayaan Dewan Pendidikan	Tersedianya konsep dan Draf Pembelajaran Muatan Lokal					126 orang			615.466.050		Dinas Pendidikan
Penyusunan Data Base Pendidikan	Tersusunnya Data Pokok dan Profil Dinas Pendidikan dan Terlatihnya Operator Dapodik SMA, SMK, SLB dan Dinas Kab/Kota di Sumatera Barat					50 buku, 219 orang			331.379.000		Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola dengan baik sebanyak 325 SMA, 211 SMK dan 147 SLB					680 Sekolah, 19 Kab/Kota			2.098.787.900		Dinas Pendidikan
Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Penemuan SNP Pada Sekolah Yang Terakreditasi	Terlaksananya Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Pemenuhan pada sekolah SMA dan SMK yang terakreditasi					360 orang			394.857.150		Dinas Pendidikan
Pengadaan Blangko Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB	Siswa SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan rapor					83.500 eks			1.182.901.500		Dinas Pendidikan
Penjamin Mutu Pendidikan	Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi					1 keg			354.917.700		Dinas Pendidikan
Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SMA, SMK dan SLB	Tersosialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan Ijazah SMA, SMK, dan SLB					171 orang			236.263.900		Dinas Pendidikan
Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	Terpilihnya Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi					72 sekolah			383.506.900		Dinas Pendidikan
Pra UN SMA dan SMK	Penyusunan, Cetak Naskah dan distribusi ke sekolah SMA dan SMK se Sumbar					72.802 orang siswa			1.268.104.200		Dinas Pendidikan
Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB	Informasi Pendidikan yang disebarakan melalui WEB					12 bulan			373.675.000		Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah/Guru SMA SMK SLB dan Pengawas priode Oktober 2019 dan April 2020 Se Sumatera Barat 2. Terlaksananya Pelatihan Angka Kredit Guru SMA/SMK/SLB dan Pengawas se Sumatera Barat					800 dokumen 150 orang		693.962.600		Dinas Pendidikan
Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi	GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi yang mengikuti seleksi					16 lomba		614.041.300		Dinas Pendidikan
Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB	Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB yang di evaluasi dan divalidasi sebanyak 1.160 KTSP					859 orang		671.671.300		Dinas Pendidikan
Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB	Terlaksananya Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/ SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat					750 orang		361.942.150		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB	Pengurus Barang dan Aset yang ditingkatkan kompetensinya dilaksanakan sebanyak 4 angkatan					371 orang		617.105.500		Dinas Pendidikan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS dilingkungan Dinas Pendidikan	PNS yang dilantik sekaligus pengambilan sumpah PNS dilingkungan Dinas Pendidikan					750 orang		22.500.000		Dinas Pendidikan
Bimtek Manajemen Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya Bimtek PP No. 11 Tahun 2017 dan Pergub Bidang Kepegawaian					374 orang		505.476.800		Dinas Pendidikan
Pengembangan Bahan Ajar Digital (Animasi) bagi Guru SMA dan SMK	Bahan ajar digital (animasi) bagi guru SMA dan SMK yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan					110 orang		298.664.550		Dinas Pendidikan
Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA dan SMK	Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA sebanyak 325 sekolah dan SMK sebanyak 211 sekolah					536 Sekolah		638.773.300		Dinas Pendidikan
Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan	Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan sebanyak 2 unit					2 unit		867.452.600		Dinas Pendidikan
Penataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat	Kelembagaan SMK se Sumatera Barat yang tertata dengan baik					210 sekolah		229.100.000		Dinas Pendidikan
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	Terjalinnnya Kemitraan dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua dalam memajukan pendidikan					60 orang		122.473.650		Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi GTK Jenjang Pendidikan Dasar	Kompetensi GTK jenjang Pendidikan Dasar yang ditingkatkan untuk 4 Mapel SMP dan 3 Mapel SD					7 Mapel		941.825.000		Dinas Pendidikan
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya FLS2N SD dan SMP Prov. Sumatera Barat dan terdapatnya utusan FLS2N SD dan SMP ke Tingkat Nasional					4 cab SD dan 9 cab SMP		798.803.300		Dinas Pendidikan
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan Lomba-Lomba Siswa SD dan SMP dibidang Olahraga					6 cab SD dan 4 cab SMP		1.440.211.545		Dinas Pendidikan
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional					2 mapel SD dan 3 mapel SMP		402.132.145		Dinas Pendidikan
Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Sain Guru SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali dan ketingkat Nasional dilaksanakan 1 kali					2 mapel SD dan 3 mapel SMP		257.684.400		Dinas Pendidikan
Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat	Duta Rumah Belajar yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan					171 orang		134.177.000		Dinas Pendidikan
Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK	Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan 1 kali					7 Cabang		196.845.750		Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA/SMK/ MA sederajat.	-		73,35	73,60	73,85	74,10		74,35	74,6		Dinas Pendidikan
Program Prov											
Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah										125.581.309.550	
Pembangunan Laboratorium IPA SMA	Ruang Laboratorium IPA SMA yang dibangun						1 paket			433.713.400	Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat	Pagar Lingkungan Sekolah 725 m						1 paket			250.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat	Lanjutan pembangunan rumah dinas guru						2 unit			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat yang akan dibangun						1 Paket			1.741.022.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang akan dibangun						1 unit			1.563.297.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Fasilitas Gedung SMA yang akan dibangun						1 paket			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar						1 paket			750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun						2 paket			1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar						3 Paket			1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok	Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok yang akan dibangun						1 unit			1.556.697.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar	Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar yang dibangun						1 unit			2.031.197.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat (Keberbakatan Olahraga)	Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat yang dibangun						1 unit			2.029.620.100	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA di Kab. Kep. Mentawai	Rumah Dinas Guru SMA yang dibangun sebanyak 5 unit/10 kopel di Kab. Kep. Mentawai						5 sekolah			3.057.793.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Gallery SMA, SMK, dan SLB	Ruang Gallery SMA, SMK dan SLB yang dibangun dengan ukuran 12 m x 7 m = 84 m						1 paket			433.713.400	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	Sarana Prasarana SMA						1 paket			37.103.872.250	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMK se Sumatera Barat						95 Sekolah			70.138.500.000	Dinas Pendidikan
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Padang yang akan dibangun						1 paket			930.240.000	Dinas Pendidikan

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi											
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan dalam 12 bulan terakhir.	Ratio	-	48	47	46	45	44			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Prov											
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan									503.203.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Tertindaknya Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)				100 orang				100.000.000	Dinas PP dan PA	
Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan	Tertindaknya Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan dan Anak				60 Orang				100.000.000	Dinas PP dan PA	
Advokasi Perlindungan Perempuan	Tertindaknya Semiloka Perlindungan Perempuan				100 orang				103.203.000	Dinas PP dan PA	
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Meningkatnya SDM dan Keterampilan Pengurus P2TP2A sebagai pelayanan pendamping korban kekerasan				60 Orang				75.000.000	Dinas PP dan PA	
Penanganan dan Pelayanan perempuan korban Kekerasan	penanganan dan pelayanan perempuan korban kekerasan				30 orang perempuan				50.000.000	Dinas PP dan PA	
Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Sosialisasi Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Perempuan				70 orang				75.000.000	Dinas PP dan PA	
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak									528.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah				50 orang				75.000.000	Dinas PP dan PA	
Pelatihan Peningkatan SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan	SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan yang mengikuti pelatihan				40 orang				85.000.000	Dinas PP dan PA	
Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum	1. Rapat Koordinasi; 2. Pembinaan pada LPKA; 3. Laporan Kegiatan				1. 1 kali; 2. 50 orang anak; 3. 1 Jenis laporan				85.000.000	Dinas PP dan PA	
Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	Pendamping anak yang berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelatihan				40 orang				83.000.000	Dinas PP dan PA	
Pendampingan dan Penjangkauan korban tindak kekerasan	Korban yang terlayani				30 orang				40.000.000	Dinas PP dan PA	
Peningkatan layanan informasi dan kerjasama perlindungan perempuan dan anak	1. Kerjasama perlindungan perempuan dan anak; 2. Layanan Informasi yang tersedia				1. 10 Kerjasama (MoU dan PKS); 2. 6 kali				47.600.000	Dinas PP dan PA	
Penanganan dan Pelayanan anak korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan yang terlayani				30 orang				62.400.000	Dinas PP dan PA	
Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Bahaya Perilaku Menyimpang	Anak yang mendapatkan pelatihan terkait dengan bahaya perilaku menyimpang				40 orang				50.000.000	Dinas PP dan PA	

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan											
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Ratio		21,00	18,90	18,90	17,00		13,60	11,90		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Prov											
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja										500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap OPD KB Kab/Kota, Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja					4 Kab				500.000	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Ratio		96,88	97,11	97,34	97,57		97,80	98,03		Dinas Pendidikan
Program Prov											
Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah										125.581.309.550	
Pembangunan Laboraturium IPA SMA	Ruang Laboraturium IPA SMA yang dibangun					1 paket				433.713.400	Dinas Pendidikan
Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat	Pagar Lingkungan Sekolah 725 m					1 paket				250.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat	Lanjutan pembangunan rumah dinas guru					2 unit				750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Sumatera Barat yang akan dibangun					1 Paket				1.741.022.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman	Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang akan dibangun					1 unit				1.563.297.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	Fasilitas Gedung SMA yang akan dibangun					1 paket				750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					1 paket				750.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Ruang Kelas Baru SMA yang akan dibangun					2 paket				1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar					3 Paket				1.030.820.200	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok	Asrama siswa SMAN 2 Sumatera Barat di Kab. Solok yang akan dibangun					1 unit				1.556.697.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar	Asrama Putri SMAN 3 Batusangkar yang dibangun					1 unit				2.031.197.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat (Keberbakatan Olahraga)	Asrama Putri SMAN 4 Sumatera Barat yang dibangun					1 unit				2.029.620.100	Dinas Pendidikan
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA di Kab. Kep. Mentawai	Rumah Dinas Guru SMA yang dibangun sebanyak 5 unit/10 kopel di Kab. Kep. Mentawai					5 sekolah				3.057.793.800	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Gallery SMA, SMK, dan SLB	Ruang Gallery SMA, SMK dan SLB yang dibangun dengan ukuran 12 m x 7 m = 84 m					1 paket				433.713.400	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	Sarana Prasarana SMA					1 paket				37.103.872.250	Dinas Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMK se Sumatera Barat					95 Sekolah				70.138.500.000	Dinas Pendidikan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	Ruang Kelas Baru SMAN 3 Padang yang akan dibangun					1 paket			930.240.000		Dinas Pendidikan
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference											
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%		8,30	7,60	7,60	7,00		6,20	5,80		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Prov											
Program Keluarga Berencana									97.949.500		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional	Mengikuti Rangkaian Kegiatan Peringatan HARGANAS, Terlaksananya Seminar Ketahanan Keluarga, Penyerahan Hadiah Lomba KK Model					3 KK Model ASN			500.000		DPPKBKPS
Komunikasi, Informasi dan edukasi KB	Penyebarluasan Informasi tentang Progran KKBPK					Dialog interaktif 1 kali, 2 x rapat = 50 Orang			500.000		DPPKBKPS
Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan di kampung KB sesuai dengan kearifan lokal					3 Kampung KBKK dan 2 X rapat = 90 Orang			95.000.000		DPPKBKPS
Pembinaan Pelayanan KB	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB, Terlaksananya Advokasi dalam rangka Pembinaan Pelayanan KB					19 kab/ kota, 50 orang 2 hari			500.000		DPPKBKPS
Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES	Peningkatan Kapasitas pembinaan , penilaian kesatuan gerak PKK-KB-KES Pemberian penghargaan kepada pelaksana terbaik pelaksana kesatuan gerak PKK-KB-KES					19 Kab/ Kota			1.449.500		DPPKBKPS

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%		69	70	71	72		73	74		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov											
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya										33.927.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan Embung Tambangan Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar	Tertindaknya pembangunan embung					1 Unit				1.000.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar	Tertindaknya pembangunan embung					1 Unit				5.000.000.000	Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Bukittinggi	Tertindaknya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh				1.000.000.000	Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Sungai Dareh	Tertindaknya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh				1.000.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Sijonie Nagari Pamuatan	Tertindaknya pembangunan embung					1 Unit				4.000.000.000	Dinas PSDA
Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Embung	Tertindaknya angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan Embung					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Sungai Putih	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Rawang Gunung Malelo	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Tanah Kareh	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Aia Tawa	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Lakuak	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Bukik Sianik	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Okak Tarung-Tarung	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Cirubuih	Tertindaknya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Aia Taganang	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Sungai Aru	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Muko Banda	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Banca Rumbai	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Sungai Singkek	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Ranah Paitan	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Samurai	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Talago	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Ngalau Batu	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Lurah Dalam	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Muaro Padang	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
DED Embung Limau Manih	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
DED Embung Aro	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
DED Embung Sabai Nan Aluih	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
DED Embung Bintungan	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Jolu	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Telaga Biruhun	Tertindaknya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000	Dinas PSDA

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	
Revitalisasi Embung Canduang Koto Laweh	Terlaksananya revitalisasi embung					1 Unit				2.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Payo Gadang	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				3.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Ganting	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				4.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Malako	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				3.500.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Kandih Bukik Kandung	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				2.227.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Batu Licin Kab. 50 Kota	Terlaksananya SID Embung Batu Licin Kabupaten 50 Kota					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sarasah Kab. Agam	Terlaksananya SID Embung Sarasah Kab. Agam					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sironjong Sati	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
Rehabilitasi Embung Ulu Aia	Terlaksananya rehabilitasi embung					1 Unit				200.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Pincuran Copu Jorong	Terlaksananya pembangunan embung					0 Unit				200.000.000		Dinas PSDA
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minimum , aman dan berkelanjutan.	%		69	70	71	72		73	74			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov												
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya										33.927.000.000		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan Embung Tambangan Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				1.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				5.000.000.000		Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Bukittinggi	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh				1.000.000.000		Dinas PSDA
Operasi dan Pemeliharaan Embung pada UPTD Wilayah Sungai Dareh	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung					20 Bh				1.000.000.000		Dinas PSDA
Pembangunan Embung Sijonie Nagari Pamuatan	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit				4.000.000.000		Dinas PSDA
Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Embung	Tersedianya angka kebutuhan nyata Operasi dan Pemeliharaan Embung					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Sungai Putih	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Rawang Gunung Malelo	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Tanah Kareh	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Aia Tawa	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Lakuak	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Bukik Sianik	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Okak Tarung-Tarung	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
Kajian Lingkungan Embung Cirubuih	Tersedianya data Kajian Lingkungan					1 Dokumen				200.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Aia Taganang	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sungai Aru	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Muko Banda	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Banca Rumbai	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Sungai Singkek	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Ranah Paitan	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Samurai	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Talago	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Ngalau Batu	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Lurah Dalam	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
SID Embung Muaro Padang	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Limau Manih	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Aro	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA
DED Embung Sabai Nan Aluih	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen				250.000.000		Dinas PSDA

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
DED Embung Bintungan	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Jolu	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Telaga Biruhun	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
Revitalisasi Embung Canduang Koto Laweh	Terlaksananya revitalisasi embung					1 Unit			2.000.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Talago Payo Gadang	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			3.000.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Ganting	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			4.000.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Malako	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			3.500.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Kandih Bukik Kandung	Terlaksananya pembangunan embung					1 Unit			2.227.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Batu Licin Kab. 50 Kota	Terlaksananya SID Embung Batu Licin Kabupaten 50 Kota					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Sarasah Kab. Agam	Terlaksananya SID Embung Sarasah Kab. Agam					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
SID Embung Sironjong Sati	Tersedianya data perencanaan embung					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PSDA
Rehabilitasi Embung Ulu Aia	Terlaksananya rehabilitasi embung					1 Unit			200.000.000	Dinas PSDA
Pembangunan Embung Pincuran Copu Jorong	Terlaksananya pembangunan embung					0 Unit			200.000.000	Dinas PSDA
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%		72	73	74	75	76	77		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov										
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah									2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	Terfasilitasinya pendampingan teknis Program Sanimas IDB dan PPSP					129 lokasi			400.000.000	Dinas PU PR
Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat	Terfasilitasinya Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat					1 Paket			200.000.000	Dinas PU PR
Update Database Sanitasi	Tersedianya Data Base Sanitasi					1 Unit			200.000.000	Dinas PU PR
Penyusunan Studi Kelayakan IPAL Regional	tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan IPAL Regional					1 Dokumen			200.000.000	Dinas PU PR
Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya DED Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PU PR
Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen			250.000.000	Dinas PU PR
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur TPA Regional	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Infrastruktur TPA Regional					-			500.000.000	Dinas PU PR
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan									28.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Updating Database Kawasan Kumuh	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat					1 dokumen			1.500.000.000	Dinas Perkimtan
Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 dokumen			3.900.000.000	Dinas Perkimtan
Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan					4 lokasi			19.000.000.000	Dinas Perkimtan
Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan MBR	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 lokasi			2.500.000.000	Dinas Perkimtan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum MBR	Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan MBR					1 dokumen			600.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan Kumuh	Terdatanya PSU di Kawasan Kumuh					1 dokumen			500.000.000		Dinas Perkimtan
Pendataan PSU Kawasan MBR	Terdatanya PSU di Kawasan MBR					1 dokumen			500.000.000		Dinas Perkimtan
Porpori rumah tangga yang terlayani system pengelolaa air limbah terpusat.		%	72	73	74	75		76	77		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov											
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah									2.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	Terfasilitasinya pendampingan teknis Program Sanimas IDB dan PPSP					129 lokasi			400.000.000		Dinas PU PR
Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat	Terfasilitasinya Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota di Sumatera Barat					1 Paket			200.000.000		Dinas PU PR
Update Database Sanitasi	Tersedianya Data Base Sanitasi					1 Unit			200.000.000		Dinas PU PR
Penyusunan Studi Kelayakan IPAL Regional	tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan IPAL Regional					1 Dokumen			200.000.000		Dinas PU PR
Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya DED Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PU PR
Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	Tersusunnya Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh					1 Dokumen			250.000.000		Dinas PU PR
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur TPA Regional	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Dan Prasaran Infrastruktur TPA Regional					-			500.000.000		Dinas PU PR
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.		%	-	-	50	68		89	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Prov											
Program Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah									1.190.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penelitian Zonasi Air Tanah Sumatera Barat	Cakupan Lokasi Kajian Zona Resapan dan Lepas Air Tanah pada CAT Kabupaten Pasaman Barat					1 dok dan peta			100.000.000		Dinas ESDM
Inventarisasi Penggunaan Air Tanah Di Sumatera Barat	Data jumlah Pengguna/Pemakai Air Tanah di Sumatera Barat					200 sumur			116.000.000		Dinas ESDM
Penyelidikan Air Tanah Dengan Metoda Geolistrik Sumatera Barat	Tersedianya Data Geolistrik di Daerah yang sulit air tanah					60 titik			150.000.000		Dinas ESDM
Sosialisasi Perizinan Air Tanah	Terlaksananya sosialisasi perizinan air tanah kepada masyarakat dan pengguna air tanah					80 orang			93.000.000		Dinas ESDM
Penelitian Zona Konservasi Air Tanah Dalam Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Di Sumatera Barat	Hasil penelitian Cakupan Lokasi Kajian Cekungan Air Tanah (CAT)					2 dokumen dan peta			146.880.000		Dinas ESDM
Penelitian Hidrogeologi Sumatera Barat	Tersedianya hasil penelitian Hidrogeologi Kabupaten Sijunjung					1 dokumen dan peta			121.000.000		Dinas ESDM
Monitoring dan Pengendalian Izin dan Pemanfaatan Air Tanah	Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Air Tanah di Sumatera Barat					19 Kab/Kota			228.120.000		Dinas ESDM
Inventarisasi Daerah Sulit Air Sumatera Barat	Tersedianya Data Daerah-Daerah Sulit Air di Sumatera Barat					19 Kab/Kota			75.000.000		Dinas ESDM

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Pemantauan Kualitas Air Tanah di Wilayah Pesisir Sumatera Barat	Terlaksananya Pengendalian Pelestarian Air Tanah di Wilayah Pesisir Sumatera Barat					6 Kab/Kota			80.000.000		Dinas ESDM
Bimbingan Teknis Konservasi Air Tanah di Sumatera Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Air Tanah					40 orang			80.000.000		Dinas ESDM
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
Jumlah lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Ha		0,32	0,63	1,09	2,00	2,21	2,26			-
Program Prov											
Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam									3.400.000.000		Dinas Kehutanan
Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas					250000 batang			400.000.000		Dinas Kehutanan
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan					6 unit/2 buku			161.000.000		Dinas Kehutanan
Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik					2 unit			141.000.000		Dinas Kehutanan
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan					180 hektar			1.390.000.000		Dinas Kehutanan
Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5					10 lokasi			407.000.000		Dinas Kehutanan
Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunya dokumen DAS					2 DAS			741.000.000		Dinas Kehutanan
Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL	Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun					2 Buku			160.000.000		Dinas Kehutanan

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
Rasio elektrifikasi	%		85	88,57	92,16	95,01	96,26	97,00			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Prov											
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Meningkatnya rasio elektrifikasi								6.278.500.000		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Inventarisasi Rumah Tangga Sederhana (RTS) Yang Belum Berlistrik	Terdatanya Rumah Tangga Sederhana (RTS) yang belum berlistrik						1 dokumen		80.000.000		Dinas ESDM
Perencanaan DED Pembangunan PLTMH	Tersusunnya DED Pembangunan PLTMH						1 lokasi		160.000.000		Dinas ESDM
Pembangunan PLTMH	Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)						1 unit pembangkit		1.260.000.000		Dinas ESDM
Inventarisasi Dan Evaluasi PLTMH Di Sumatera Barat	Terinventarisasi/terdatanya PLTMH yang terpasang serta diketahui kondisinya						1 dokumen		70.000.000		Dinas ESDM
Bimbingan Teknis Terhadap Operator PLTMH Dan Pengelola Listrik Pedesaan	Terlaksananya Bimtek Operator PLTMH dan Pengelola Listrik Pedesaan						30 orang		90.000.000		Dinas ESDM
Pengawasan Instalasi Listrik TR	Terjaminnya Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi Tegangan Rendah						1 dokumen		50.000.000		Dinas ESDM
Pembangunan PLTS Tersebar/SHS/LTSHE	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS/LTSHE						170 Unit		2.293.500.000		Dinas ESDM
Penertiban Usaha Ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur Ketenagalistrikan	Terlaksananya Penertiban Usaha Ketenagalistrikan						1 dokumen		110.000.000		Dinas ESDM
Penyusunan RUED	Tersusunnya RUED Sumatera Barat						Perda RUED		180.000.000		Dinas ESDM
Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Energi Baru dan Terbarukan						3 lokasi		85.000.000		Dinas ESDM
Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Terpasangnya Instalasi Listrik						560 RTS		1.800.000.000		Dinas ESDM
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Energi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Energi						Naskah Akademik		100.000.000		Dinas ESDM

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
<i>PDRP per kapita</i>	<i>Rp. Juta</i>		37,21	39,95	42,70	45,44	48,19	50,93		-
Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.										
Persentase tenaga kerja formal.	Rp. Juta		17,43	19,04	19,17	19,32	19,46	19,61		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Prov										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha									2.677.592.600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Monitoring Dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi AKAD					50 orang			100.000.000	Dinas Nakertrans
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi program tenaga kerja dalam dan luar negeri					360 orang			140.000.000	Dinas Nakertrans
Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra Pemberangkatan	Jumlah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibina Pra pemberangkatan					100 orang			95.445.000	Dinas Nakertrans
Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)					80 orang			93.989.600	Dinas Nakertrans
Bimtek Penyiapan Petugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Jumlah Petugas Kab/Kota yang profesional dalam melayani keperluan TKI					40 orang			150.000.000	Dinas Nakertrans
Bimtek Petugas Pengumpul Dan Pengolah Informasi Pasar Kerja	Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek					30 orang			50.000.000	Dinas Nakertrans
Pengumpul Dan Pengolah Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data dan informasi pencari kerja dan lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja					1 dokumen			55.000.000	Dinas Nakertrans
Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) Dan Pembinaan BKK	Jumlah peserta bimtek bursa kerja khusus					40 orang			184.107.000	Dinas Nakertrans
Pengumpulan (Job Cansaving) Ke Perusahaan	Terhimpunnya jumlah lowongan/ penempatan tenaga kerja dan pencari kerja					40 perusahaan			120.000.000	Dinas Nakertrans
Identifikasi Wilayah Padat Karya	Teridentifikasinya data potensi padat karya					14 kab/ kota			69.108.000	Dinas Nakertrans
Bimtek Perantara Kerja	Jumlah Pejabat/Petugas teknis yang mengikuti bimtek					50 orang			247.318.000	Dinas Nakertrans
Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan					1500 orang			155.000.000	Dinas Nakertrans
Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tempat Guna (TTG)	Jumlah anggota kelompok usaha					40 orang			325.000.000	Dinas Nakertrans
Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Meningkatnya kelompok usaha mandiri berkelanjutan dan bisa menciptakan lapangan kerja yang produktif					60 orang			300.693.000	Dinas Nakertrans
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	Tersusunnya buku data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian					25 buku			60.000.000	Dinas Nakertrans

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Pembinaan bursa kerja on-line	Terbinanya pengelola BKOL, sistem dan operasional BKOL					6 kab/kota			202.932.000		Dinas Nakertrans
Pameran bursa kerja (job fair)	Terlaksananya pameran bursa kerja (job fair)					35 prsh			220.000.000		Dinas Nakertrans
Promosi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Mengikuti Sumbar Expo					1 kegiatan			109.000.000		Dinas Nakertrans
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
Jumlah wisatawan mancanegara	%		10,25	15,25	20,25	25,25		30,25	35,25		Dinas Pariwisata
Program Prov											
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									11.228.700.000		Dinas Pariwisata
Familiarization Trip	Terlaksananya Familiarization Trip					15 orang			200.000.000		Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Sumatera Barat Di Tingkat Nasional Dan Internasional	Terlaksananya promosi pariwisata Sumbar					4 event			895.700.000		Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata	Terlaksananya Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata					5 media promosi			750.000.000		Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan Event Tour De Singkarak	Terlaksananya event Tour de Singkarak					1 event			7.800.000.000		Dinas Pariwisata
Penyusunan Data Kepariwisataan Sumbar	Tersedianya data statistik kepariwisataan Sumbar					1 dokumen			200.000.000		Dinas Pariwisata
Pemanfaatan Media dan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Pemanfaatan Media dan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata					4 jenis media teknologi informasi			333.000.000		Dinas Pariwisata
West Sumatera Travel Mart	Terlaksananya West Sumatera Travel Mart di Sumatera Barat					1 kali			500.000.000		Dinas Pariwisata
Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat	Terlaksananya lomba foto dan video pariwisata Sumbar					1 kali			350.000.000		Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Sumatera Barat	Terlaksananya event pariwisata minat khusus Tubing dan Rafting					1 kali			200.000.000		Dinas Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	%		6,02	9,02	12,02	15,02		18,02	21,02		Dinas Pariwisata
Program Prov											
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									11.228.700.000		Dinas Pariwisata
Familiarization Trip	Terlaksananya Familiarization Trip					15 orang			200.000.000		Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Sumatera Barat Di Tingkat Nasional Dan Internasional	Terlaksananya promosi pariwisata Sumbar					4 event			895.700.000		Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata	Terlaksananya Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata					5 media promosi			750.000.000		Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan Event Tour De Singkarak	Terlaksananya event Tour de Singkarak					1 event			7.800.000.000		Dinas Pariwisata
Penyusunan Data Kepariwisataan Sumbar	Tersedianya data statistik kepariwisataan Sumbar					1 dokumen			200.000.000		Dinas Pariwisata
Pemanfaatan Media dan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Pemanfaatan Media dan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata					4 jenis media teknologi informasi			333.000.000		Dinas Pariwisata
West Sumatera Travel Mart	Terlaksananya West Sumatera Travel Mart di Sumatera Barat					1 kali			500.000.000		Dinas Pariwisata
Lomba Foto dan Video Pariwisata Sumatera Barat	Terlaksananya lomba foto dan video pariwisata Sumbar					1 kali			350.000.000		Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Sumatera Barat	Terlaksananya event pariwisata minat khusus Tubing dan Rafting					1 kali			200.000.000		Dinas Pariwisata

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
Kondisi mantap jalan nasional	%		70	71	72	73	74	75			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	%		11,19	11,42	11,65	11,87	12,10	12,33			BPS
Program Prov											
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah									7.099.427.050		Disperindag
Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna					150 IKM			127.790.000		Disperindag
Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Kecil Menengah.	Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna					20 IKM			142.950.000		Disperindag
Pelatihan Teknis Dan Diversifikasi Produk Kakao Bagi Industri Kecil Dan Menengah.	Jumlah IKM sentra kakao peserta pelatihan teknis yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis kakao					50 IKM			163.000.000		Disperindag
Penyusunan Data Base Industri Kecil dan Menengah Sumatera Barat	Tersedianya Database industri dan sentra industri di Sumatera Barat					40 buku			282.705.500		Disperindag
Bimbingan dan Pengawasan Teknis Izin Usaha Industri	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan dan pengawasan izin usaha industri					60 orang			112.785.700		Disperindag
Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Sentra dan Kawasan bagi Aparatur Kab/Kota Sumatera Barat.	Terhimpunnya masukan dan informasi yang terarah untuk pengembangan sentra dan kawasan industri di kab/kota Sumatera Barat					1 (satu) rumusan FGD			95.623.300		Disperindag
Sosialisasi Strategi Pengembangan Sentra yang Berdaya Saing bagi Industri Kecil Menengah.	Jumlah IKM yang bertambah pemahamannya tentang strategi pengembangan sentra yang berdaya saing					50 IKM			61.206.200		Disperindag
Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Makanan Berbasis Ikan	Jumlah IKM yang meningkat ketrampilannya dalam pelatihan diversifikasi produk makanan berbasis ikan					50 IKM			230.000.000		Disperindag
Pelatihan Teknis Dan Diversifikasi Produk Minyak Atsiri	Jumlah IKM sentra minyak atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis pembuatan sabun dan bahan penghemat bahan bakar minyak					60 IKM			628.628.500		Disperindag
Perekayasaan Prototipe Teknologi Tepat guna.	Jumlah rekayasa atau rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan					1 unit			435.000.000		Disperindag
Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Kulit menjadi Fashion Aksesoris.	Jumlah IKM sentra kulit peserta bimbingan teknis yang bertambah ketrampilannya dalam mengembangkan produk kulit menjadi fashion aksesoris					20 IKM			100.000.000		Disperindag

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Pelatihan Teknis Dan Pengembangan Disain Kerajinan Kayu Dan Bambu.	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan teknis dan pengembangan kerajinan kayu dan bambu					25 IKM		100.000.000		Disperindag
Pelatihan Diversifikasi Produk Makanan Berbasis Olahan Buah dan Sayur	Jumlah IKM yang meningkat ketrampilannya dalam pelatihan diversifikasi produk buah dan sayur yang dihasilkan					40 IKM		127.392.000		Disperindag
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Industri Olahan Semen dan Pembinaan Lanjutan.	Jumlah IKM sentra peserta bimbingan teknis yang bertambah ketrampilannya dalam mengembangkan produk olahan semen					52 IKM		423.440.000		Disperindag
Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah Agro di Daerah Tertinggal	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih					150 orang		502.050.200		Disperindag
Pelatihan Rancang Bangun dan Perekayasaan Alat Teknologi Tepat guna.	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna					15 IKM		282.660.000		Disperindag
Pelatihan Rekayasa Peralatan dan Perkakas Bantu Mesin Pengolahan Rotan bagi Industri Kecil Menengah dan Aparat Pembina.	Jumlah IKM dan Aparat Pembina yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan					15 IKM dan aparat		215.000.000		Disperindag
Workshop Pengembangan UPTD Minyak Atsiri Sumatera Barat	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kualitas melalui workshop					6 orang		75.000.000		Disperindag
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Mutu Perkapalan Rakyat	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan sosialisasi peningkatan mutu perkapalan rakyat					15 IKM		329.076.200		Disperindag
Lomba Desain Produk Tekstil	Terlaksananya lomba desain produk tekstil					60 IKM		382.891.500		Disperindag
Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Kelapa.	Jumlah wirausaha baru yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa					40 wirausaha baru		276.547.200		Disperindag
Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan Aneka dan Tekstil Serta Pembinaan Lanjutan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil					182 IKM		2.005.680.750		Disperindag

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
Koefisien Gini		Indeks	0,331	0,330	0,329	0,328	0,328	0,327			RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan		Kabupaten	3	3	3	2	1	1			Kemendes
Program Prov											
Program Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal									1.190.000.000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Satuan Pemukiman/Kepala Keluarga di kawasan transmigrasi yang dibina ekonomi dan sosial budaya					2 SP/115 KK			565.000.000		Dinas Nakertrans
Fasilitasi Pengelolaan Pengembangan Usaha Di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lembaga pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi yang terfasilitasi pengelolaan lembaga pengembangan usaha					8 lembaga			100.000.000		Dinas Nakertrans
Pelatihan Keterampilan Warga Trasnigrasi	Terlatihnya transmigran di unit pemukiman transmigrasi					120 orang			425.000.000		Dinas Nakertrans
Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi	Jumlah MOU/PKS yang disepakati					2 naskah			100.000.000		Dinas Nakertrans
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		%	6,86	7,07	7,28	7,49	7,72	7,94			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Prov											
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									2.497.444.500		Dinas Sosial
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Jumlah paket penyuluhan sosial melalui penyuluhan sosial keliling dan berbagai media					7 Paket			114.900.000		Dinas Sosial
Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial Se-Sumatera Barat	Jumlah peserta Bimbingan bagi pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat					50 Orang			56.872.000		Dinas Sosial
Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos Se Sumbar Dalam Rangka Akreditasi	Jumlah peserta Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos se Sumatera Barat Dalam Rangka Akreditasi					50 Orang			93.930.500		Dinas Sosial
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumbar	Jumlah peserta Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat					52 Orang			131.570.000		Dinas Sosial
KSN Expo Dan Award Dalam HKSN	Keikutsertaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran KSN Expo dan Awards					1 Kegiatan			71.802.000		Dinas Sosial
Penguatan Nilai-Nilai KSN	Pelaksanaan Penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi					1 Kegiatan			171.878.000		Dinas Sosial

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Dan Kab/Kota Se-Sumbar	Jumlah Peserta koordinasi LKKS se-Sumbar					200 Orang			621.848.000	Dinas Sosial
Penguatan Peran Pilar Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS					100 Orang			381.150.000	Dinas Sosial
Bimbingan Kapasitas Bagi TKSK Se-Sumbar	Jumlah peserta Bimbingan Kapasitas Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sumatera Barat					50 Orang			97.956.000	Dinas Sosial
Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Jumlah peserta pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat					50 Orang			54.550.000	Dinas Sosial
Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus Karang Taruna Se-Sumbar	Jumlah peserta Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus KT se- Sumatera Barat					50 Orang			57.346.000	Dinas Sosial
Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	Jumlah peserta Pertemuan FK-PSM se-Sumatera Barat					50 Orang			50.798.000	Dinas Sosial
Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan bagi PSM yang telah mengikuti pelatihan dasar					38 Orang			40.542.000	Dinas Sosial
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Jumlah peserta Pelatihan Dasar PSM					50 Orang			55.300.000	Dinas Sosial
Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	Jumlah peserta Penguatan Peran LKS Posdaya di Kab/Kota					960 Orang			497.002.000	Dinas Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) yang mendapatkan pembinaan								949.430.000	Dinas Sosial
Pengadaan Kelengkapan (biaya Klien)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh biaya kelengkapan harian dalam panti					40 Orang			81.432.000	Dinas Sosial
Biaya Obat-obatan Dan Dokter Pakai Habis	pengadaan obat-obatan					12 Bulan			11.400.000	Dinas Sosial
Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti					40 Orang			390.036.000	Dinas Sosial
Pengadaan Makanan Dan Minuman	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti					40 Orang			466.562.000	Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar									2.970.220.620	Dinas Sosial
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti					180 Orang			618.614.012	Dinas Sosial
Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti					180 Orang			334.670.420	Dinas Sosial
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti					180 Orang			1.875.587.688	Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	pengadaan obat-obatan					12 Bulan			64.153.900	Dinas Sosial
Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Jumlah lanjut usia terlantar yang dapat dipulangkan dan memperoleh penguburan					12 Bulan			37.000.000	Dinas Sosial
Lanjut Usia Berkreasi	Jumlah lanjut usia yang ikut berkreasi					250 Orang			40.194.600	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin									4.817.384.209	Dinas Sosial
Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan beras					4000 Orang			2.971.357.300	Dinas Sosial
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Jumlah peserta seleksi KUBE dan pendamping berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat					38 Orang			156.994.100	Dinas Sosial
Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	Jumlah kelompok penerima Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)					20 Kelompok			463.605.400	Dinas Sosial

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Jumlah kelompok penerima Bantuan KUBE untuk Pesisir dan Kepulauan					8 Kelompok		299.800.000		Dinas Sosial
Sosialisasi E-Warong Pedesaan	Jumlah peserta Sosialisasi Program dan Kegiatan E-Warong di Provinsi Sumatera Barat					50 Orang		86.779.900		Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota					57 Orang		114.246.000		Dinas Sosial
Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah peserta bimbingan pemantapan bagi pendamping BPNT					60 Orang		119.553.309		Dinas Sosial
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Jumlah peserta bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator pemberdayaan fakir miskin					50 Orang		86.879.900		Dinas Sosial
Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Jumlah Kelompok penerima Bantuan Usaha melalui E Warong FM Perkotaan dan UMKM					6 Kelompok		225.678.400		Dinas Sosial
Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	Jumlah peserta Koordinasi Program dan Kegiatan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat					50 Orang		292.489.900		Dinas Sosial
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana							2.021.800.000		Biro Bintal dan Kesra
Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1. Pembinaan ; 2. penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2019					4 jenjang pendidikan (TK, SD, SMP/Mts, dan SMA/SMK/MA); 19 Kab/Kota		826.800.000		Biro Bintal dan Kesra
Rapat kerja daerah Tim pembina UKS tingkat provinsi sumatera barat	Rakerda Tim pembina UKS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019					1 kali; 100 orang; 19 Kab/Kota		150.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan bidang kesejahteraan sosial	1. Rakor					1 kali; 102 orang		180.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanganan masalah sosial	1. Rakor; 2 Laporan					1 kali; 67 orang; 1 Rumusan Kebijakan		180.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan bidang kesehatan	1. Rakor; 2. Laporan					1 kali; 72 orang; 1 rumusan kebijakan		160.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	1. Rakor; 2. Laporan					1 kali; 100 orang; 1 rumusan kebijakan		125.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Kebijakan penanganan bencana dan pasca bencana	Rakor, Rumusan Kebijakan					1 kali; 95 orang; 1 rumusan kebijakan		150.000.000		Biro Bintal dan Kesra
Advokasi dan Supervisi Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS					1 (satu) Rumusan Kebijakan HIV dan AIDS, 150 Peserta		250.000.000		Biro Bintal dan Kesra

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR

TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	%		1,2	1,35	1,41	1,48	1,56	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Prov											
-											

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR

TUJUAN 12 : KONSUMSI, PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.											
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).											
Program Prov											
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup									4.208.751.100		Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim (Kampung Iklim)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					19 kab/kota			150.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha Dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya					23 kegiatan			200.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai skala provinsi dan danau yang dipantau					10 sungai; 5 danau;			300.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai					14 kab/kota			235.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas udara ambien					19 kab/kota			120.000.000		Dinas Lingkungan Hidup

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kawasan		7	7	7	7	7	7		Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Prov										
Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan									10.308.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Restocking Ikan Di Perairan Umum	Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum					75.000 ekor			400.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan					15 hr operasi di laut, 60 org operasi di perairan umum			3.700.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sosialisasi penerbitan perizinan kapal perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) dan peraturan perizinan kapal	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya buku kapal perikanan					7 kl x 20 org			150.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Koordinasi perizinan usaha perikanan tangkap	Terlaksananya koordinasi perizinan usaha perikanan tangkap					3 kali, 50 org			120.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pelayanan terpadu penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI kapal penangkap ikan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan terpadu penerbitan dokumen kapal dan pengukuran ulang kapal					7 kl x 20 org dan 100 kapal			175.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Gerakan Bersih Pantai	Terlaksananya gerakan bersih pantai					2 kali, 2 hr			180.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah					7 kawasan			1.600.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum	Tersedianya reservat di perairan umum					1 unit			200.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Rehabilitasi terumbu karang	Terlaksananya transplantasi terumbu karang					255 unit			250.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penanaman Pohon Pelindung Pantai	Terlaksananya penanaman pohon pelindung pantai					2 kali, 2 hr			250.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penanaman mangrove	Terlaksananya penanaman mangrov					10.000 btg			250.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana					3 kali			115.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	Terlaksananya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan					4 Kali			200.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	Terlaksananya pertemuan forum koordinasi tindak pidana					Forum koordinasi Tk. Prov 1 lks 40 org, forum Koordinasi Tk. Kab Kota 2 kl, 25 org			150.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penyusunan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan KKPD	Terlaksananya penyusunan rencna zonasi dan renacana pengelolaan KKPD					2 lokasi			418.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	Terlaksananya Pengawasan di KKPD					12 Bulan			750.000.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	Tersedianya sarana dan prasarana KKPD					4 unit			1.200.000.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sosialisasi Perda Zonasi	Terlaksananya penyusunan pergub dan tersedianya Perda					7 Kali			200.000.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR



TUJUAN 16 : PERDAMIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Target 16.2 Menghentikan perilaku kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.	-	-	-	-	-	15,86	15,36	14,86			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Prov											
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak									528.000.000		Dinas PP dan PA
Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah					50 orang			75.000.000		Dinas PP dan PA
Pelatihan Peningkatan SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan	SDM Pendamping Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan yang mengikuti pelatihan					40 orang			85.000.000		Dinas PP dan PA
Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum	1. Rapat Koordinasi; 2. Pembinaan pada LPKA; 3. Laporan Kegiatan					1. 1 kali; 2. 50 orang anak; 3. 1 Jenis laporan			85.000.000		Dinas PP dan PA
Workshop Penangan Anak Berkebutuhan Khusus	Pendamping anak yang berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelatihan					40 orang			83.000.000		Dinas PP dan PA
Pendampingan dan Penjangkauan korban tindak kekerasan	Korban yang terlayani					30 orang			40.000.000		Dinas PP dan PA
Peningkatan layanan informasi dan kerjasama perlindungan perempuan dan anak	1. Kerjasama perlindungan perempuan dan anak; 2. Layanan Informasi yang tersedia					1. 10 Kerjasama (MoU dan PKS); 2. 6 kali			47.600.000		Dinas PP dan PA
Penanganan dan Pelayanan anak korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan yang terlayani					30 orang			62.400.000		Dinas PP dan PA
Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Bahaya Perilaku Menyimpang	Anak yang mendapatkan pelatihan terkait dengan bahaya perilaku menyimpang					40 orang			50.000.000		Dinas PP dan PA
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			-
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Predikat		BB	BB	BB	A	A	A			Setda (Biro Organisasi)
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Skor 1-100		60-70	60-70	60-70	65-75	65-75	75-80			-
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	%		100	100	100	100	100	100			Setda (Biro Organisasi)

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	TARGET PENCAPAIAN						Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)
Program Prov											
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										394.000.000	Biro Organisasi
Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Dan Kab/Kota	Jumlah UKPP yang dibina					6 UKPP				53.800.000	Biro Organisasi
Pengawasan Dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Prov. Sumbar					2 Laporan				58.800.000	Biro Organisasi
Pembinaan OPD Terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Peserta					100 Orang				70.800.000	Biro Organisasi
Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan Penyusunan dan Penerapan SPM					4 Laporan				83.800.000	Biro Organisasi
Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik					100 Orang				126.800.000	Biro Organisasi
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
Indeks Lembaga Demokrasi Indonesia.	Indeks		65,22	65,84	66,46	67,07	67,69	68,31			-
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. (Usia 0 - 18 tahun)			-	-	-	85	88	90			-